

Laporan Tahunan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

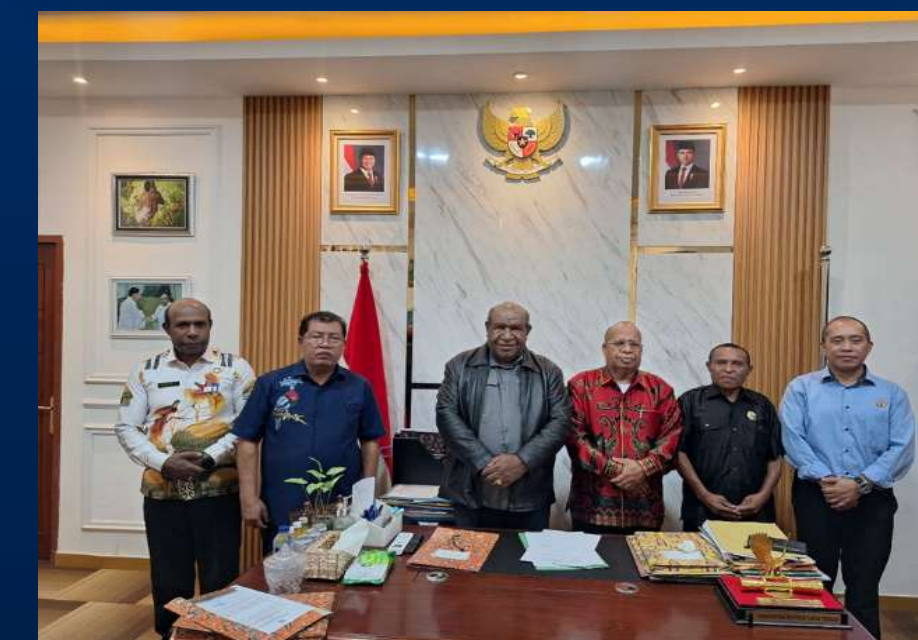
Wamena, 8 Januari 2026



Laporan Tahunan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan informasi atas pelaksanaan tugas Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus bagi Orang Asli Papua. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, BP3OKP berkomitmen mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.

BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dilibatkan dalam panitia seleksi calon DPRP Provinsi Papua Pegunungan

Anggota BPP/BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan berperan aktif dalam melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pada seluruh tahapan pelaksanaan seleksi Calon Anggota DPRP Papua Pegunungan jalur Otonomi Khusus Masa Jabatan 2024–2029, mulai dari seleksi berkas, penetapan jadwal, pelaksanaan tes tertulis, penyusunan makalah, dan wawancara hingga rapat pleno penetapan kelulusan. BPP Papua Pegunungan juga terlibat dalam pengawalan proses pleno penetapan calon terpilih, penyerahan hasil seleksi dari Panitia Seleksi kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Sekretaris Daerah, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel hingga ditindaklanjuti ke Kementerian Dalam Negeri.

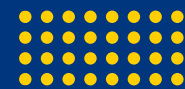


Rapat Koordinasi Pimpinan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Papua Pegunungan bersama Pokja Papua Produktif BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan

Rapat Koordinasi Pimpinan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Papua Pegunungan bersama Pokja Papua Produktif BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dilaksanakan pada 24 April 2025 pukul 14.00 WIT hingga selesai, bertempat di salah satu dapur Program MBG di Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini bertujuan mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Program MBG sekaligus mendorong keterlibatan pelaku ekonomi kreatif Orang Asli Papua, khususnya di bidang pertanian, agar program tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa penerima makan bergizi gratis, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui pemanfaatan hasil kebun di Jayawijaya. Rapat dihadiri oleh Pokja Papua Produktif, staf BP3OKP, Ketua dan penanggung jawab Dapur MBG, serta perwakilan Gekraf bidang pertanian, dan menghasilkan kesepakatan kerja sama penyediaan sayur-sayuran dan buah-buahan oleh pelaku ekonomi kreatif lokal dengan harga terjangkau sesuai kebutuhan dapur MBG, yang disambut positif oleh pengelola dapur sebagai langkah penguatan ekonomi masyarakat



Ibadah HUT Pekabaran Injil Gereja Keman Injil Kingmi di Tanah Papua yang ke-71



BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan turut berpartisipasi dalam Ibadah HUT Pekabaran Injil Gereja Keman Injil Kingmi di Tanah Papua ke-71 yang dilaksanakan pada 22 April 2025 di Sapalek, Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, sebagai bentuk dukungan terhadap harmonisasi kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan; kegiatan ibadah berlangsung khidmat dan lancar, diwarnai apresiasi gereja kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas penetapan hari libur faktual, seruan moral untuk memberantas miras, narkoba, dan kekerasan, ajakan kolaborasi membangun sektor pendidikan dan kesehatan, serta penegasan komitmen BP3OKP untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah, gereja, dan masyarakat guna mewujudkan Papua Pegunungan yang damai, aman, dan bermartabat.



Rapat Koordinasi Rencana Kejuaraan Nasional Taekwondo Papua Open 2025.



BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan turut mendukung Rapat Koordinasi Rencana Kejuaraan Nasional Taekwondo Papua Open 2025 yang dilaksanakan pada 28 April 2025 di Cafe Anggrek, dengan melibatkan Kodispora, KONI, dan PB Taekwondo Provinsi; rapat membahas upaya penjaringan bibit atlet daerah, pembinaan atlet muda berkualitas, serta persiapan PON Beladiri di Kudus 2025, sekaligus menyinkronkan peran pemerintah, KONI, dan POPSI untuk mencetak atlet berprestasi di tingkat nasional dan internasional, sebagai bagian dari penguatan program Papua Produktif dan pengembangan olahraga prestasi di Provinsi Papua Pegunungan.



Rapat Kerja Pokja Papua Cerdas dan kunjungan bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Pegunungan serta Yayasan Cakra

Rapat Kerja Pokja Papua Cerdas bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Pegunungan serta Yayasan Cakra dilaksanakan pada 28 April 2025 bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, dengan tujuan membahas serta menyinkronkan dan mengevaluasi pelaksanaan Program Sekolah Alam, Makan Bergizi, dan Pendidikan Life Skill yang terintegrasi dengan budaya lokal bagi anak-anak asli Papua. Rapat ini dihadiri oleh Pokja Papua Cerdas, Kepala Dinas P&P, dan Yayasan Cakra, serta menegaskan bahwa program tersebut hingga saat ini telah berjalan dengan baik dan lancar di tiga lokasi di Kabupaten Jayawijaya, yakni Hetigima, Kurulu, dan Walaik, dengan antusiasme tinggi dari siswa maupun orang tua. Melalui kunjungan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan belajar serta penyediaan makan bergizi yang dikelola oleh orang tua siswa dari hasil kebun sendiri di Sekolah Alam Bakti Toleransi, disampaikan komitmen bersama untuk memperluas pelaksanaan program ke wilayah lain di Provinsi Papua Pegunungan, serta motivasi kepada siswa agar terus bersemangat menempuh pendidikan sebagai fondasi masa depan Papua Pegunungan.



Sosialisasi Program Makan Bergizi dan Pembinaan LMA di Kabupaten Jayawijaya

BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan bersama pemangku kepentingan terkait melaksanakan Sosialisasi Program Makan Bergizi dan Pembinaan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) pada 13 Maret 2025 di Aula Wio Kantor Bupati Jayawijaya, yang diikuti oleh perwakilan 8 kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan; kegiatan ini menegaskan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta mendorong dampak ekonomi lokal melalui pemberdayaan petani dan pembukaan lapangan kerja bagi mama-mama Papua dalam satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), sebagai bagian dari penguatan Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Polhukam.



Mendampingi Kejuaraan Nasional Taekwondo Papua Open 2025 di Jayapura

BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam hal ini pokja papua produktif menghadiri dan mendampingi pelaksanaan Kejuaraan Nasional Taekwondo Papua Open 2025 yang berlangsung pada 1–3 Mei 2025 di GOR Cendrawasi, Jayapura, sebagai bagian dari persiapan menghadapi kejuaraan PON Beladiri di Kudus, Jawa Tengah, pada Oktober 2025. Kegiatan ini melibatkan Sekda Provinsi Papua, Ketua DPR Provinsi Papua, Kadispora, seluruh atlet, pelatih, dan manajer Taekwondo, serta difokuskan pada sinkronisasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan untuk menjaring atlet berbakat dari seluruh wilayah Papua Raya. Melalui evaluasi dan pembinaan ini, diharapkan tercipta atlet muda yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus mendukung penguatan program Papua Produktif di bidang olahraga prestasi.



Pokja Papua Polhukam melaksanakan Sosialisasi Bahaya Miras, Lem Aibon, dan Narkoba bagi Masa Depan Anak Muda di Papua Pegunungan

Kegiatan Sosialisasi Bahaya Miras, Lem Aibon, dan Narkoba bagi Masa Depan Anak Muda di Papua Pegunungan, Dilaksanakan pada Selasa, 25 Maret 2025, bertempat di Rumah Singgah Yayasan GAP Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan melibatkan Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan bersama Pokja Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Polhukam, pendiri Yayasan GAP, serta seluruh anak-anak rumah singgah. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan edukasi kepada anak-anak mengenai dampak negatif penyalahgunaan miras, lem aibon, dan narkoba terhadap masa depan generasi muda Papua Pegunungan. Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, doa bersama, penyampaian materi sosialisasi, pemaparan profil Yayasan GAP, kuis interaktif, penyerahan bantuan sosial, serta doa penutup dan foto bersama. Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar, memberikan kesan mendalam bagi seluruh pihak yang terlibat, serta memperkuat komitmen bersama dalam upaya perlindungan dan pembinaan anak-anak terlantar di Papua Pegunungan.



Penyerahan Tropi Terbaik Pada Kejuaraan Taekwondo Papua Open Kepada Gubernur Provinsi Papua Pegunungan



Pada 7 Mei 2025, dilaksanakan penyerahan tropi dan penghargaan Kejuaraan Taekwondo Papua Open di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, yang dipimpin langsung oleh Gubernur selaku Pembina Olahraga, dengan dihadiri Kadispora, Kepala OPD, atlet, pelatih, dan manajer. Kegiatan ini memberikan apresiasi atas prestasi kontingen Taekwondo Provinsi Papua Pegunungan yang meraih 3 medali emas, 2 perak, dan 17 perunggu, sekaligus memotivasi para atlet melalui penghargaan moril dan pembinaan finansial. Kegiatan ini juga menjadi ajang harmonisasi antara pemerintah dan pengurus olahraga untuk membuka kesempatan latihan bagi talenta muda berbakat, serta mendorong pengembangan prestasi atlet dalam mengharumkan nama Provinsi Papua Pegunungan di tingkat nasional maupun internasional.



Kegiatan Rapat Rekonsiliasi Data Beasiswa Unggul Papua (SUP) Dalam Negeri dan Luar Negeri Tahun 2025.



Pada 6–7 Mei 2025, dilaksanakan Rapat Rekonsiliasi Data Beasiswa Unggul Papua (SUP) Dalam dan Luar Negeri Tahun 2025 di Ruang Rapat Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, menindaklanjuti surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Kegiatan dihadiri Kemendagri RI (Ditjen Bina Keuangan Daerah), Wakil Gubernur, Staff Ahli bidang Pengembangan Pendidikan, Pj. Sekda, perwakilan BPP Pokja Papua Cerdas, Inspektorat, Kepala BPKAD, dan Kepala Dinas Pendidikan. Rapat ini bertujuan meninjau dan merekonsiliasi data penerima beasiswa agar dana SUP tepat sasaran, mendukung peningkatan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP), serta memastikan pengelolaan program beasiswa berjalan transparan, akuntabel, dan efektif sesuai ketentuan pemerintah.



Kunjungan Kerja Wakil Menteri Dalam Negeri dan Ketua Tim Komisi II DPR RI beserta Rombongan dalam Rangka Peninjauan KIPP dan Evaluasi Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Pegunungan



Kunjungan Kerja Wakil Menteri Dalam Negeri bersama Ketua Tim Komisi II DPR RI beserta rombongan dalam rangka peninjauan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan evaluasi Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Pegunungan dilaksanakan pada Jumat, 16 Mei 2025, bertempat di Gunung Susu Taman Biologi LIPI dan Gereja Baptis Wesaroma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini bertujuan meninjau langsung lokasi rencana pembangunan KIPP Provinsi Papua Pegunungan sekaligus melakukan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah otonom baru, serta dihadiri oleh Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ketua Tim Komisi II DPR RI, perwakilan Kementerian Bappenas RI, Kementerian PUPR RI, pemerintah provinsi dan kabupaten, serta unsur terkait lainnya. Rangkaian kegiatan meliputi dialog dan evaluasi di Gereja Wesaroma yang membahas isu-isu strategis seperti inflasi daerah serta pemaparan capaian awal dan tantangan DOB oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kunjungan ini merupakan bagian dari evaluasi nasional terhadap empat DOB di Papua sebagai bentuk harmonisasi dan komitmen negara dalam memastikan keberhasilan pemekaran wilayah serta percepatan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Pegunungan.



Pertemuan bersama Tokoh Masyarakat Kabupaten Nduga dalam rangka menanggapi situasi penembakan di RSUD Wamena



Pertemuan bersama Tokoh Masyarakat Kabupaten Nduga dalam rangka menanggapi situasi penembakan di RSUD Wamena dilaksanakan pada Jumat, 30 Mei 2025, bertempat di Aula Kantor KPPN Wamena, dan dipimpin oleh Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, tokoh adat dan masyarakat Kabupaten Nduga, serta Koordinator HAM Provinsi Papua Pegunungan, dengan tujuan melakukan koordinasi dan evaluasi atas insiden penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya pada 28 Mei 2025. Pertemuan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai pentingnya penyelidikan yang mendalam dan objektif terhadap kasus penembakan, pemisahan isu keamanan dengan keberadaan pengungsi masyarakat Nduga, serta penolakan terhadap generalisasi pelaku berdasarkan asal daerah. Selain itu, seluruh pihak menegaskan komitmen untuk menjaga keamanan dan stabilitas Wamena sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, dengan menekankan pendekatan yang adil, manusiawi, dan kolektif guna mencegah konflik horizontal dan menjaga ketertiban sosial di wilayah Papua Pegunungan.



Rapat dengan tim Corban University membahas beasiswa oleh Pemerintah Provinsi Papua di Corban University, Oregon USA.



Pada 6–7 Mei 2025, dilaksanakan Rapat Rekonsiliasi Data Beasiswa Unggul Papua (SUP) Dalam dan Luar Negeri Tahun 2025 di Ruang Rapat Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, menindaklanjuti surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Kegiatan dihadiri Kemendagri RI (Ditjen Bina Keuangan Daerah), Wakil Gubernur, Staff Ahli bidang Pengembangan Pendidikan, Pj. Sekda, perwakilan BPP Pokja Papua Cerdas, Inspektorat, Kepala BPKAD, dan Kepala Dinas Pendidikan. Rapat ini bertujuan meninjau dan merekonsiliasi data penerima beasiswa agar dana SUP tepat sasaran, mendukung peningkatan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP), serta memastikan pengelolaan program beasiswa berjalan transparan, akuntabel, dan efektif sesuai ketentuan pemerintah.



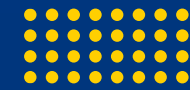
Sosialisasi Usaha Koperasi Gapensi Sulah Noken Wamena menuju Koperasi Merah Putih



Sosialisasi Usaha Koperasi Gapensi Sulah Noken Wamena menuju Koperasi Merah Putih dilaksanakan pada 6 Mei 2025 bertempat di Aula Wisata Pemancingan Grand Wesaput, dengan tujuan mengoordinasikan dan mengevaluasi pengembangan koperasi guna menghidupkan kembali aktivitas usaha para anggotanya, meliputi kelompok tani sayur, peternakan babi, kolam ikan, kios, serta pemanfaatan hasil hutan. Kegiatan ini dihadiri oleh Pokja Papua Produktif, Kepala Dinas PTSP, para kelompok tani, Ketua Koperasi, dan tokoh pemuda, serta difokuskan pada pengawalan proses pendirian dan penguatan koperasi agar dapat berkembang menuju Koperasi Desa Merah Putih. Melalui kegiatan ini disepakati pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap usaha kelompok tani untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha, sehingga koperasi mampu menjadi wadah ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan bagi masyarakat di Wamena dan sekitarnya.



Pertemuan Koordinasi Pokja Papua Sehat BP3OKP bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya



Pada 15 Mei 2025, Pokja Papua Sehat BP3OKP melaksanakan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan untuk mengevaluasi kondisi pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP). Pertemuan membahas berbagai kendala, antara lain kurangnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan karena tidak memiliki BPJS, KK, atau NIK, keterbatasan fasilitas, sarana, prasarana, obat, dan data kesehatan yang belum valid, serta ketidakjelasan angka kelahiran dan kematian yang menghambat pengukuran Indeks Pembangunan Manusia OAP. Kepala Dinas Kesehatan berencana membentuk Satgas Jayawijaya Sehat untuk patroli rumah-rumah dan mengaktifkan Posyandu di 328 kampung, menambah tenaga medis, serta menyekolahkan lima anak OAP setiap tahun di bidang kedokteran dan meningkatkan kapasitas perawat melalui pendidikan berjenjang, sebagai upaya strategis memperkuat pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Pegunungan.



Audiensi Pokja Papua Sehat BP3OKP bersama Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Wamena



Audiensi Pokja Papua Sehat BP3OKP bersama Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Wamena dilaksanakan pada Jumat, 2 Mei 2025 bertempat di Kantor BPJS Cabang Wamena, dengan tujuan mengetahui serta mengevaluasi peran dan fungsi BPJS dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Pokja Papua Sehat, staf BP3OKP Papua Pegunungan, dan Kepala Kantor BPJS Wamena, serta difokuskan pada koordinasi dan evaluasi untuk memperkuat sinergi peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi Orang Asli Papua. Dalam audiensi tersebut disampaikan bahwa Kabupaten Jayawijaya telah mencapai kepesertaan JKN sebesar 73,30 persen, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti penurunan peserta PBI JK, tingginya jumlah peserta nonaktif, keterbatasan fasilitas dan tenaga medis, serta belum optimalnya pemenuhan standar mutu FKTP, sehingga diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, BPJS, dan para pemangku kepentingan guna menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas di wilayah Papua Pegunungan.



Pertemuan bersama Tokoh Masyarakat Kampung mengenai masalah keamanan dan ketertiban di Kota Wamena



Pada 2 Juni 2025, Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan menghadiri pertemuan bersama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, dan intelektual dari 9 kampung di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, bertempat di Kantor Distrik Napua, dalam rangka sosialisasi dan koordinasi keamanan pasca penembakan anggota Polres Jayawijaya di RSUD Wamena. Pertemuan menindaklanjuti himbauan Bupati Jayawijaya dan menghasilkan komitmen bersama antara Kepala Distrik, kepala kampung, dan masyarakat untuk menjaga ketertiban di masing-masing kampung, melakukan verifikasi penduduk baru melalui pengecekan KTP, serta memastikan masyarakat Distrik Napua tetap merasa aman dan nyaman, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga lokal dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.



Pertemuan Anggota BP3OKP Setanah Papua dengan Menteri HAM Republik Indonesia.



Pada 12 Juni 2025, enam Anggota BP3OKP se-Tanah Papua melakukan pertemuan dengan Menteri HAM Republik Indonesia di Kantor Kementerian HAM RI, Jakarta, untuk melaporkan situasi keamanan dan ketertiban di enam provinsi Papua Raya, khususnya di Papua Pegunungan pasca penembakan anggota Polres Jayawijaya di RSUD Wamena, serta kondisi pengungsi dari Kabupaten Nduga yang berada di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Pertemuan ini diterima dengan baik oleh Menteri HAM dan mencakup penyerahan hasil keputusan Gubernur keenam provinsi serta rekomendasi BP3OKP, termasuk perlunya pengumpulan data akurat mengenai pengungsi Nduga untuk mendukung penanganan situasi kemanusiaan dan pengambilan kebijakan yang tepat.



Pertemuan 6 Anggota BP3OP Se Tanah Papua Bersama WAMENDAGRI RI



Pada 24 Juni 2025, enam Anggota BP3OKP se-Tanah Papua melakukan pertemuan strategis dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ibu Dr. Ribka Haluk, di Jakarta untuk membahas perkembangan implementasi otonomi khusus di Papua. Pertemuan membahas tata kelola dana OTSUS dengan interoperabilitas SIPD, SIKD, dan SIPP guna optimalisasi pengelolaan sesuai rekomendasi KPK, penguatan fungsi BP3OKP melalui pendampingan dan supervisi KEMENDAGRI, serta pembangunan kesepahaman bersama implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 dan Asta Cita melalui forum koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan Papua. Selain itu, KEMENDAGRI akan memfasilitasi audiensi BP3OKP dengan Wakil Presiden RI untuk tindak lanjut, dan rapat ditutup dengan penandatanganan kesepakatan dari hasil kesimpulan pertemuan.



Pertemuan antara Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bersama Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi.



Pada 25 Juni 2025, Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan mengadakan pertemuan dengan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi RI di Ruang Kerja Deputi, membahas pendirian dan pengembangan Koperasi Merah Putih di Provinsi Papua Pegunungan. Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Pengawasan memaparkan syarat dan peraturan terkait Koperasi Merah Putih, sementara BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen untuk menindaklanjuti melalui koordinasi dengan Dinas PERINDAKOP dan Dinas Pemberdayaan Kampung/Desa (DPMK) Provinsi Papua Pegunungan guna memastikan implementasi dan pengembangan koperasi berjalan sesuai ketentuan.



Pertemuan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan bersama para pendaftar CPNS Provinsi Papua Pegunungan Formasi Tahun 2024



Pertemuan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan bersama para pendaftar CPNS Provinsi Papua Pegunungan Formasi Tahun 2024 dilaksanakan pada 30 Juni 2025 bertempat di Aula Kantor KPPN Wamena, dengan tujuan mendengarkan secara langsung aspirasi dan keluhan para peserta seleksi. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dan perwakilan HILABEWA, serta difokuskan pada sinkronisasi dan evaluasi kebijakan terkait penerimaan CPNS. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa kuota Otonomi Khusus sebesar 80 persen diperuntukkan bagi Orang Asli Papua dan 20 persen bagi non-OAP yang lahir dan besar di Papua Pegunungan, namun pada tahapan penetapan hasil SKD CASN tidak terdapat peserta OAP Papua Pegunungan yang dinyatakan lulus. Menyikapi hal tersebut, BP3OKP menegaskan perlunya kebijakan dan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta komitmen Badan Pengarah untuk mengawal permasalahan ini di tingkat kabupaten hingga pusat guna memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak asli Papua Pegunungan.



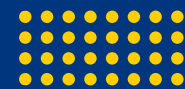
Partisipasi Pokja Papua Sehat BP3OKP dalam Sosialisasi Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)



Partisipasi Pokja Papua Sehat BP3OKP dalam Sosialisasi Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dilaksanakan pada 5 Juni 2025 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini diikuti oleh Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP, Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Asisten II, kepala OPD terkait beserta staf, serta Tim Kerja MBG Provinsi Papua Pegunungan, dengan tujuan menyelaraskan pemahaman dan pelaksanaan program MBG di wilayah Papua Pegunungan. Dalam rapat tersebut disampaikan sejumlah catatan penting, antara lain perlunya pembentukan tim kerja dan rencana aksi MBG yang melibatkan Pemerintah Provinsi dan delapan kabupaten melalui regulasi daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, kebutuhan pendataan sasaran penerima MBG yang akurat dan berbasis kajian, serta tantangan keterbatasan stok pangan daerah yang menuntut peningkatan produksi bahan pangan lokal. Kegiatan ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjamin efektivitas, keberlanjutan, dan dampak nyata Program MBG bagi masyarakat Papua Pegunungan.



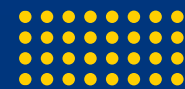
Koordinasi bersama RRI Wamena mengenai Kerjasama dalam peliputan kegiatan BPP.



Pada 19 Juni 2025, Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor RRI Wamena di ruang kerjanya untuk menjajaki kerja sama peliputan kegiatan BPP. Pertemuan ini membahas sinkronisasi tugas dan fungsi BPP serta permintaan agar RRI turut memberitakan setiap kegiatan BPP. Kepala Kantor RRI Wamena menyambut baik kerja sama ini dan menugaskan stafnya untuk berkoordinasi dengan staf BPP terkait prosedur, biaya, dan jadwal kegiatan yang akan diliput, memastikan seluruh kegiatan BPP mendapat publikasi yang optimal.



Pertemuan Antara Pokja Papua Produktif Bersama perwakilan Mahasiswa Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Papua Pegunungan



Pada tanggal 14 Juni 2025, Pokja Papua Produktif mengadakan pertemuan strategis dengan Ketua Himpunan Mahasiswa Papua Jayawijaya (HMPJ) serta beberapa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jayawijaya, bertempat di Cafe Hotel Anggrek Wamena. Pertemuan ini difokuskan pada penguatan peran mahasiswa dalam pembangunan ekonomi lokal melalui pengembangan kewirausahaan, sekaligus memetakan potensi dan talenta mahasiswa di bidang barang dan jasa. Dalam diskusi yang berlangsung, para peserta bersepakat untuk memulai usaha yang sesuai dengan passion dan kemampuan mereka, serta merintis pembentukan koperasi kampus sebagai wadah yang mendukung kegiatan ekonomi produktif. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa, tetapi juga dapat mendorong terciptanya ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan, memperkuat kapasitas ekonomi lokal, dan memotivasi generasi muda Papua Pegunungan untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah mereka.



Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Pokja Papua Cerdas dan Kedutaan Australia



Pada tanggal 10 Juni 2025, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Pokja Papua Cerdas melakukan pertemuan penting dengan Kedutaan Australia – Indonesia di Jakarta, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr. HC. John Tabo, S.E., M.BA. Pertemuan ini bertujuan untuk mempresentasikan program pendidikan yang sedang dijalankan di Provinsi Papua Pegunungan, sekaligus menjajaki kemungkinan kerja sama strategis dengan Kedutaan Australia dalam bidang pendidikan. Turut hadir dalam diskusi ini Paul Wetipo, S.Pd., M.Pd., sebagai anggota Pokja Papua Cerdas, Kepala Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, serta Kepala Dinas BAPPERINDA Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan berlangsung lancar dan konstruktif, menghasilkan pemahaman bersama terkait tantangan dan potensi pengembangan pendidikan di Papua Pegunungan, dan disepakati untuk menjadwalkan pertemuan tindak lanjut yang lebih detail guna memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kedutaan Australia dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Papua Pegunungan.



Rapat Koordinasi dan Sosialisasi BP3OKP bersama MRP Papua Pegunungan

Pada hari Rabu, 16 Juli 2025, BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan mengadakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Sekretariat MRP Provinsi Papua Pegunungan, bertujuan membangun sinergi kelembagaan serta memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah ini. Dalam pertemuan tersebut, Anggota BP3OKP, Bapak Hantor Matuan, memaparkan dasar hukum, struktur kelembagaan, serta peran strategis masing-masing Pokja, termasuk program kerja dan rencana tindak lanjut Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Produktif, dan Pokja Papua Polhukam. Ketua I dan Ketua II MRP menegaskan bahwa MRP dan BP3OKP memiliki tujuan bersama untuk mengawal pembangunan demi kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), dan menekankan perlunya kolaborasi berkelanjutan, termasuk dengan DPRP. Beberapa kesimpulan utama rapat mencakup koordinasi terus-menerus, penanganan isu stunting dan kesehatan, pengawalan program strategis pemerintah pusat, serta penguatan kerjasama dalam keamanan wilayah. Pertemuan ini menjadi fondasi penguatan koordinasi lintas lembaga untuk pelaksanaan Otsus yang efektif, partisipatif, dan berkeadilan, dengan harapan tercipta sinergi berkelanjutan antara BP3OKP dan MRP dalam bentuk program nyata bagi kemajuan masyarakat Papua Pegunungan.



Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Wilayah Provinsi Papua

Pegunungan

Pada Senin, 21 Juli 2025, Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan menghadiri secara daring peluncuran nasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto, dengan pusat kegiatan untuk Papua Pegunungan di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya. Program ini merupakan bagian dari Trisula Pengentasan Kemiskinan bersama Cek Kesehatan Gratis dan Sekolah Rakyat, bertujuan mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di daerah tertinggal dan pedalaman. Dalam arahannya, Anggota BP3OKP Bapak Hantor Matuan menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Jayawijaya, sekaligus mengajak seluruh lapisan masyarakat—dari petani, pelaku UMKM, sektor ekonomi kreatif, hingga BUMD dan BUMN—untuk mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi lokal dan instrumen pengentasan kemiskinan. Berdasarkan laporan Gubernur, dari 2.627 desa dan kelurahan di Papua Pegunungan, baru 174 koperasi memiliki status hukum resmi, sementara proses legalisasi terus didorong agar seluruh desa dapat mengakses program ini secara merata. Peluncuran ini menjadi tonggak penting untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem, mendorong pembangunan desa mandiri, produktif, dan berdaya saing, khususnya bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP).



Audiensi BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan bersama Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua dan Kepala KPPN Wamena dengan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan

Audiensi BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan bersama Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua dan Kepala KPPN Wamena dengan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dilaksanakan pada Jumat, 8 Agustus 2025, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan pimpinan Kanwil DJPb Papua dan KPPN Wamena yang baru, menyampaikan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan negara, serta memperkuat komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Kanwil DJPb, KPPN, dan BP3OKP. Audiensi dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, jajaran Sekretariat Daerah dan OPD terkait, Kepala Kanwil DJPb beserta rombongan, Kepala KPPN Wamena, serta Anggota BP3OKP dan Pokja Papua Sehat. Pertemuan berlangsung hangat dan menghasilkan kesepakatan mengenai pentingnya percepatan pencairan Dana Otonomi Khusus sesuai mekanisme yang berlaku, optimalisasi pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat, serta komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama dan sinergi lanjutan dalam pelaksanaan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pembangunan di delapan kabupaten Provinsi Papua Pegunungan.



Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan

Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan dilaksanakan pada Senin, 11 Agustus 2025, bertempat di Hotel Pilamo, dengan tujuan membahas kesiapan teknis dan strategi pelaksanaan pembangunan perumahan di delapan kabupaten sekaligus mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan risiko yang berpotensi menghambat program. Rapat ini dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Anggota BP3OKP, pimpinan balai teknis perumahan, perwakilan kementerian/lembaga terkait, Inspektorat Jenderal Kemendagri, Forkopimda, serta bupati dan jajaran OPD dari delapan kabupaten. Dalam arahannya, Wamendagri menegaskan agar Papua Pegunungan menjadi barometer pembangunan bagi provinsi baru dengan menekankan pentingnya inventarisasi persoalan sesuai kondisi geografis setempat, sementara paparan teknis mengungkap sejumlah isu krusial seperti keterbatasan air bersih, belum optimalnya layanan pendidikan dan kesehatan, serta potensi pertanian yang belum tergarap maksimal. Anggota BP3OKP menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan komitmen pemerintah provinsi, serta menekankan pentingnya keseriusan seluruh kepala daerah agar keberhasilan tahap awal pembangunan perumahan ini menjadi momentum percepatan pembangunan sektor lain di Papua Pegunungan.



Open House Sekolah Papua Harapan Wamena



Open House Sekolah Papua Harapan Wamena dilaksanakan pada Jumat, 29 Agustus 2025, bertempat di Sekolah Papua Harapan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dengan tujuan memperkenalkan keberadaan, sistem pendidikan, serta visi dan misi sekolah kepada masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota dan seluruh Pokja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan, Pokja Papua Cerdas, pendiri Sekolah Papua Harapan, serta orang tua dan siswa-siswi. Melalui kegiatan ini terbangun pemahaman dan apresiasi bersama terhadap komitmen Sekolah Papua Harapan dalam menghadirkan pendidikan berkualitas yang menekankan pembentukan karakter, gizi seimbang, dan daya saing global anak-anak Papua, sekaligus memperkuat dukungan lintas pihak dengan harapan sekolah ini dapat dikembangkan di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.



Audiensi BP3OKP Pokja Papua Sehat dengan BPS Kabupaten Jayawijaya

Audiensi BP3OKP Pokja Papua Sehat dengan BPS Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan pada Jumat, 22 Agustus 2025, bertempat di Ruang Kerja Kepala Kantor BPS Kabupaten Jayawijaya, dengan tujuan memperkenalkan peran dan fungsi BP3OKP dalam pelaksanaan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) percepatan Otonomi Khusus Papua serta membangun kerja sama penyediaan data statistik pembangunan, khususnya terkait Orang Asli Papua di bidang IPM, UHH, dan kesehatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Pokja Papua Sehat serta sekretaris dan staf BPS Kabupaten Jayawijaya, dan menghasilkan pemaparan data IPM dan UHH tahun 2024 untuk delapan kabupaten di Papua Pegunungan sebagai dasar analisis pembangunan. Dalam audiensi tersebut disepakati pentingnya pendataan khusus OAP sesuai arahan KPK RI, dengan tindak lanjut koordinasi resmi kepada BPS Pusat terkait kriteria dan mekanisme pendataan, serta rencana pertemuan lanjutan bersama BP3OKP dan seluruh Pokja untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik yang akurat, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan Otonomi Khusus di Papua Pegunungan.



Kunjungan Kerja Pokja Papua Sehat BP3OKP ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya



Kunjungan Kerja Pokja Papua Sehat BP3OKP ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan pada Selasa, 19 Agustus 2025, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, dengan tujuan menyamakan persepsi terkait pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan, menindaklanjuti amanat KPK RI mengenai pendataan khusus Orang Asli Papua sebagai dasar pelayanan BPJS Kesehatan, serta mengidentifikasi permasalahan fasilitas dan tenaga medis di RSUD Wamena sebagai rumah sakit rujukan regional. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP, dan staf BP3OKP, serta dilaksanakan dalam kerangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi. Hasil pertemuan menegaskan pentingnya pendataan OAP yang akurat, perhatian serius terhadap keterbatasan sarana dan tenaga kesehatan di RSUD Wamena, serta komitmen bersama untuk memprioritaskan pengembangan posyandu di 328 kampung dan penanganan ibu hamil oleh tenaga kesehatan, dengan dukungan penuh Pokja Papua Sehat BP3OKP dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dan Papua Pegunungan.



Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI Provinsi Papua Pegunungan



Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI Provinsi Papua Pegunungan dilaksanakan pada 21 September 2025 bertempat di Baliem Pilamo Hotel, dengan tujuan menetapkan Ketua KONI Provinsi Papua Pegunungan secara sah serta merumuskan arah dan strategi pembangunan olahraga agar mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum KONI Pusat, perwakilan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Ketua Caretaker KONI Provinsi Papua Pegunungan, Anggota BP3OKP, pengurus cabang olahraga se-Provinsi Papua Pegunungan, serta para pegiat olahraga. Melalui sidang pleno yang berlangsung tertib dan demokratis, Musorprovlub menetapkan dan mengesahkan Bapak DR. (HC) John Tabo, SE., MBA sebagai Ketua KONI Provinsi Papua Pegunungan, yang kemudian diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum KONI Pusat. Kegiatan ini menegaskan komitmen sinergi antara KONI, BP3OKP, dan pemerintah daerah melalui koordinasi pembiayaan, penyediaan fasilitas olahraga, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan guna mendukung pengembangan prestasi olahraga di Papua Pegunungan.



Kunjungan Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan ke Dinas Dukcapil Provinsi Papua Pegunungan



Kunjungan Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan ke Dinas Dukcapil Provinsi Papua Pegunungan dilaksanakan pada Rabu, 24 September 2025, bertempat di Kantor Dinas Dukcapil Provinsi Papua Pegunungan, dengan tujuan memperoleh data Orang Asli Papua (OAP) di delapan kabupaten sebagai dasar penyusunan laporan kepada Menteri Transmigrasi RI dan bahan pembahasan program bantuan perumahan rakyat. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota BP3OKP serta jajaran pejabat Dinas Dukcapil Provinsi Papua Pegunungan, dan dilaksanakan dalam kerangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi. Hasil kunjungan menunjukkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Papua Pegunungan tercatat sebanyak 822.158 jiwa dengan data OAP sebanyak 91.249 jiwa yang bersumber resmi dari delapan kabupaten, yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertemuan dengan Menteri dan Dirjen Transmigrasi RI. Kegiatan ini menegaskan pentingnya koordinasi lanjutan dan pemutakhiran data lintas sektor guna mendukung percepatan program pembangunan, khususnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat bagi Orang Asli Papua di Papua Pegunungan.



Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Melalui Tata Kelola Otonomi Khusus Papua

Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi melalui Tata Kelola Otonomi Khusus Papua yang dilaksanakan pada 4–5 Agustus 2025 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, menjadi momentum strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta delapan kabupaten di wilayahnya. Kegiatan ini meliputi sosialisasi pencegahan korupsi, penyusunan langkah strategis peningkatan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan perbaikan Survei Penilaian Integritas (SPI), serta penguatan kerja sama antara KPK, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas. Dalam sambutan yang dibacakan Sekda, Gubernur menyoroti rendahnya IPKD 1,67% triwulan II 2025 dan hasil SPI sebelumnya, serta menekankan langkah konkret berupa tindak lanjut SPI 2024, pelengkapan data SPI 2025, dan peningkatan indikator MCP melalui kolaborasi lintas OPD. Ketua Satgas Korsup Wilayah V KPK menegaskan pentingnya pengawasan anggaran pusat dan kepatuhan pelaporan aset daerah, sementara BP3OKP menekankan reformasi birokrasi untuk pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pertemuan ini menegaskan pencegahan korupsi sebagai prioritas, dengan komitmen penguatan kerja sama lintas lembaga demi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.



Festival Budaya Lembah Baliem Tahun 2025

Festival Budaya Lembah Baliem 2025 yang berlangsung pada 7–9 Agustus di Usilimo, Kabupaten Jayawijaya, menjadi agenda tahunan strategis Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya untuk melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal di bidang ekonomi, seni, budaya, dan pariwisata. Kegiatan ini menghadirkan Penjabat Gubernur, Bupati Jayawijaya, utusan Kementerian Kebudayaan RI, OPD terkait, pelaku UMKM dan Ekraf, serta wisatawan lokal dan internasional. Festival ini tidak hanya mempromosikan budaya asli Lembah Baliem, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, menekan inflasi daerah, dan memperluas pemasaran produk lokal melalui digitalisasi. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta kolaborasi lintas sektor menegaskan bahwa festival ini menjadi momentum penting untuk memperkuat identitas budaya sekaligus memberdayakan ekonomi kreatif dan pariwisata di Papua Pegunungan.



Pembukaan Tempat Wisata Alam dan Tempat Belajar Huruf Soekarno di Maima – Wamena



Peresmian Tempat Wisata Alam dan Tempat Belajar Huruf Soekarno di Maima, Wamena, pada 13 Agustus 2025, menandai inovasi kolaboratif antara sektor pariwisata dan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Dinas Parekraf Provinsi Papua Pegunijang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayawijaya, anggota DPRD, serta tokoh dan masyarakat setempat, dengan tujuan memanfaatkan potensi wisata alam Maima sekaligus memperkenalkan Huruf Soekarno sebagai sarana belajar berbasis lokal. Kolaborasi ini menjadikan lokasi ganda sebagai destinasi wisata edukasi, mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan sektor kreatif, serta menegaskan harmonisasi antara pemerintah, guru, dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Aktivitas ini memperlihatkan bahwa pendidikan, budaya, dan pariwisata dapat bersinergi untuk manfaat sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan.



Audiensi BP3OKP Pokja Papua Sehat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Pegunungan



Audiensi BP3OKP Pokja Papua Sehat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Pegunungan pada 20 Agustus 2025 menyoroti dukungan terhadap enam mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih (UNCEN) asal Papua Pegunungan yang terkendala biaya koas akibat penghentian beasiswa dari Provinsi Induk Papua. Pertemuan ini dihadiri Gaad Piranid Tabuni, SP., M.M. dari BP3OKP, Kepala Dinas Pendidikan, dan staf pendukung, dengan tujuan membangun koordinasi lintas sektor untuk memastikan mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan hingga wisuda serta memperkuat kesiapan tenaga kesehatan profesional di wilayah dengan masalah kesehatan ekstrem. Kepala Dinas Pendidikan menyambut positif inisiatif BP3OKP, menyatakan komitmen mendukung solusi melalui Dinas Kesehatan Provinsi, dan membawa persoalan ini ke forum Musrenbang Provinsi untuk perencanaan pembangunan. Pertemuan menghasilkan kesepakatan bahwa pembiayaan koas enam mahasiswa akan diprioritaskan dan ditangani oleh Dinas Kesehatan, sebagai langkah nyata meningkatkan kapasitas tenaga medis di Papua Pegunungan.



Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI bersama Anggota BP3OKP di Jayapura

Kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Bapak Gibran Rakabuming Raka, bersama anggota BP3OKP pada 17 September 2025 di Gedung Keuangan Negara, Jayapura, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Kegiatan ini mencakup peninjauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 2 Sentani yang mendapat sambutan positif dari siswa, guru, dan orang tua, serta dialog koordinatif antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan BP3OKP untuk memastikan program Otsus berjalan terukur dan berkelanjutan. Wakil Presiden menekankan transparansi penggunaan dana Otsus, fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua, serta pentingnya stabilitas keamanan dan kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini memperkuat sinergi pusat-daerah dan menghasilkan tindak lanjut berupa pembentukan tim koordinasi lapangan, perluasan program MBG ke seluruh sekolah di Papua dan Papua Pegunungan, penguatan sistem monitoring Otsus, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan tahap berikutnya melalui koordinasi BP3OKP dan Sekretariat Wakil Presiden RI.



Kunjungan Pokja Papua Pegunungan Polhukam ke SMA YPPK Santo Tomas Wamena



Kunjungan Pokja Papua Pegunungan Polhukam ke SMA YPPK Santo Tomas Wamena pada 25 September 2025 bertujuan menerapkan pencegahan anti-rasisme, anti-bullying, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas di kalangan pelajar. Kegiatan dihadiri siswa, guru, Pokja Polhukam, dan Kasat Narkoba Polres Jayawijaya, dengan fokus pada identifikasi tantangan yang dihadapi pelajar serta edukasi dan advokasi perilaku positif. Dalam kesempatan ini, pelajar diajak lebih mawas diri terhadap kasus rasisme, bullying, narkoba, dan pergaulan bebas, serta diberikan dukungan melalui fasilitasi dari pemerintah pusat. Pokja Polhukam mengapresiasi kinerja SMA dan Polres Jayawijaya, menegaskan komitmen menyalurkan aspirasi ke pusat, dan menekankan pentingnya komunikasi serta kerja sama berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pengembangan karakter pelajar.



Pertemuan Bersama Komisi X DPR RI

Pertemuan Komisi X DPR RI dengan pemangku kepentingan Papua Pegunungan pada 6 Oktober 2025 di Hotel Baliem Pilamo menjadi wadah strategis untuk menyampaikan isu dan data faktual terkait pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, perpustakaan, riset, inovasi, dan statistik di wilayah tersebut. Kegiatan yang dihadiri Komisi X DPR RI, kementerian/lembaga, BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Pokja Papua Sehat dan Papua Produktif, pemerintah provinsi, delapan bupati, Forkopimda, serta instansi pendidikan ini menekankan tantangan utama berupa kekurangan tenaga pendidik, keterbatasan sarana-prasarana, dan perlunya kebijakan yang sesuai karakteristik daerah 3T. Pertemuan menghasilkan rekomendasi bagi kementerian/lembaga terkait, penguatan koordinasi antara BP3OKP, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan, serta penyiapan data lebih komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional yang tepat sasaran untuk pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset, pemuda, dan olahraga di Papua Pegunungan.



Pertemuan Anggota BP3OKP dengan Menteri Dalam Negeri RI dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.



Pertemuan anggota BP3OKP dengan Menteri Dalam Negeri RI dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada 13 Oktober 2025 di Jakarta menandai pertemuan perdana untuk membahas strategi kelembagaan dalam mempercepat pembangunan Otonomi Khusus Papua selama empat tahun ke depan. Kegiatan ini dihadiri Mendagri, Wamendagri, 10 anggota Komite Eksekutif, dan 6 anggota BP3OKP, dengan fokus pada penguatan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam pelaksanaan Otsus. Pertemuan menekankan pentingnya koordinasi erat antara BP3OKP, Komite Eksekutif, dan pemerintah pusat, penyusunan langkah strategis percepatan pembangunan di seluruh provinsi Tanah Papua, serta pelaksanaan SHEK secara berkesinambungan untuk mendukung kebijakan dan program strategis Otsus Papua.



Pertemuan Anggota BP3OKP dengan Menteri Transmigrasi RI dan Dirjen Transmigrasi RI terkait Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lokal di Tanah Papua

Pertemuan anggota BP3OKP dengan Menteri dan Dirjen Transmigrasi RI pada 3 Oktober 2025 membahas pengembangan kawasan transmigrasi lokal di Tanah Papua sebagai upaya meningkatkan ekonomi lokal secara terpadu. Kegiatan yang dihadiri perwakilan BP3OKP dari Papua Pegunijang, Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat, serta dua bupati dari Papua Barat, menekankan bahwa pembukaan lahan transmigrasi harus diikuti dengan pengembangan produktivitas barang dan jasa. Hantor Matuan memaparkan potensi dan rencana program di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya, termasuk pembangunan pabrik pakan ternak, sejalan dengan arahan Presiden RI. Pertemuan menghasilkan kesepakatan untuk mengembangkan ekonomi lokal berbasis transmigrasi terpadu di enam provinsi Papua, dengan tindak lanjut berupa pertemuan lanjutan di Manokwari akhir Oktober 2025, penyusunan konsep implementasi pabrik pakan ternak, rekomendasi teknis dan kebijakan, serta koordinasi berkelanjutan antara BP3OKP, pemerintah daerah, dan kementerian terkait untuk memastikan program tepat sasaran.



Koordinasi dan Tindak Lanjut Rencana Pembangunan Pabrik Pakan Ternak di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan

Koordinasi dan tindak lanjut rencana pembangunan Pabrik Pakan Ternak di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, dilaksanakan pada 9 Oktober 2025 di Dinas Perindakop Provinsi Papua Pegunungan untuk menindaklanjuti pembahasan bersama Direktur Regional III BAPPENAS RI. Kegiatan ini melibatkan anggota BP3OKP, Kepala Dinas Perindakop, BAPPERIDA, serta perwakilan Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Pertanahan, dengan fokus pada fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Pertemuan menekankan persiapan lahan dan kelengkapan sertifikat pelepasan tanah adat, konsultasi dengan Gubernur, serta penguatan koordinasi lintas OPD untuk menyamakan komitmen. Program pabrik pakan ternak diharapkan memberikan manfaat strategis berupa pengurangan inflasi, penanganan stunting, dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan peternak di delapan kabupaten. Tindak lanjut meliputi penyelesaian dokumen pendukung dan penguatan komunikasi antar OPD untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pembangunan pabrik.



Anggota BP3OKP memfasilitasi pertemuan antara Direktur Regional III Bappenas dan Kepala dinas perindagkop Provinsi Papua Pegunungan

Anggota BP3OKP memfasilitasi pertemuan antara Direktur Regional III Bappenas dan Kepala dinas perindagkop Provinsi Papua Pegunungan Audiensi dan koordinasi rencana pembangunan Pabrik Pakan Ternak di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya bersama Direktur Regional III BAPPENAS RI dilaksanakan pada 2 Oktober 2025 di Jakarta. Pertemuan ini melibatkan anggota BP3OKP Papua Pegunungan, Kepala Dinas Perindakop Provinsi Papua Pegunungan, dan tim teknis terkait, dengan tujuan menindaklanjuti kajian pembangunan pabrik serta menyampaikan aspirasi dan proposal kepada pemerintah pusat. Kepala Dinas Perindakop memaparkan kendala pasokan pakan ternak, tingginya biaya transportasi, dan harga daging unggas serta telur, sekaligus menjelaskan manfaat strategis pembangunan pabrik bagi delapan kabupaten, seperti menurunkan biaya pakan ternak, mengurangi inflasi, mendukung penanganan stunting, dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah Pusat melalui BAPPENAS menyatakan dukungan, meminta revisi proposal, dan pembahasan bersama pemerintah provinsi serta OPD terkait. Tindak lanjut meliputi revisi proposal, koordinasi lintas OPD, penyusunan pertemuan teknis lanjutan, dan komunikasi intensif antara BP3OKP, Dinas Perindakop, dan BAPPENAS untuk mempercepat implementasi pembangunan pabrik pakan ternak.



Rapat Koordinasi Program *Quick Win* di Provinsi Papua Pegunungan

Rapat Koordinasi Program *Quick Win* di Provinsi Papua Pegunungan dilaksanakan pada Senin, 20 Oktober 2025, di Hotel Baliem Pilamo, Wamena. Kegiatan ini bertujuan mengkoordinasikan pelaksanaan program *Quick Win* sebagai prioritas nasional, memperkuat dukungan pemerintah daerah, dan mengidentifikasi tantangan terkait kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan.

Dalam arahan, Wamendagri Ibu Ribka Haluk menekankan pentingnya fokus pemerintah daerah dalam menjalankan program *Quick Win* sesuai arahan Presiden RI. Program ini akan diawasi ketat oleh Kemendagri untuk memastikan pelaksanaan optimal. Tantangan utama yang disoroti adalah swasembada pangan, yang memerlukan kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah daerah didorong aktif meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Hasil dan tindak lanjut rapat meliputi:

Pemerintah provinsi dan kabupaten menindaklanjuti arahan Wamendagri untuk percepatan program *Quick Win*, khususnya di bidang ketahanan pangan.

Penguatan koordinasi lintas OPD dan lintas sektor untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pelaporan perkembangan pelaksanaan program kepada Pemerintah Pusat melalui Kemendagri.

Penyerahan Piagam Penghargaan kepada Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, terkait peringkat penyerapan anggaran di provinsi.



Kunjungan Kerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan ke Kabupaten Nduga

Kunjungan Kerja dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua di Kabupaten Nduga dilaksanakan pada 27–31 Oktober 2025, bertempat di Kabupaten Lanny Jaya. Kegiatan ini bertujuan memperkuat fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam pelaksanaan empat misi utama Papua: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Polhukam. Selain itu, kegiatan juga mensosialisasikan tugas dan fungsi BP3OKP kepada pemerintah daerah serta mengidentifikasi kondisi faktual dan tantangan di bidang kesehatan, pendidikan, produktivitas, dan keamanan.

Dalam sosialisasi, Anggota BP3OKP Hantor Matuan memaparkan tugas dan fungsi lembaga serta mengenalkan masing-masing Pokja sesuai bidang misi. Gaad, selaku Pokja Papua Sehat, menekankan pentingnya sektor kesehatan sebagai fondasi masyarakat yang cerdas, produktif, dan aman.

Plt. Bupati Nduga menyampaikan kondisi terkini: 15 distrik mengungsi ke wilayah lain akibat situasi keamanan tidak kondusif, aktivitas pemerintahan terhenti, sekolah dan fasilitas kesehatan tidak beroperasi, sehingga produktivitas masyarakat dan pembangunan daerah terganggu.

Tindak lanjut kegiatan meliputi:

Penyusunan laporan rekomendasi teknis untuk BP3OKP Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Perencanaan kunjungan lanjutan ke instansi terkait untuk menindaklanjuti temuan lapangan dan mengawal implementasi program.

Mendorong dukungan keamanan terpadu agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.



kunjungan Kolaborasi dan Sinkronisasi para mitra kantor BWS (balai wilayah sungai), Pengurus P3A Pembuatan Irigasi sawah.



Kegiatan kunjungan kolaborasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan pada 8–18 Oktober 2025 di Distrik Witawaya, Libarek, Pisugi, dan Piramyd berhasil memberdayakan kelompok tani melalui pembangunan irigasi dan pencetakan lahan sawah seluas 2.000 hektar. Kegiatan ini melibatkan Pokja Papua Produktif BP3OKP, Dinas Pertanian, perwakilan BWS, kelompok tani, serta anggota P3A dan masyarakat setempat, dengan fokus pada koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pendapatan masyarakat, dan keberlanjutan program. Hasil kunjungan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta monitoring berkelanjutan agar manfaat program tepat sasaran, sekaligus membuka peluang replikasi kegiatan di kabupaten lain.



Rapat Kerja Provinsi Papua Pegunungan terkait Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Rapat Kerja Provinsi Papua Pegunungan pada 15–16 Oktober 2025 di Fox Hotel Jayapura berhasil memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten, BP3OKP, dan OPD terkait dalam implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, khususnya di bidang pendidikan. Dipimpin oleh Paul Wetipo (Pokja Papua Cerdas BP3OKP), rapat menekankan pemanfaatan ruang kebijakan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP), pengawasan penggunaan Dana Otsus agar tepat sasaran, serta komitmen sinergi lintas pemerintah provinsi, kabupaten, dan OPD. Kegiatan ini mempertegas peran BP3OKP dalam mengawal implementasi Otsus dan memastikan program pendidikan berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat Papua Pegunungan.



Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Kebinekaan: Sinergi Perlindungan Bahasa dan Sastra



Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Kebinekaan pada 9–11 Oktober 2025 di Hotel Suni Sentani, Jayapura, berhasil memperkuat sinergi antar-lembaga dalam perlindungan, pelestarian, dan pengembangan bahasa serta sastra daerah di Tanah Papua. Forum yang melibatkan BP3OKP, Balai Bahasa Provinsi Papua, pemerintah daerah, akademisi, dan narasumber Kemendikbudristek menekankan ancaman serius terhadap keberlanjutan bahasa daerah akibat berkurangnya penutur aktif di generasi muda, sehingga diperlukan strategi berbasis komunitas dan sekolah. Hasilnya mencakup penyusunan rencana kerja bersama (joint action plan) untuk 2026, meliputi revitalisasi bahasa di lembaga pendidikan, dokumentasi karya sastra rakyat, dan pelatihan guru serta fasilitator bahasa daerah, serta terjalannya komitmen menjaga bahasa dan sastra lokal sebagai bagian dari implementasi Otonomi Khusus di bidang kebudayaan.



Audiensi Pokja Papua Sehat BP3OKP dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan



Audiensi Pokja Papua Sehat BP3OKP dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan pada 2 Oktober 2025 memperkuat sinergi dalam penanganan isu kesehatan di wilayah tersebut, termasuk stunting, kekurangan gizi, HIV/STI, rendahnya usia harapan hidup, dan keterbatasan tenaga kesehatan di rumah sakit serta puskesmas. Pertemuan yang dipimpin oleh Gaad Piranid Tabuni, SP, M.M, membahas tugas dan fungsi Pokja Papua Sehat serta pentingnya sinkronisasi data kesehatan untuk mendukung perencanaan program, termasuk pemanfaatan 20% Dana Otsus bidang kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP). Kepala Dinas Kesehatan menyambut baik audiensi ini sebagai awal kemitraan strategis, dan tindak lanjut mencakup koordinasi program kesehatan, advokasi pengelolaan tenaga medis, penguatan sekolah kedokteran/perawat, serta pendampingan isu pelepasan hak ulayat untuk pembangunan RS Provinsi.



Galaxy A16
02 Oktober 2025 11.52

Pertemuan Pembahasan Akhir – Finalisasi Proposal dan Kajian Rencana Pembangunan Rumah Produksi Pakan Ternak di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.



Pertemuan finalisasi proposal dan kajian rencana pembangunan Rumah Produksi Pakan Ternak di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, yang dilaksanakan pada 14 Oktober 2025 di Kantor Perindagkop Provinsi Papua Pegunungan, menegaskan peran strategis BP3OKP dalam melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi lokal. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Perindakop, OPD terkait, Pokja Papua Sehat, Kepala Biro Perekonomian, dan tim teknis pembangunan pabrik, dengan fokus pada finalisasi proposal, harmonisasi program, kesiapan teknis, dan penyelesaian administrasi pelepasan tanah adat. Pertemuan menekankan urgensi pembangunan pabrik pakan ternak sebagai solusi strategis untuk menurunkan biaya pakan ternak, meningkatkan produktivitas peternakan babi dan ayam, mengurangi inflasi, serta mengatasi kemiskinan ekstrem di wilayah. Selain itu, disepakati tindak lanjut berupa penetapan lokasi pembangunan, penganggaran tambahan, koordinasi lintas OPD, serta pembukaan lahan dan penanaman bahan baku pakan sebagai langkah awal penyediaan produksi, dengan tujuan memastikan implementasi program berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pada tahun 2026.



Koordinasi Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga



Koordinasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga yang dilaksanakan pada 28 Oktober 2025 di Hotel Valley menyoroti kondisi aktual sektor kesehatan di wilayah yang menghadapi tantangan berat, termasuk keterbatasan tenaga medis, fasilitas kesehatan yang belum memadai, tingginya angka stunting dan gizi buruk, serta terganggunya akses layanan kesehatan akibat pengungsian di sekitar 15 distrik. Pertemuan yang dipimpin Hantor Matuan (BP3OKP) dan Gaad (Pokja Papua Sehat) bersama Kepala Dinas Kesehatan Nduga dan staf teknis membahas perlunya peningkatan kualitas layanan dasar kesehatan, pemerataan tenaga medis, pelatihan kader kesehatan, serta kolaborasi lintas sektor untuk penanggulangan krisis kesehatan di daerah konflik. Ditekankan pentingnya penyusunan proposal kebutuhan tenaga medis, alat kesehatan, dan pembangunan puskesmas, serta pembentukan tim koordinasi bersama antara Pokja Papua Sehat dan Dinas Kesehatan untuk memantau pelaksanaan program prioritas kesehatan. Hasil koordinasi ini akan diintegrasikan dalam laporan evaluasi Misi Papua Sehat sebagai dasar tindak lanjut lintas lembaga dan perencanaan program pembangunan kesehatan yang lebih efektif.



Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua (OAP) di Lima Wilayah Adat Provinsi Papua Pegunungan

Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua (OAP) di lima wilayah adat Provinsi Papua Pegunungan yang dilaksanakan pada 14 November 2025 di Aula Hotel Baliem Pilamo, Wamena, bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai urgensi pendataan OAP sebagai dasar kebijakan dan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus. Kegiatan ini melibatkan BP3OKP, Pokja Papua Sehat dan Produktif, Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten, BPS, tokoh adat, tokoh agama, LMA, akademisi, dan masyarakat, serta menekankan pentingnya sinergi antar-pihak untuk memastikan pendataan dilakukan valid dan terstruktur. Penyampaian materi menegaskan bahwa data OAP yang akurat akan memengaruhi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan Dana Otsus Papua. Pemerintah Provinsi melalui Asisten I menegaskan komitmen memperbaiki tata kelola data, sementara peserta menyepakati dukungan aktif dalam proses pendataan. Kegiatan ditutup dengan peluncuran simbolis E-KTP sebagai bentuk dukungan peningkatan administrasi kependudukan. Hasil sosialisasi akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan MRP, DPRP, Dinas Dukcapil, tokoh adat, dan LMA, serta usulan pembentukan Pansus Perdatus Pendataan OAP sebagai landasan hukum implementasi pendataan di seluruh provinsi.



Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Bersama Wakil Presiden Republik Indonesia



Rapat Pleno Nasional BP3OKP yang berlangsung pada 3–5 November 2025 di Manokwari, dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI, membahas percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui fungsi SHEK BP3OKP. Pertemuan ini menekankan arahan strategis Wapres terkait akselerasi pembangunan dua kali lipat lebih cepat, penguatan inovasi kebijakan berbasis data, dan memastikan manfaat nyata program Otsus dirasakan masyarakat. Evaluasi pembangunan difokuskan pada empat pilar utama: Papua Sehat (fasilitas kesehatan, stunting, umur harapan hidup), Papua Cerdas (lama sekolah dan partisipasi SMP–SMA), Papua Produktif (kemiskinan, pengangguran, inflasi), dan Papua Damai/Polhukam (keamanan dan stabilitas). Rapat menegaskan sinergi antara BP3OKP dan Komite Eksekutif, pentingnya fokus anggaran berbasis skala prioritas, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Hasil rapat menjadi dasar penyusunan skala prioritas pembangunan 2026 dan tindak lanjut program Otsus berbasis data indikator kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keamanan di seluruh Tanah Papua.

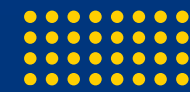


Rapat Kerja Mengenai Langkah Strategis Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Logistik Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Papua Pegunungan

Rapat kerja pada 10 November 2025 di Gedung Aula Yudha, Wamena, membahas langkah strategis pembangunan infrastruktur dasar dan logistik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Pegunungan. Kegiatan ini melibatkan pemerintah provinsi, OPD, BUMN/BUMD, asosiasi pedagang, dan pelaku usaha, dengan tujuan memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Arahkan rapat menekankan pembangunan ekonomi terpadu yang mendukung berbagai sektor, dengan pengawasan berkala setiap tiga bulan untuk memastikan efektivitas program. Pokja Papua Produktif BP3OKP berperan dalam mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha, memaksimalkan nilai ekonomi, dan memastikan koordinasi berkelanjutan antara instansi terkait untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.



Kegiatan Lanjutan Kick Off Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Papua Pegunungan



Kegiatan lanjutan Kick Off Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Papua Pegunungan pada 26 November 2025 di Gedung Aula AITHOSA, Wamena, fokus pada penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mendukung RPJMD 2025–2029. Kegiatan ini melibatkan pemerintah provinsi, OPD terkait, tokoh adat, tokoh agama, pimpinan LSM, kepala kampung, dan pimpinan distrik, dengan tujuan memastikan isu lingkungan strategis tertuang secara tepat, aman, dan berdampak positif bagi masyarakat. Pokja Papua Produktif BP3OKP memfasilitasi kolaborasi antar peserta, memberikan masukan dan arahan teknis, serta mendorong sinkronisasi program dengan pemerintah provinsi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan jangka panjang sesuai visi-misi daerah, dengan monitoring berkelanjutan dan koordinasi lintas sektor.



Forum Group Discussion (FGD) Kurikulum Noken Berbasis Komunitas Pendidikan

Forum Group Discussion (FGD) Kurikulum Noken Berbasis Komunitas Pendidikan yang dilaksanakan pada 20–22 November 2025 di Hotel Horison Sentani, Kabupaten Jayapura, bertujuan merumuskan langkah strategis pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal Papua, khususnya noken sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO, ke dalam pembelajaran formal dan kontekstual di sekolah. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan (Pokja Papua Cerdas), anggota BP3OKP se-Tanah Papua, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, guru, kepala sekolah, mitra pendidikan, serta komunitas pengrajin noken dan masyarakat adat. FGD menekankan bahwa noken bukan sekadar kerajinan, tetapi simbol identitas, filosofi hidup, dan sarana penyelesaian masalah dalam masyarakat Papua, sehingga penting untuk dijadikan fondasi kurikulum berbasis komunitas. Kegiatan ini menghasilkan deklarasi Noken Papua sebagai komitmen bersama untuk melestarikan dan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pendidikan, identifikasi mata pelajaran yang relevan (IPAS, Seni Budaya, dan Muatan Lokal), serta rencana konservasi pembibitan bahan baku noken. Langkah tindak lanjut mencakup penyusunan draft kurikulum oleh tim teknis BGTK dan Pokja, koordinasi lanjutan dengan BP3OKP dan Dinas Pendidikan, workshop uji konsep kurikulum, sosialisasi ke sekolah, pengembangan program konservasi noken bekerja sama dengan komunitas adat, serta monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum berbasis budaya lokal secara berkelanjutan, untuk memastikan pelestarian noken sejalan dengan penguatan identitas dan karakter pendidikan Papua.



Sosialisasi Kesehatan Lingkungan Keluarga, Penimbangan dan Pengukuran Bayi–Balita Program PPA, Pengobatan Massal, dan Pemberian Makanan Bergizi

Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Lingkungan Keluarga, Penimbangan dan Pengukuran Bayi–Balita Program PPA, Pengobatan Massal, dan Pemberian Makanan Bergizi dilaksanakan pada 15 November 2025 di Posyandu Kampung Algonik, Distrik Pyramid, bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan keluarga dan gizi anak. Kegiatan ini melibatkan Gaad Piranid Tabuni (Pokja Papua Sehat BP3OKP), tenaga medis, tokoh agama, kepala desa, serta masyarakat setempat. Materi sosialisasi mencakup pemberian ASI, makanan tambahan bayi, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta kesehatan lingkungan keluarga. Selain itu, dilaksanakan pemeriksaan kesehatan umum bagi 20 pasien, pengobatan luka, pemeriksaan tekanan darah, dan pemberian obat gratis, dibantu tenaga posyandu. Penimbangan dan pengukuran berat badan/tinggi badan dilakukan pada 8 bayi–balita, sementara 7 lainnya belum hadir. Program gizi meliputi pemberian susu dan bubur kacang hijau bagi bayi-balita, serta makan siang bergizi bagi seluruh 40 peserta. Kepala Kampung memberikan dukungan dana Rp 10.000.000 untuk penguatan kegiatan posyandu. Tindak lanjut mencakup pembinaan gizi keluarga, sosialisasi PHBS berkelanjutan, pengadaan obat tambahan, pemantauan bayi-balita yang tidak hadir, serta pelaksanaan sosialisasi lanjutan pada bulan Desember, dengan integrasi dukungan pemerintah kampung untuk memperkuat sarana posyandu dan kegiatan gizi.



Pelaksanaan,"Koordinasi pokja Papua Sehat dengan Kepala Kantor BPS Kabupaten Jayawijaya

Koordinasi Pokja Papua Sehat BP3OKP dengan Kepala Kantor BPS Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan pada 25 November 2025 di ruang kerja Kepala BPS Jayawijaya, bertujuan memastikan standar dan prosedur pendataan terpadu di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pendataan Orang Asli Papua (OAP) 2025. Pertemuan ini membahas sinkronisasi data pembangunan berbasis indikator IPM, Usia Harapan Hidup (UHH), dan pendidikan, yang menjadi tolok ukur pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan dan delapan kabupaten. Kepala BPS menjelaskan proses pendataan komplementer 3 aspek pembangunan—pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan—serta siklus pendataan penduduk, pertanian, dan ekonomi, menekankan bahwa pembangunan tidak dapat berhasil jika salah satu aspek tidak tercapai. Data IPM Provinsi Papua Pegunungan tercatat 54,91 pada 2024, dengan pertumbuhan 1,36% dibandingkan standar nasional 75,90, dan angka IPM kabupaten Jayawijaya 69,00. Pertemuan juga menegaskan pentingnya koordinasi lanjutan pada 2026 bersama empat Pokja BPP, pendampingan regulasi pendataan OAP melalui MRP, DPRP, dan Gubernur, serta sosialisasi kepada pemerintah daerah agar seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan berbasis data BPS menjadi mutlak dan terintegrasi dalam percepatan



Koordinasi Pokja Papua Sehat dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya mengenai implementasi Program MBG dan Penanganan Penyakit HIV AIDS

.....

Koordinasi Pokja Papua Sehat BP3OKP dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan pada Kamis, 27 November 2025, dengan fokus pada percepatan Program Makanan Bergizi (MBG) di Wamena, penanganan HIV/AIDS, dan percepatan regulasi pendataan Orang Asli Papua (OAP).

Hasil koordinasi meliputi:

Dapur SPPG: Dilaksanakan di Wamena dengan keterlibatan Orang Asli Papua, didukung koordinasi provinsi–kabupaten secara berkala.

Penanganan HIV/AIDS: Persiapan pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS, rencana kerja, tim lapangan, dan pembiayaan, dengan rapat koordinasi awal 2026.

Regulasi Pendataan OAP: Lanjutan koordinasi dengan MRP, DPRP, dan Gubernur untuk Perdasus/Perdasi pendataan OAP sebagai dasar program berbasis Otsus.

Koordinasi Lintas Sektor: Kegiatan melibatkan seluruh pihak terkait dengan tindak lanjut berkala.

Pertemuan menekankan keterlibatan aktif OAP dalam MBG serta koordinasi strategis untuk penanganan HIV/AIDS dan pendataan OAP demi peningkatan kesehatan masyarakat dan tata kelola program berbasis data.



Keikutsertaan BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Pra-Kongres Bahasa Daerah dan Noken Papua Tahun 2026

.....

Keikutsertaan BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Pra-Kongres Bahasa Daerah dan Noken Papua Tahun 2026 dilaksanakan pada 4 Desember 2025 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP dalam sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi, dan evaluasi kebijakan Otonomi Khusus Papua, sekaligus menghimpun masukan strategis terkait perlindungan dan pelestarian bahasa daerah serta Noken Papua menjelang Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026.

Kegiatan yang melibatkan kementerian terkait, perwakilan BP3OKP dari enam provinsi, pokja BP3OKP, serta pemangku kepentingan pusat dan daerah ini berjalan dengan baik dan menghasilkan rekomendasi penting mengenai perlunya peran aktif negara dan pemerintah daerah dalam melindungi bahasa daerah dari dampak globalisasi serta melestarikan Noken Papua sebagai warisan budaya. Rekomendasi utama yang dihasilkan adalah integrasi pelestarian bahasa daerah dan Noken Papua ke dalam kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan sebagai langkah konkret menjaga keberlanjutan budaya Papua.

Sebagai tindak lanjut, BP3OKP mendorong penguatan kebijakan pendidikan dan kebudayaan berbasis Otonomi Khusus, peningkatan peran pemerintah daerah, serta penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mengawal implementasi hasil Pra-Kongres menuju pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026.



BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan ikut serta dalam Acara Peluncuran RAPPP Tahun 2025–2029

.....

Keikutsertaan BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan dalam Acara Peluncuran RAPPP Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan pada 16 Desember 2025 di Jakarta bertujuan mendukung pelaksanaan tugas BP3OKP dalam sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi, dan evaluasi percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Kegiatan ini menjadi momentum penting tahap kedua implementasi RPPPP 2022–2041, di mana RAPPP 2025–2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 memuat 19 program prioritas untuk mewujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif serta telah diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029. Melalui kegiatan ini, BP3OKP mendorong keselarasan perencanaan pembangunan daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengawalan implementasi RAPPP agar berdampak nyata bagi kesejahteraan Orang Asli Papua.



Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi dilaksanakan pada 3 Desember 2025 di Hotel Nora, Wamena, sebagai upaya mendukung pelaksanaan tugas BP3OKP dalam sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Kegiatan ini bertujuan mengoordinasikan penyelenggaraan PUG agar menjadi bagian dari kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta mendukung penyusunan laporan dan pelaksanaan program pembangunan yang selaras dengan RPPPP dan RAPP. Hasil kegiatan menegaskan bahwa pelebagaan PUG menjadi pondasi penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lintas sektor melalui kolaborasi antar-OPD, yang selanjutnya akan terus dimonitor dan dikoordinasikan secara berkala untuk memastikan efektivitas implementasinya.



Kegiatan Koordinasi dan Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dan Ekonomi Kreatif dalam rangka memeriahkan HUT Kota Wamena ke-69 Tahun

.....

Kegiatan Koordinasi dan Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dan Ekonomi Kreatif dalam rangka memeriahkan HUT Kota Wamena ke-69 Tahun 2025 dilaksanakan pada 8–10 Desember 2025 di Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas BP3OKP dalam sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi, dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah. Kegiatan ini bertujuan mendorong partisipasi aktif pelaku UMKM/Ekraf dalam promosi produk unggulan, mendukung suksesnya perayaan HUT Kota Wamena sebagai ajang ekonomi tahunan daerah, serta berkontribusi pada pengendalian inflasi dan stabilisasi harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Hasil kegiatan menegaskan peran HUT Kota Wamena sebagai event perekonomian dan pesta rakyat yang mendorong lahirnya pelaku usaha baru, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat, serta akan terus didorong dan dimonitor secara berkala melalui koordinasi berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.



Kegiatan Pertemuan dan Audiensi dengan Satuan Petugas Pemenuhan Gizi (SPPG)

Kegiatan Pertemuan dan Audiensi dengan Satuan Petugas Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka persiapan penambahan pembangunan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di delapan kabupaten Provinsi Papua Pegunungan dilaksanakan pada 15 Desember 2025 di Wamena. Kegiatan ini bertujuan mendukung percepatan dan perluasan pelaksanaan program MBG melalui penentuan lokasi dapur, penguatan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan instansi terkait, serta membuka peluang kolaborasi dengan pelaku usaha, kelompok tani, dan masyarakat. Hasil kegiatan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program MBG sebagai bagian dari agenda nasional, sekaligus mendorong dampak positif bagi peningkatan gizi, kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat, yang selanjutnya akan terus dikawal dan dimonitor secara berkala oleh pemerintah provinsi bersama pihak terkait.



Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pertemuan Lanjutan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (EKRAF) Kabupaten Nduga

.....

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pertemuan Lanjutan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (EKRAF) Kabupaten Nduga dilaksanakan pada 29 Desember 2025 di Wamena sebagai upaya membuka ruang diskusi dan peluang usaha mandiri bagi pelaku usaha muda Orang Asli Papua (OAP). Kegiatan ini bertujuan mendorong pengembangan sektor EKRAF sebagai pengungkit peningkatan ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nduga. Hasil pertemuan menjadi pondasi awal penguatan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, serta menghasilkan komitmen untuk melakukan koordinasi dan monitoring berkala guna memastikan program EKRAF dapat tumbuh berkelanjutan dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah



Partisipasi Anggota Pokja Papua Cerdas BPP dalam Acara Pelantikan Pimpinan KONI Provinsi Papua Pegunungan

.....

Partisipasi Anggota Pokja Papua Cerdas BPP dalam Acara Pelantikan Pimpinan KONI Provinsi Papua Pegunungan yang dilaksanakan pada 8 Desember 2025 di Jakarta merupakan bagian dari dukungan terhadap penguatan tata kelola dan pembinaan olahraga di Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini menandai dimulainya kepengurusan KONI Papua Pegunungan berdasarkan SK KONI Pusat Nomor 169 Tahun 2025 dengan Gubernur Papua Pegunungan sebagai Ketua Umum, serta menegaskan komitmen pembinaan atlet secara berkelanjutan. Kehadiran Pokja Papua Cerdas berkontribusi dalam fungsi sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi, dan evaluasi pembangunan Otonomi Khusus Papua, khususnya pada pengembangan sumber daya manusia melalui olahraga, serta mendorong sinergi antara KONI, pemerintah daerah, dan BPP dalam penyusunan roadmap cabang olahraga unggulan di setiap kabupaten.



Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kewenangan Pemerintahan Distrik

Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kewenangan Pemerintahan Distrik yang dilaksanakan pada 3 Desember 2025 di Grand Baliem Hotel Wamena bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan distrik dan kampung di delapan kabupaten Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta dan dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber dari FISIP Universitas Cenderawasih, difasilitasi oleh moderator dosen yang kompeten. Pokja Papua Sehat berperan dalam pelaksanaan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) guna memperkuat pemahaman kelembagaan dan kewenangan aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem di bidang kesehatan. Kesimpulan dan saran hasil diskusi menjadi bahan sosialisasi lanjutan di tingkat distrik dan kampung.



Kegiatan Pendataan Pengembangan Potensi RSUD dan Puskesmas di delapan kabupaten Provinsi Papua Pegunungan

.....

Kegiatan Pendataan Pengembangan Potensi RSUD dan Puskesmas di delapan kabupaten Provinsi Papua Pegunungan dilaksanakan pada 24 November hingga 3 Desember 2025 di Wamena oleh Pokja Papua Sehat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK). Kegiatan ini bertujuan menghimpun dan memverifikasi data kondisi sarana dan prasarana kesehatan RSUD dan Puskesmas tingkat distrik, baik yang telah maupun belum terbangun serta layanan rawat inap. Hasil pendataan menunjukkan masih adanya ketimpangan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan antar kabupaten, sehingga diperlukan percepatan pembangunan dan pemerataan layanan kesehatan. Data yang diperoleh menjadi dasar perencanaan pembangunan kesehatan provinsi dan kabupaten, termasuk tindak lanjut pendataan kebutuhan SDM dan peralatan kesehatan, pelaksanaan SHEK berbasis data digital standar Kementerian Kesehatan RI, serta percepatan pembangunan RSUD Provinsi Papua Pegunungan dan RSUD Wamena baru pada tahun 2026.

Kegiatan Koordinasi Kerja Wakil Ketua II MRP Provinsi Papua Pegunungan dengan BP3OKP

.....

Kegiatan Koordinasi Kerja Wakil Ketua II MRP Provinsi Papua Pegunungan dengan BP3OKP dilaksanakan pada Jumat, 9 Desember 2025, bertempat di Ruang Kerja Anggota Pengarah BPP, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK). Pertemuan ini bertujuan memperkuat silaturahmi dan membangun kerja sama kelembagaan dalam mendukung pembangunan Orang Asli Papua (OAP) melalui program prioritas tahun 2026. Pembahasan difokuskan pada percepatan pendataan keaslian OAP berbasis klen suku dan wilayah domisili, penanganan keamanan antar suku, kepastian hukum kepemilikan tanah OAP, serta penguatan koordinasi antara MRP, DPRP, BP3OKP, Gubernur, dan delapan bupati se-Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan untuk mendorong pendataan identitas OAP sebagai prioritas utama serta memperkuat sinergi pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kreatif OAP secara berkelanjutan melalui koordinasi berkala yang terjadwal.



Terima Kasih

Contact Us:



badanpengarahpapua.go.id



@bpp.papuapegunungan





**RENCANA KEGIATAN & PROGRAM KERJA BADAN PENGARAH PERCEPATAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025**



TIM PENYUSUN

BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pengarah	:	Hantor Matuan, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Polhukam	:	Fransiscus Elosak,SE, MM.
Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas	:	Paul Wetipo,S.Pd
Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat	:	Gaad Piranid Tabuni, SP.,M.M.
Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif	:	Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Meisly Mariana Kombong, S.AP.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Otniel Elokpere, S.Pd.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Teo Aprianus Dini

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Ringkasan Kelembagaan	5
1.3.1 Definisi	5
1.3.2 Struktur Kelembagaan.....	6
1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan.....	6
1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja.....	7
BAB II.....	9
RENCANA KEGIATAN DAN PROGRAM KERJA	9
2.1 Target Outcome.....	9
Rencana Kegiatan dan Program Kerja	10
2.2.1 Rencana Kegiatan/Program Kerja Rutin	10
2.2.2 Rencana Kegiatan Rutin Pengarah & Anggota Pokja	12
BAB III.....	32
PENUTUP.....	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi khusus dilaksanakan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Otonomi Khusus di Papua telah memasuki babak baru. Setelah berjalan 20 tahun, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan pada

Pasal 68A bahwa perlu dibentuk badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Dalam menjalankan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP).

Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan SHEK dalam pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta satu orang Perwakilan OAP dari setiap Provinsi di Papua. Selain itu dalam pelaksanaannya, akan dibantu pula oleh Sekretaris Eksekutif di Jakarta dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berlokasi di Papua, Kelompok Kerja, serta Kelompok Ahli. Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi.

Arah percepatan pembangunan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana induk tersebut memuat berbagai target dengan capaian dan dampak yang terukur. Agar pelaksanaan tugas BPP dapat sejalan dengan rencana induk, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja BPP. Rencana kegiatan dan program kerja ini memuat Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan ringkasan kelembagaan, Bab II yang terdiri atas target outcome, rencana kegiatan dan program kerja, serta Bab III Penutup. Rencana kegiatan dan program kerja menjadi acuan bagi Badan Pengarah Papua,

khususnya bagi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas SHEK percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
7. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;
8. Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Pembidangan Tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
9. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-3/SETBPP/JYP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.

1.3 Ringkasan Kelembagaan

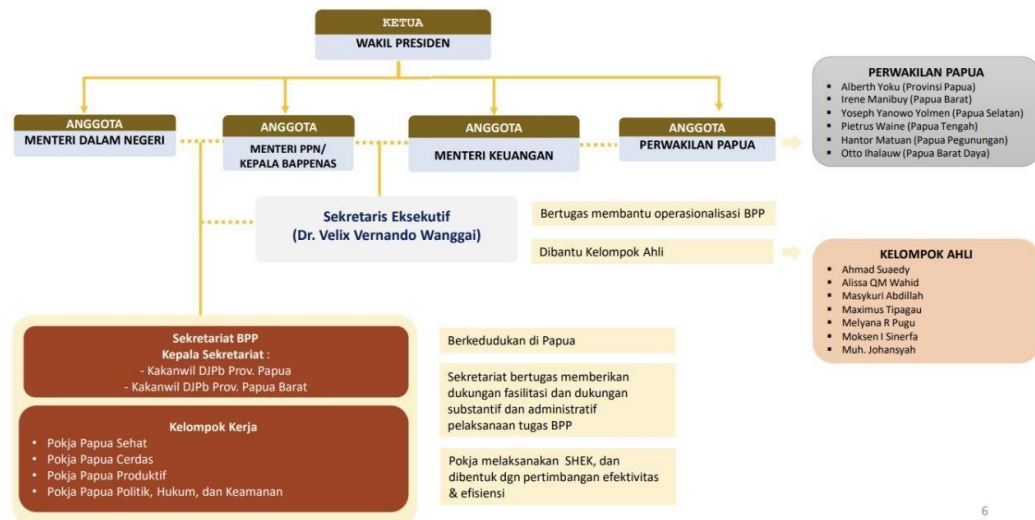
1.3.1 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi,

evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.

- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.3.2 Struktur Kelembagaan



1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;

- c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
- d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

- a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lem.baga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;

- b. Koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. Membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota" dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- f. Menyusun laporan kelompok kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.

BAB II

RENCANA KEGIATAN DAN PROGRAM KERJA

2.1 Target Outcome

Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Wilayah Provinsi Papua Pegunungan Periode Tahun 2024					
Misi/Tema	Outcome	Satuan	Volume		
			Baseline 2023	Baseline/ Capaian 2024	Target Impact 2025
Papua Sehat	Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	63,01	64,5	65
	Pravelensi Stunting	persentase	37	34,5	20
	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi Malaria	jumlah kab/kota	-	1	3
Papua Cerdas	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	-	-	-
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	-	-	-
Papua Produktif	Tingkat Kemiskinan	persentase	-	-	-
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persentase	-	-	-
	Realisasi Investasi (PMDN)	rupiah	-	-	-
	Realisasi Investasi (PMA)	dollar (us)	-	-	-
Papua Damai (Politik, Hukum, dan Keamanan)	Jumlah Kejahatan	jumlah	-	502	-
	Tingkat Risiko Terkena Kejahatan	persentase	-	22,31%	-

*BPS belum mengeluarkan data 2024

*beberapa data yang masih kosong dikarenakan belum ada data valid dari BPS dan dinas terkait

Rencana Kegiatan dan Program Kerja

2.2.1 Rencana Kegiatan/Program Kerja Rutin

No	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Peserta Kegiatan	Rencana Pelaksanaan		Tujuan Pelaksanaan	Pelaksanaan		Output
				Waktu/Freq	Tempat		Tugas	Fungsi	
1	Rapat Internal Awal Bulan	Rapat	Anggota/Pengarah, Pokja dan Staf BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan	Januari-Desember/12x	Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan	Membahas persiapan dan kegiatan yang akan dilakukan dalam bulan berjalan	SHEK Internal	Perencanaan Internal	Seluruh rencana kegiatan dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu
2	Rapat Internal Akhir Bulan	Rapat	Anggota/Pengarah, Pokja dan Staf BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan	Januari-Desember/12x	Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan	Membahas seluruh kegiatan yang sudah dilakukan satu bulan	SHEK Internal	Evaluasi Internal	Seluruh kegiatan yang sudah dilakukan dapat di evaluasi agar kegiatan berjalan semaksimal mungkin

3	Rapat Evaluasi setelah melaksanakan kegiatan/kunjungan	Rapat	Anggota/Pengarah, Pokja dan Staf BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan	Januari-Desember/10x	Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan	Membahas hasil kegiatan atau kunjungan kerja yang baru di lakukan	SHEK Internal	Evaluasi Internal	Menemukan permasalahan yang terdapat pada wilayah yang di kunjungi untuk kemudian di rumuskan oleh badan pengarah
4	Rapat Internal Evaluasi Akhir Tahun	Rapat	Anggota/Pengarah, Pokja dan Staf BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan	Januari-Desember /1x	Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan	Mengevaluasi Kegiatan dan Kinerja tahunan BPP Provinsi Papua Pegunungan	SHEK Internal	Evaluasi Internal	Mengevaluasi tugas dan fungsi BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan tercapai dengan baik.
5	Rapat Internal Perencanaan Tahun Anggaran Baru	Rapat	Anggota/Pengarah, Pokja dan Staf BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan	Januari-Desember /1x	Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan	Menyusun Perencanaan dan Preogram Kerja tahun 2026	SHEK Internal	Perencanaan Internal	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Program Tahun 2025 dapat terlaksana dengan maksimal

2.2.2 Rencana Kegiatan Rutin Pengarah & Anggota Pokja

No	Misi	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Peserta Kegiatan	Rencana Pelaksanaan		Tujuan Pelaksanaan	Pelaksanaan		Output
					Waktu	Tempat		Tugas	Fungsi	
1	BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan (Anggota/ Pengarah, Pokja)	Sosialisasi kehadiran BP3OKP di Provinsi Papua Pegunungan	Kunjungan Kerja	Anggota/Peng arah, Pokja dan Staf BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Bupati Jayawijaya, Seluruh OPD Kabupaten Jayawijaya	Januari- Juni 2026	Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya	Memperkenalkan kehadiran BP3OKP di Provinsi Papua Pegunungan dan untuk mengetahui lokasi/tempat pejabat dan OPD terkait bertugas	SHEK	Pemberian Arah Umum	Terbangunnya kerja sama antar pemerintah daerah dengan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Pegunungan untuk mewujudkan SHEK
2	BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan (Anggota/ Pengarah, pokja)	Sosialisasi kehadiran BP3OKP di Provinsi Papua Pegunungan	Kunjungan Kerja	Anggota/Peng arah, Pokja dan Staf BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Bupati Mamberamo Tengah, Seluruh OPD Kabupaten Mamberamo Tengah	Januari- Juni 2026	Kantor Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah	Memperkenalkan kehadiran BP3OKP di Provinsi Papua Pegunungan dan untuk mengetahui lokasi/tempat pejabat dan OPD terkait bertugas	SHEK	Pemberian Arah Umum	Terbangunnya kerja sama antar pemerintah daerah dengan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Pegunungan untuk mewujudkan SHEK

3	BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan (Anggota/ Pengarah, Pokja)	Sosialisasi kehadiran BP3OKP di Provinsi Papua Pegunungan	Kunjungan Kerja	Anggota/Pengarah, Pokja dan Staf BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Bupati Pegunungan Bintang, Seluruh OPD Kabupaten Pegunungan Bintang	Januari- Juni 2026	Kantor Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang	Memperkenalkan kehadiran BP3OKP di Provinsi Papua Pegunungan dan untuk mengetahui lokasi/tempat pejabat dan OPD terkait bertugas	SHEK	Pemberian Arahan Umum	Terbangunnya kerja sama antar pemerintah daerah dengan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Pegunungan untuk mewujudkan SHEK
4	BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan (Anggota/ Pengarah, Pokja)	Sosialisasi kehadiran BP3OKP di Provinsi Papua Pegunungan	Kunjungan Kerja	Anggota/Pengarah, Pokja dan Staf BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Pj Bupati Tolikara, Seluruh OPD Kabupaten Tolikara	Januari- Juni 2026	Kantor Bupati Kabupaten Tolikara	Memperkenalkan kehadiran BP3OKP di Provinsi Papua Pegunungan dan untuk mengetahui lokasi/tempat pejabat dan OPD terkait bertugas	SHEK	Pemberian Arahan Umum	Terbangunnya kerja sama antar pemerintah daerah dengan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Pegunungan untuk mewujudkan SHEK
5	Papua Sehat	Membuat Rencana kerja Tahun 2026 berbasis Program RIPP/RAPP	Rapat/ Penyusunan Renja tertulis	Pengarah dan Pokja dan Sekretariat BP3OKP	Januari	Kantor BP3OKP	-Memiliki dokumen rencana kerja sebagai dasar dan pedoman	SHEK dalam Implementasi Tusi Pokja Papua Sehat	Pedoman Dan Tuntunan	- Dokumen Perencanaan - Keteraturan Pelaksanaan Kegiatan
6	Papua Sehat	Kunjungan Kerja Pengarah BPP dan Pokja	Rapat SHEK Bersama Kepala Dinas Kesehatan	-Pengarah BPP dan 4 Pokja serta Staf Admin BP3OKP	Februari s/d April	8 Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan	Kunjungan Kerja dalam rangka Tusi SHEK	Tugas SHEK Implementasi Pembangunan	Fungsi SHEK Pembangunan Bidang Kesehatan	- Mengetahui Kondisi real dan data implementasi Capaian hasil dan Kendala/Masalah yang ada.

		BP3OKP di 8 Kabupaten	8 kabupaten Prov Papua Pegunungan	-Bupati dan Komponen Pemerintah setempat				di bidang Kesehatan		- Memahami Solusi pemecahan Masalah yang ada
7	Papua Sehat	Konsultasi dengan Sekda Provinsi Papua Pegunungan Bersama Dinas Kesehatan Provinsi Pembahasan Implementasi Program MBG di Prov Papua Pegunungan	Pertemuan bersama dan Kepala Dinas Prov. Papua Pegunungan	- Sekda Provinsi - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi - Pokja Papua Sehat - Koordinator Program MBG Provinsi Papua Pegunungan	Minggu II Januari	Ruang Kerja Sekda Provinsi Papua Pegunungan	Mengevaluasi Pelaksanaan dan Rencana Kerja Program MBG 2026 di Provinsi Papua Pegunungan dan di 8 Kabupaten	Tugas SHEK Implementasi Pelaksanaan MBG 2025 dan Rencana Kerja Program tahun 2026	Fungsi SHEK terhadap hasil Dan peserta penerima manfaat khusus OAP Papua Pegunungan	-Ada Strukturtur organisasi - Jumlah Capaian cakupan wilayah, Jumlah dapur Gizi SPPG dan Jumlah penerimaan manfaat Program MBG
8	Papua Sehat	Pertemuan Pokja Papua Sehat bersama Kepala Dinas Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan membahas implementasi pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Pegunungan	Rapat Kerja Teknis Pelaksanaan Lapangan di 8 Kabupaten	-Pengarah BPP & Pokja Papua Sehat BP3OKP -Sekda Provinsi Papeg. -Kadinkes dan Kabid Bidang/ Ahli Gizi Dinas Kesehatan Provinsi. -Koordinator MBG Provinsi Papua Pegunungan. -Koordinator Lapangan Program MBG 8 Kabupaten	Minggu III Januari 2026	Ruang Kerja Sekda Provinsi Papua Pegunungan	Pengajuan rencana pegusulan program & Rencana Kerja Pembiayaan untuk dikoreksi dan disetujui Gubernur/Sekda Provinsi Papua Pegunungan.	SHEK dalam implementasi dan komunikasi program pusat yaitu pemberian makanan bergizi di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan terkait misi	Sinkronisasi dan Evaluasi	Dokumen rencana dan rekomendasi implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Pegunungan sebagai dasar persetujuan dan pelaksanaan sesuai misi Papua Sehat

								Papua Sehat berbasis RIPP dan RAPP		
9	Papua Sehat	Rapat Pokja Papua Sehat Dan Staf BP3OKP bersama Kelapa Dinas dan Kabid dan Staf Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan Membahas dan Koordinasi Pembangunan Kesehatan.	Rapat Koordinasi	-Pokja Papua Sehat dan Staf BP3OKP -Kepala dinas dan staf Kesehatan	4 x /tahun Minggu 1 Januari, -Minggu 2 Maret, Minggu 21 Juni, Minggu 2 September Dan Minggu 1 Desember	Ruang Kerja Dinas Kesehatan dan Kantor BP3OKP	Koordinasi dan Diskusi : *Jan. Rencana Kerja *Mar. Persiapan & Alokasi sasaran kegiatan *Jun. Awal Eksekusi Kegiatan *Sept. Monitoring kegiatan *Des. Akhir Monev	Percepatan eksekusi pembangunsaan direncanakan dengan capaian hasil optimal baik kuantitas dan kualitasnya yang berdampak kemajuan bagi masyarakat OAP	Pokja Papua Sehat sesuai Tusi SHEK dlm semua tahapan kegiatan (Perencanaan, pelaksanaan, Monev dan hasil)	-Semua perencanaan dapat terlaksana dan tercapai hasil melalui tusi SHEK
10	Papua Sehat	Melakukan identifikasi berengking kasus angka 10 jenis penyakit yang menonjol di Provinsi Papua berdasarkan data dari	Rapat/ Konsultasi/ Wawancara/ Pendataan/	- Kepala Dinas dan Staf Kesehatan Provinsi dan 8 Kabupaten - BPS Kabupaten - Dokter Spesialis	Februari s/d Juli	- Kantor Dinas Kesehatan - RSUD/ PKM/ Posyandu - Yayasan/ lembaga - Kajian Data	- Memiliki Data akurat 10 Jenis Penyakit - Mengkaji dan identifikasi/analisa factor-faktor penyebab	Tugas SHEK bersama semua K/L, Pemerintah Provinsi dan 8 Kabupaten dalam perencanaan	Fungsi SHEK dalam pengarahan, pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Dalam pendataan	Hasil Kajian Pendataan menjadi Pedoman dan sumber data akurat dalam penanganan kesehatan dalam solusi penurunan kasus penyakit.

		8 kabupaten melalui Konsultasi Dinas Kesehatan Provisi, Para Ahli/Dokter Kesehatan dan Pemerhati Kesehatan Nasioanl/ Inernasional/ Yayasan dll		- Para ahli dan Tenaga Medis kesehatan - RSUD dan PKM - Kepala Dinas sosial		Putaka - Kantor BPS	- Pemetaan wilayah penyebaran Penyakit - Rekomendasi kualitas dan kuantitas data	nan /pelksan akan pendataan dan identifikasi 10 kasus penyakit		
11	Papua Sehat	Melakukan Koordinasi bersama Sekda Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua membahas Penurunan kasus HIV /AID melalui Pembentukn Kelembagaa n KPA dan Kinerja Prosedur Penanggulan gan di Provinsi Papua Pegunungan dan 8 Kabupaten	Rapat Dan Koordinasi	- Gubernur dan 8 Bupati - Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Provinsi dan 8 Kabupaten - DPRP dan DPRK - MRP K/L terkait	Mulai Februari s/d Novemb er	- Kantor Gubernur - Kantor Bupati/ Dinas Kesehata n Kabupaten	- Sosialisasi Penanggulan gan bahaya dan Kasus HIV/AID - Terbentuk Komisi Penanggulan gan HIV /AID (KPA) di Provinsi dan 8 Kabupaten - Terbentuk sitem kerja dan Pembiayaan Serta pelaksanaa n penangu- langan HIV sehingga terjadi penurunan	Tugas SHEK bersama semua K/L, Pemerint ah Provinsi dan 8 Kabupat en dalam Pembent ukan KPA dan terwujud nya system pelaksaa n penangg ulangan kasus HIV/AID	Fungsi SHEK dalam pengarah an, pembi naan, Pengawa- san dan pelaporan Pemebntuk an KPA dan upaya operasio - nal Penanggula ngan	- Terbentuk KPA di Provinsi PP dan 8 Kabupaten - Terjadi percepatan penanggulangan Kasus HIV/AID Terjadi Penurunan angka orang/ penduduk pengidap kasus HIV.

							Kasus angka Penderita HIV AID			
12	Papua Sehat	Kuliah Umum Sosialisasi Kemiskinan Ekstrem Kesehatan Orang Asli Papua dan Sosslusi Pendekatan Penaggulangannya bersama Dosen dan Mahasiswa STIKIP Kristen Wamena	Pertemuan/ Kuliah	- Dosen Mahasiswa	Januari/ Pebruari	Ruang Kuliah Kampus STIKIP Kristen Wamena	Membangun Konsep bersama Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kesehatan OAP melalui Trasnformasi diri SDM Pendidik OAP	Tugas SHEK bersama Perguruan Tinggi Pendidikan STIKIP Kristen Wamena dalam terwujudnya Percepatan pelaksanaan PenurunanKemiskinan Ekstrem Kesehatan melalui Pendidikan	Fungsi SHEK dalam pengarahan, pembinaan karakter SDM dalam Pengembangan rancangan perencanaan Pembangunan kualitas Kesehatan SDM OAP	-Tersosialisasi dan terbangun karakter SDM Pendidik tentang Pembangunan Kesehatan OAP dari Kemiskinan Ekstrem Kesehatan melalui transformasi distrupsi pendidikan kesehatan be-r teknologi digital.
13	Papua Sehat	Pokja Papua Sehat Melakukan SHEK bersama Bupati dan Sekda, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Jayawijaya	Pertemuan/Rapat/ SHEK	RSUP Provinsi : - Sekda, Kepala Dinas Kesehatan - BAPERIDA - K/L Terkait	Januari- Novemb er	Ruang Rapat/ Kerja	Terbangun koordinasi dan Kerja sama Percepatan Pembangunan Sarana Rumah Sakit Umum Provinsi	Tugas SHEK bersama Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten Jayawijaya	Fungsi SHEK bersama dalam Perencanaan, Pengawasan Pelaksanaan, Pembiayaan	- Terwujud Tusi SHEK efektif - Tersedia Lahan Lokasi - Terbangun Bangunan Fisik RSUP Propinsi dan RSUD Wamena - Tersedia Sarpras dan SDM

		membahas Tentang lanjutan rencana Pembangun Rumah Sakit Umum Provinsi dan RSUD Wamena Tahun 2026		RSUD Wamena - Bupati - Sekda - KeplaDinas Kesehatan - Kepala Bapeda - Direktur RSUD Wamena			Papua Pegunungan dan Rumah Sakit Umum Daerah Wamena	dalam terwujud nya Percepat an pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Pegunungan Dan RSUD Wamena		Kesehatan yang memadai
14	Papua Sehat	Melakukan Pendataan Kebutuhan SDM Kesehatan di 8 RSUD dan Posyandu (Ketersediaan dan Kekurangan) Di 8 Kabupaten cakupan Provinsi Papua bersama Dinas Kesehatan Kabupaten dan Instansi terkait	-SHEK -Pendataan lapangan, -Rapat -Refresi data	- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan 8 Kabupaten - Direktur RSUD 8 Kabupaten - Baperida/ Bapeda Instansi terkait	Februari s/d Juni	Kantor Dinas Kesehatan -Ruang Kerja Diekrtur RSUD -Kantor Baperida/Bapeda	Memastikan data akurat tenaga SDM dan Sarpras Kesehatan yang tersedia dan kekurangan di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/RSUD/ PKM dan Posyandu di Provinsi dan 8 Kabupetan se Provisi Papua Penungan	Tugas SHEK bersama Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten Jayawijaya dalam mewujudkan Percepat an pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum	Fungsi SHEK bersama dalam Perencanaan, Pengawasan Pelaksanaan, Pembiayaan berdasarkan kualitas data dan secara Dinamis	- Pemda Provinsi dan 8 Kabupaten memiliki Dokumen Data Dinamis Up to Date SDM dan Sarpras Kesehatan menjadi Data Dasar Pembangunan. Kesehatan - Melawan Lupa membangun tanpa Data ter-up Date 2026

								Provinsi Papua Pegunungan Dan RSUD Wamena berbasis		
15	Papua Sehat	Melakukan SHEK kepada Kepala Dinas Kesehatan dan K/L terkait Provinsi dan 8 Kabupaten dalam implementasi percepatan pembangunan dan pembiayaan Otsus Berdasarkan RIPPP dan RAPP 2026 K/L dan Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi, Tinjauan lapangan	-Gubernur/ Sekda, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan 8 Kabupaten -Pimpinan K/L -MRP/DPRP	Januari - Desember	Menyesuaikan dalam pelaksanaan	- Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan 8 Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan terimplementasi Berdasarkan dan sesuai dengan Program RIPPP dan RAPP dengan pembiayaan Otonomi Khusus Papua	Tugas SHEK bersama Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten Jayawijaya dalam mewujudkan Percepatan pelaksanaan Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan Program RIPPP dan RAPP dengan pembiayaan	Fungsi SHEK bersama dalam Perencanaan, Pengawasan Pelaksanaan dana Pembiayaan sesuai RIPPP dan RAPP	-Terwujudnya capaian Hasil Pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua Pegunungan sesuai kualitas kepatuhan dalam kinerja implementasi Program dan Pembiayaan berbasis RIPP dan RAPP

								Otsus Papua		
16	Papua Sehat	Pokja Papua Sehat melakukan pendampingan kesehatan anak melalui Pelayanan Posyandu di Kampung Algonik Distrik Pyramid dalam Penegmbangan Pusat Pendidikan Anak (PPA) full gizi bekerja sama Yayasan Compassion	Pertemuan Aksi Lapangan/ Sosialisasi Kesehatan -Tim Bang Ukur bayi -Pemberian makan Bergizi -Pengobatan massal	-Kader Posyandu -50 Anak Binaan PPA -Didampingi orang tua -Pimpinan Gereja --Aparat Kampung --dr. dan tenaga perawat dan --Pokja Papua sehat	1 X/bulan (10 bulan)	Gedung Pertemuan PPA dan Gedung gereja	Pemeberikan makanan bergizi Perawatan Ibu Hamil dan Bayi Balita Usaha kesehatan preventif dan dan kuratif	SHEK Tenaga kesehatan dan Aparat kampung serta pemimpin dalam perencanaan kegiatan	Fungsi SHEK memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kumunikasi social dengan masyarakat	Terwujud Pelaksanaan Pengobatan dan Pembinaan ibu hamil, Bayi balita bergizi dan sosialisasi kesehatan lingkungan
17	Papua Cerdas	Melakukan SHEK di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui program revitalisasi Pendidikan.	Kunjungan Kerja	Pokja Papua Cerdas bersama Dinas Pendidikan 8 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan	Januari-Desember	Kantor Dinas Pendidikan 8 Kabupaten	• Meningkatkan nilai rata-rata siswa • Membentuk karakter, iman dan kebiasaan hidup yang produktif.	SHEK		Sudah ada data riil kondisi pendidikan di kabupaten jayawijaya: - Jumlah sekolah - Jumlah siswa - Jumlah guru - Sarana dan prasarana Sudah terbentuk Tim Training dengan kurikulum Koordinasi dengan pemda jayawijaya dalam menyediakan fasilitas pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan

18	Papua Cerdas	Kerangka Master Plan Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan	Rapat	Pokja Papua Cerdas, Dinas Pendidikan, Guru.	Januari-Juni		• Menciptakan system pendidikan yang efektif, efisien dan berkualitas sesuai visi dan misi pemerintah provinsi papua pegunungan: • Meningkatkan akses pendidikan yang merata dan inklusif sampai ke kampung-kampung • Meningkatkan kualitas pendidikan yang berbasis kompetensi dan relevansi kebutuhan industry dan Masyarakat. • Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional • Meningkatkan Infrastruktur pendidikan yang	SHEK		Bulan Maret 2026 Provinsi Papua Pegunungan telah menetapkan Kerangka master plan pendidikan untuk dilaksanakan melalui harmonisasi program pendidikan di tingkat kabupaten.

							memadai dan nyaman			
19	Papua Cerdas	Meningkatkan SDM tingkat Perguruan Tinggi di Dalam Negeri dan Luar Negeri tahun 2026-2027	Rapat	Pokja Papua Cerdas, Guru, Dinas Pendidikan	Januari-Mei		Mempersiapkan calon mahasiswa/l dalam program pelatihan : "GAP YEAR PROGRAM". Focus pada pembentukan karakter, sikap dan kebiasaan yang produktif serta TOEFL, IELTS bagi mereka yang akan melanjutkan kuliah ke Luar Negeri	SHEK	Pengarahan, Pembinaan dan Evaluasi	Bulan Maret 2026 Provinsi Papua Pegunungan telah meresmikan campus Global Training Center dan launching dimulainya Program Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan.
20	Papua Produktif	(Swasembada Pangan) 1. Pengembangan pangan lokal LP2B, KP2B dan LCP2B 2. Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian 3. Kegiatan petani Milenial 3. Kegiatan papua menanam.	Rapat, Audensi dan Kunjungan	Pokja Papua produktif, Kadis Pertanian, Kabid, kasi Pertanian, Kelompok Tani, anggota P3A dan masyarakat petani.	Januari s/d Desember 2026	Kantor Dinas Pertanian, Aula BP3OKP dan area pertanian	1. Menjalankan dan meningkatkan program kedaulatan Swasembada pangan pemerintah. 2. Mencegah terjadinya Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi di Provinsi PP 3. Mendukung kebutuhan pokok program MBG.	SHEK dalam monitoring dan meningkatkan program Swasembada pangan dari pemerintah pusat dan daerah sesuai RIPP, RAPP	Sinkronisasi, koordinasi dan Evaluasi	Sebagai pondasi awal dalam meningkatkan swasembada pangan, peningkatan hasil pertanian, mencegah terjadinya kemiskinan ekstrem dan inflasi yang tinggi di Provinsi PP.

								dan RAP.		
21	Papua Produktif	(Membangun Dan Pengembang an Ekonomi Masyarakat Ekonomi OAP) 1.Pengemba ngan Talenta Muda Papua 2.Pembangu nan PYCH (Papua Yaouth Creative hub). 3.Pemberday aan ekonomi mama-mama papua 4.Pemberday aan pengusaha OAP semua sektor	Rapat, Audensi, Pameran dan kunjungan	Dinas Perindagkop, Dinas PUPR, Dinas Parekraf, Dinas TK dan Transmigrasi, Pelaku usaha UMKM dan EKRAF	Bulan Januari S/d Desemb er 2026	Ruang Rapat masing- masing dinas, Ruang rapat BP3OKP dan dilapangan	1.Meningkatk an jiwa Preuner dan kemandirian masyarakat OAP 2.Meningkatk an perekonomian pendapatan dan masyarakat OAP 3.Mencegah Inflasi	SHEK dan monitori ng dalam meningk atkan skil, pendapa tan dan perekon omian masyara kat OAP sesuai dengan RIPP, RAPP dan RAP	Sinkronisasi , Koordinasi dan evaluasi	Merubah kehidupan dan karakter masyarakat OAP dalam pembangunan ekonomi yang lebih mapan dan mandiri.
22	Papua Produktif	(Pengemban gan PAREKRAF) 1.Pengemba ngan Talenta Muda Papua 2.mendorong pemerintah Provinsi untuk membangun gedung/sang gar seni budaya PYCH	Rapat, Audensi, Pameran dan kunjungan	Dinas PAREKRAF, Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Pelaku usaha EKRAF, UMKM dan masyarakat pemilik seni dan budaya.	Bulan Januari S/d Desemb er 2026	Ruang Rapat masing- masing dinas, Ruang rapat BP3OKP dan dilapangan	1.Meningkatk an jiwa Preuner dan kemandirian usaha EKRAF masyarakat OAP 2.Meningkatk an perekonomian dan pendapatan masyarakat dibidang PAREKRAF	SHEK dan monitori ng dalam meningk atkan skil pelaku usaha PAREKR AF , pendapa tan dan perekon	Sinkronisasi , Koordinasi dan evaluasi	Menambah potensi pendapatan daerah dan Sebagai pondasi awal dalam meningkatkan perekonomian, dan mencegah terjadinya kemiskinas ektrim dan inflasi yang tinggi di Provinsi PP.

		3. Pengembangan kampung wisata, wisata buatan, wisata alam dan jenis macam wisata – wisata lainnya.					3. Mencegah Inflasi 4. Memperkenalkan wisata daerah kepada wisatawan local dan manca Negara.	omian masyarakat OAP sesuai dengan RIPP, RAPP dan RAP		
23	Papua Produktif	(Peningkatan Investasi wilayah) 1. Penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah dan aneka industri 2. Pengembangan wisata alam, agro wisata 3. Penetapan ijin wilayah yang potensi dari hasil pertambangan.	Rapat, Audensi dan kunjungan	Dinas Perindagkop, Parekraf, Dinas Investasi dan penanaman Modal, Pemilik hak ulayat, pengusaha OAP dan masyarakat.	Bulan Januari S/d Desember 2026	Ruang Rapat masing-masing dinas, Ruang rapat BP3OKP dan dilapangan	1. Meningkatkan jiwa Preuner dan kemandirian dalam pemanfaatan SDA oleh OAP 2. Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat OAP 3. Mencegah Inflasi 4. Menambah peluang PAD setempat	SHEK dan monitoring dalam mengelola, menjaga, meningkatkan skill pelaku usaha SDA, mendorong pendapatan dan perekonomian masyarakat OAP sesuai dengan RIPP, RAPP dan RAP	Sinkronisasi, Koordinasi	Menambah potensi pendapatan asli daerah dan Sebagai pondasi awal dalam meningkatkan perekonomian, masyarakat setempat dan mencegah terjadinya kemiskinan ektrim dan inflasi yang tinggi di Provinsi PP.
24	Papua Produktif	(Peningkatan Infrastruktur Dan	Rapat, Audensi	Dinas PUPR, PDAM, Cipta karya, Bina	Bulan Januari S/d	Ruang Rapat masing-	1. Meningkatkan perekonomian	SHEK dan monitoring	Sinkronisasi, Koordinasi	Menambah potensi pendapatan asli daerah dan Sebagai

		Konektifitas Wilayah) nMendorong dan Monitoring pelaksanaan pembangunan PDAM/SPAM Air, Jalan Nasional, Pemukiman/ Gedung, Transportasi Udara, Telkom dan Tempat Angkutan umum ana Ntar kabupaten.	dan kunjungan	Marga, Dinas Kominfo dan dinas perhubungan	Desemb er 2026	masing dinas, Ruang rapat BP3OKP dan dilapangan	dan pendapatan masyarakat OAP 2.Mencegah Inflasi 3.Menambah peluang PAD setempat	ng dalam meningkat kan , mendoro ng pendapa tan dan perekon omian masyara kat OAP sesuai dengan RIPP, RAPP dan RAP		pondasi awal dalam meningkatkan perekonomian, masyarakat setempat dan mencegah terjadinya kemiskinas ektrim dan inflasi yang tinggi di Provinsi PP.
25	Papua Produktif	(Swasembad a Air Dan Energi) Mendorong dan monitoring pelaksanaan Pembangunan bendungan, PDAM/SPAM , Irigasi, SDA dan TPS	Rapat, Audensi dan kunjungan	Dinas PUPR, PDAM, Cipta karya, Bina Marga dan Dinas LHPK	Bulan Januari S/d Desemb er 2026	Ruang Rapat masing-masing dinas, Ruang rapat BP3OKP dan dilapangan	1.Menunjang, Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat OAP 2.Mencegah Inflasi 3.Menambah peluang PAD setempat	SHEK dan monitori ng dalam meningkat kan , mendoro ng pendapa tan dan perekon omian masyara kat OAP sesuai dengan RIPP, RAPP dan RAP	Sinkronisasi , Koordinasi	Menambah potensi pendapatan asli daerah dan Sebagai pondasi awal dalam meningkatkan perekonomian, masyarakat setempat dan mencegah terjadinya kemiskinas ektrim dan inflasi yang tinggi di Provinsi

26	Papua Produktif	(Pengembangan Peternakan dan Perikanan) 1.Meningkatkan pendapatan para pelaku usaha UMKM/Kelompok Ternak dari usaha dimaksud. 2.Pemenuhan Gizi nasional Masyarakat 3.Mendukung Program MBG	Rapat, Audensi dan kunjungan	Dinas Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan	Bulan Januari S/d Desember 2026	Ruang Rapat masing-masing dinas, Ruang rapat BP3OKP dan dilapangan	1.Menunjang, Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat OAP 2.Mencegah Inflasi 3.Menambah peluang PAD setempat	SHEK dan monitoring dalam meningkatkan , mendorong pendapatan dan perekonomian masyarakat OAP sesuai dengan RIPP, RAPP dan RAP	Sinkronisasi , Koordinasi	Menambah potensi pendapatan asli daerah dan Sebagai pondasi awal dalam meningkatkan perekonomian, masyarakat setempat dan mencegah terjadinya kemiskinan ektrim dan inflasi yang tinggi di Provinsi
27	Papua Produktif	(Pemantauan Harga dan Stock Barang Lintas Kabupaten) 1.kunjungan sekaligus Operasi Pasar untuk Mengamankan harga kebutuhan barang pokok 2.Menstabilkan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat luas dan mencegah monopoli	Rapat, Audensi dan kunjungan	Dinas Perindagkop, Biro perekonomian , Dinas Pertanian dan Dinas Perhubungan	Bulan Januari S/d Desember 2026	Ruang Rapat masing-masing dinas, Ruang rapat BP3OKP dan dilapangan	1.Menunjang, Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat OAP 2.Mencegah Inflasi 3.Menambah peluang PAD setempat	SHEK dan monitoring dalam meningkatkan , mendorong pendapatan dan perekonomian masyarakat OAP sesuai dengan RIPP, RAPP dan RAP	Sinkronisasi , Koordinasi	Menambah potensi pendapatan asli daerah dan Sebagai pondasi awal dalam meningkatkan perekonomian, masyarakat setempat dan mencegah terjadinya kemiskinan ektrim dan inflasi yang tinggi di Provinsi

		kebutuhan barang pokok dan barang lainnya dari pedagang yang tidak tanggung jawab.								
28	Papua Produktif	(Pameran Produk UMKM/EKRAF Dalam Dan Luar Daerah) 1.Mendorong dan Mengangkat hasil kerajinan kearifan local bagi masyarakat. 2.Mendorong promosi pasaran dan pameran baik dalam wilayah maupun ke luar daerah	Rapat, Audensi dan kunjungan	Dinas Perindagkop, Dinas Parekraf dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Bulan Januari S/d Desember 2026	Ruang Rapat masing-masing dinas, Ruang rapat BP3OKP dan dilapangan	1.Menunjang, Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat OAP 2.Mencegah Inflasi 3.Menambah peluang PAD setempat	SHEK dan monitoring dalam meningkatkan , mendorong pendapatan dan perekonomian masyarakat OAP sesuai dengan RIPP, RAPP dan RAP	Sinkronisasi , Koordinasi	Menambah potensi pendapatan asli daerah dan Sebagai pondasi awal dalam meningkatkan perekonomian, masyarakat setempat dan mencegah terjadinya kemiskinan ekstrim dan inflasi yang tinggi di Provinsi
29	Papua Produktif	Koperasi	Rapat, Audensi dan kunjungan	Dinas Perindagkop, Perbankan dan Anggota Koperasi	Bulan Januari S/d Desember 2026	Ruang Rapat masing-masing dinas, Ruang rapat BP3OKP dan dilapangan	1.Menunjang, Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat OAP 2.Mencegah Inflasi 3.Menambah peluang PAD setempat	SHEK dan monitoring dalam meningkatkan , mendorong pendapatan dan perekonomian	Sinkronisasi , Koordinasi	Menambah potensi pendapatan asli daerah dan Sebagai pondasi awal dalam meningkatkan perekonomian, masyarakat setempat dan mencegah terjadinya kemiskinan ekstrim dan inflasi yang tinggi di Provinsi

								masyara kat OAP sesuai dengan RIPP, RAPP dan RAP		
30	Papua Produktif	Program MBG	Rapat, Audensi dan kunjungan	Kantor perwakilan BGN, Kepala dapur BGN, Perindagkop, Dinas Pertanian, dinas kesehatan, dinas Pendidikan dan kebudayaan dan anggota Koperasi.	Bulan Januari S/d Desemb er 2026	Ruang Rapat masing- masing dinas, Ruang rapat BP3OKP dan dilapangan	1. Menunjang, Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat OAP 2. Mencegah Inflasi 3. Menambah peluang PAD setempat	SHEK dan monitori ng dalam meningk atkan , mendoro ng pendapa tan dan perekon omian masyara kat OAP sesuai dengan RIPP, RAPP dan RAP	Sinkronisasi , Koordinasi	Menambah potensi pendapatan asli daerah dan Sebagai pondasi awal dalam meningkatkan perekonomian, masyarakat setempat dan mencegah terjadinya kemiskinas ektrim dan inflasi yang tinggi di Provinsi
31	Papua Produktif	Program Pendukung n Lingkungan Hidup	Rapat, Audensi dan kunjungan	Dinas LHPK dan Dinas PUPR.	Bulan Januari S/d Desemb er 2026	Ruang Rapat masing- masing dinas, Ruang rapat BP3OKP dan dilapangan	1. Menunjang, Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat OAP 2. Mencegah Inflasi 3. Menambah peluang PAD setempat	SHEK dan monitori ng dalam meningk atkan , mendoro ng pendapa tan dan perekon omian masyara kat OAP	Sinkronisasi , Koordinasi	Menambah potensi pendapatan asli daerah dan Sebagai pondasi awal dalam meningkatkan perekonomian, masyarakat setempat dan mencegah terjadinya kemiskinas ektrim dan inflasi yang tinggi di Provinsi

								sesuai dengan RIPP, RAPP dan RAP		
32	Papua Produktif	Penataan Tanah adat Dan Ulayat	Rapat, Audensi dan kunjungan	Dinas LHPK, Tokoh adat, Tokoh Agama, pejabat Pemerintah dan masyarakat setempat.	Bulan Januari S/d Desember 2026	Ruang Rapat masing-masing dinas, Ruang rapat BP3OKP dan dilapangan	1. Menunjang, Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat OAP 2. Mencegah Inflasi 3. Menambah peluang PAD setempat	SHEK dan monitoring dalam meningkatkan, mendorong pendapatan dan perekonomian masyarakat OAP sesuai dengan RIPP, RAPP dan RAP	Sinkronisasi, Koordinasi	Menambah potensi pendapatan asli daerah dan Sebagai pondasi awal dalam meningkatkan perekonomian, masyarakat setempat dan mencegah terjadinya kemiskinan ektrim dan inflasi yang tinggi di Provinsi
33	Papua Produktif	(Penetapan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi) 1. Mendorong munculnya atlet-atlet muda prestasi 2. Segera Terbentuknya Cabor dan atlet harus ada. 3. Mendorong	Rapat, Audensi dan kunjungan	Dinas Dispora, Ketua KONI, Ketua POPSI, Ketua SPOPNAS dan Ketua Cabor.	Bulan Januari S/d Desember 2026	Ruang Rapat masing-masing dinas, Ruang rapat BP3OKP dan dilapangan	1. Menunjang, Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat OAP 2. Mencegah Inflasi 3. Menambah peluang PAD setempat	SHEK dan monitoring dalam meningkatkan, mendorong pendapatan dan perekonomian masyarakat OAP sesuai dengan	Sinkronisasi, Koordinasi	Menambah potensi pendapatan asli daerah dan Sebagai pondasi awal dalam meningkatkan perekonomian, masyarakat setempat dan mencegah terjadinya kemiskinan ektrim dan inflasi yang tinggi di Provinsi

		Ivent Turnamen/kejuaraan						RIPP, RAPP dan RAP		
34	Papua Produktif	(Membangun Papua Pegunungan Menuju Pusat Ekonomi Baru Di Kawasan Pasifik provinsi) 1.Meningkatkan produk unggulan local seperti Kopi, nenas dan Buah merah. 2.Membangun Karya seni dan budaya dengan kearifan local khas papua. 3. Mendorong pertukaran seni dan budaya lewat pameran/festival dan kunjungan.	Rapat, Audensi dan kunjungan	Dinas Pertanian, Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi, Dinas Parekraf, Dinas Pindidikan kebudayaan, Biro Perekonomian dan pelaku Usaha.	Bulan Januari S/d Desember 2026	Ruang Rapat masing-masing dinas, Ruang rapat BP3OKP dan dilapangan	1.Menunjang, Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat OAP 2.Mencegah Inflasi 3.Menambah peluang PAD setempat	SHEK dan monitoring dalam meningkatkan , mendorong pendapatan dan perekonomian masyarakat OAP sesuai dengan RIPP, RAPP dan RAP	Sinkronisasi , Koordinasi	Menambah potensi pendapatan asli daerah dan Sebagai pondasi awal dalam meningkatkan perekonomian, masyarakat setempat dan mencegah terjadinya kemiskinas ektrim dan inflasi yang tinggi di Provinsi
35	Papua Produktif	(Penguatan Dan Pengembangan Seni Dan Budaya Lokal) 1.Mendorong dan meningkatka	Rapat, Audensi dan kunjungan	Dinas pendidikan kebudayaan, Dinas PAREKRAF, pelaku seni dan pelaku	Bulan Januari S/d Desember 2026	Ruang Rapat masing-masing dinas, Ruang rapat BP3OKP dan dilapangan	1.Menunjang, Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat OAP 2.Mencegah Inflasi	SHEK dan monitoring dalam meningkatkan , mendorong	Sinkronisasi , Koordinasi	Menambah potensi pendapatan asli daerah dan Sebagai pondasi awal dalam meningkatkan perekonomian, masyarakat setempat dan mencegah terjadinya kemiskinas

		n kegiatan pentas seni dan budaya sebagai ajang rutinitas 2. Memberi kesempatan kepada talenta muda papua untuk berkreasi lewat seni dan budaya.		usaha Budaya Lokal.			3. Menambah peluang PAD setempat	pendapatan dan perekonomian masyarakat OAP sesuai dengan RIPP, RAPP dan RAP		ekstrem dan inflasi yang tinggi di Provinsi
36	Papua Polhukam	Rapat Sinkronisasi Penanganan Konflik Sosial	Rapat	Pokja Papua Polhukam, TNI/Polri	Februari 2026	Jayawijaya	Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah	SHEK	Koordinasi	Dokumen Rekomendasi
37	Papua Polhukam	Koordinasi Penegakan Hukum Berbasis Kearifan Lokal	Rapat Koordinasi	Pokja Papua Polhukam dan Aparat Penegak Hukum	Mei 2026	Papua Pegunungan	Memperkuat penegakan hukum daerah	SHEK	Koordinasi	Kesepakatan Bersama
38	Papua Polhukam	Monitoring Stabilitas Politik Daerah	Monitoring	Pokja Polhukam	Januari-Desember	Papua Pegunungan	Menjaga stabilitas politik daerah	SHEK	Evaluasi	Laporan Monitoring

BAB III

PENUTUP

Penerapan Otonomi Khusus di Papua telah memasuki tahap baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan didukung oleh pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Tugas utama BPP mencakup sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan di Papua. Selain berfokus pada pembangunan fisik dan kesejahteraan, BPP juga berkomitmen memastikan partisipasi aktif masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan menjembatani kebutuhan mereka dengan kebijakan pemerintah pusat. Di bawah rencana induk yang terukur melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2023, BPP berperan penting dalam mengarahkan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Otsus Papua.

Dengan adanya BPP yang memiliki wewenang dan struktur yang jelas, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk yang telah disusun hingga tahun 2041. Kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat Papua sangat diperlukan agar pelaksanaan Otsus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat Papua. Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ini untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, damai, dan produktif.

Kegiatan yang di rencanakan oleh Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan di harapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dengan adanya Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Pegunungan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi untuk memajukan Papua Pegunungan



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP) PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025**



TIM PENYUSUN

BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pengarah	:	Hantor Matuan, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Polhukam	:	Fransiscus Elosak, SE, MM.
Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas	:	Paul Wetipo, S.Pd
Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat	:	Gaad Piranid Tabuni, SP., M.M.
Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif	:	Yoyo Iwik Sriyoto, S, Sos., M.Si
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Meisly Mariana Kombong, S.AP.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Otniel Elokpere, S.Pd.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Teo Aprianus Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA	1
TIM PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Ringkasan Kelembagaan	5
1.3.1 Definisi	5
1.3.2 Struktur Kelembagaan	6
1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan	6
1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja	7
BAB II	8
2.1 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan Januari 2025	8
2.2 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan Februari 2025	10
2.3 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan Maret 2025	12
2.4 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan April 2025	14
2.5 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan Mei 2025	17
2.6 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan Juni 2025	19
2.8 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan Agustus 2025	21
2.9 CAPAIAN KINERJA BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN BULAN SEPTEMBER 2025	24
2.10 CAPAIAN KINERJA BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN BULAN OKTOBER 2025	25
2.11 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan November 2025	27
2.12 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan Desember 2025	30
BAB V	33
PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi khusus dilaksanakan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Otonomi Khusus di Papua telah memasuki babak baru. Setelah berjalan 20 tahun, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan pada Pasal 68A bahwa perlu dibentuk badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Dalam menjalankan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP).

Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan SHEK dalam pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta satu orang Perwakilan OAP dari setiap Provinsi Papua DOB Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu dalam pelaksanaannya, akan dibantu pula oleh Sekretaris Eksekutif di Jakarta dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berlokasi di Papua, Kelompok Kerja, serta Kelompok Ahli. Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi.

Arah percepatan pembangunan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana induk tersebut memuat berbagai target dengan capaian dan dampak yang terukur. Agar pelaksanaan tugas BPP dapat sejalan dengan rencana induk, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja BPP. Rencana kegiatan dan program kerja ini memuat Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan ringkasan kelembagaan, Bab II yang terdiri atas target outcome, rencana kegiatan dan program kerja, serta Bab III Penutup. Rencana kegiatan dan program kerja menjadi acuan bagi Badan Pengarah Papua, khususnya bagi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas SHEK percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;

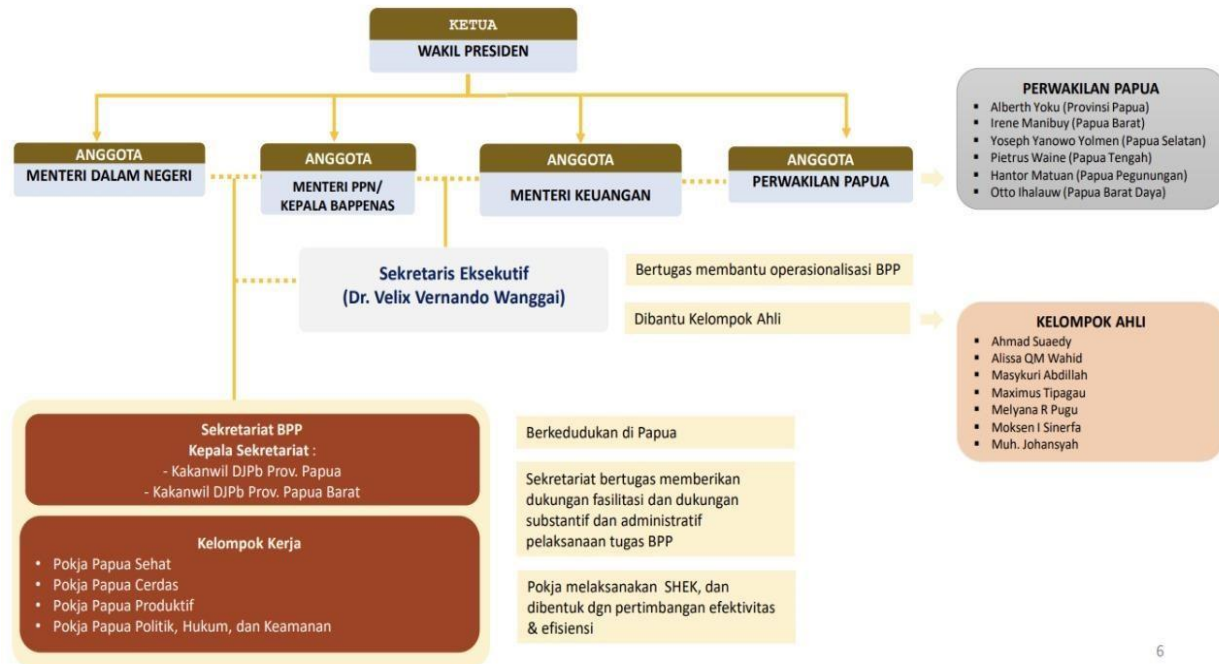
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
7. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;
8. Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Pembidangan Tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
9. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-3/SETBPP/JYP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-1/SET/JYP/2025 tentang Penetapan Tim Dukungan Administratif dan Tim Dukungan Substantif Sekretariat Badan Pengarah Papua.

1.3 Ringkasan Kelembagaan

1.3.1 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.3.2 Struktur Kelembagaan



6

1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
 - e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

- a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lem.baga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Koordinasi dan kerja sarna dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. Membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota" dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- f. Menyusun laporan kelompok kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.

BAB II

2.1 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan Januari 2025

a. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Pada Bulan Januari 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan kegiatan awal tahun yang difokuskan pada konsolidasi kelembagaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengawalan kebijakan strategis pemerintahan daerah dalam rangka percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Pelaksanaan kegiatan diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), khususnya dalam mendukung stabilitas pemerintahan, penanganan isu strategis pembangunan manusia, penguatan regulasi daerah, serta penataan mekanisme politik dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan.

b. Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan.

Pada Bulan Januari 2025, Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

Pertemuan Internal Anggota BP3OKP dan Pokja Provinsi Papua Pegunungan Pada Jumat, 3 Januari 2025, dilaksanakan pertemuan internal antara Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan dan Anggota Pokja dalam rangka pengusulan bahan Rapat Koordinasi (Rakor). Pertemuan ini dipimpin oleh Anggota Badan Pengarah, Hantor Matuan, S.IP., dan bertujuan untuk menginventarisasi serta mengusulkan isu-isu strategis prioritas melalui pengisian matriks yang disiapkan oleh Asisten Deputi III Sekretariat Wakil Presiden.

Hasil pertemuan ini menghasilkan usulan isu strategis yang mencakup bidang Papua Sehat (penanganan stunting), Papua Cerdas (pengembangan Indeks Pembangunan Manusia), Papua Produktif (penanganan kemiskinan ekstrem), Papua Polhukam (Papua Damai), serta isu umum pembangunan Provinsi Papua Pegunungan seperti pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan infrastruktur konektivitas antar kabupaten.

Partisipasi dalam Kegiatan Ibadah Natal 2024 dan Lepas Sambut Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan BP3OKP turut berpartisipasi dalam kegiatan Ibadah Perayaan Natal 2024 dan Lepas Sambut Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2025 di Gedung Aouthousa Betlehem Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, TNI, POLRI, tokoh agama, serta masyarakat.

Partisipasi BP3OKP dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kehidupan sosial yang harmonis di Provinsi Papua Pegunungan, serta mendukung pembangunan karakter dan spiritual masyarakat sebagai modal sosial pembangunan daerah.

Serah Terima Berkas Calon Anggota DPRD Jalur Otonomi Khusus Pada tanggal 15 Januari 2025, BP3OKP menghadiri kegiatan serah terima berkas calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan melalui mekanisme pengangkatan Orang Asli Papua (OAP) masa jabatan 2024–2029 yang dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawalan proses politik daerah agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip transparansi. Berkas calon anggota DPRD yang diserahkan oleh Dinas Kesbangpol diterima secara resmi oleh Panitia Seleksi dan dinyatakan lengkap serta tepat waktu.

Pendampingan Proses Verifikasi dan Validasi Berkas Calon Anggota DPRD OAP BP3OKP turut terlibat dalam kegiatan verifikasi dan validasi berkas calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan melalui mekanisme pengangkatan OAP masa jabatan 2024–2029 yang dilaksanakan pada tanggal 20–22 Januari 2025 di Hotel Pilamo, Wamena.

Keterlibatan BP3OKP bertujuan untuk memastikan proses seleksi berjalan sesuai ketentuan hukum, transparan, dan akuntabel, sebagai bagian dari penguatan tata kelola politik dan pemerintahan daerah di Provinsi Papua Pegunungan.

Rapat Konsolidasi Teknis Kelembagaan BP3OKP
Pada tanggal 22 Januari 2025, BP3OKP mengikuti rapat Konsolidasi Teknis Kelembagaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dilaksanakan secara daring. Rapat ini membahas penguatan kelembagaan BP3OKP, termasuk usulan prioritas kebijakan, dukungan operasional, serta fokus percepatan pembangunan Papua pada sektor ketahanan pangan, ketahanan energi, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

c. Capaian Kinerja Pokja Papua Polhukam

Pada Bulan Januari 2025, Pokja Papua Polhukam berkontribusi dalam pengawalan proses politik daerah melalui keterlibatan dalam rangkaian kegiatan serah terima, verifikasi, dan validasi berkas calon anggota DPRD jalur Otonomi Khusus. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, menjamin proses yang demokratis dan berkeadilan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Papua Pegunungan.

d. Capaian Kinerja Pokja Papua Sehat

Pokja Papua Sehat melaksanakan pertemuan koordinasi bersama Badan Gizi Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan, dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 7 Januari 2025. Pertemuan ini membahas perencanaan penanganan stunting melalui pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil, bayi balita, dan anak usia dini di delapan kabupaten Provinsi Papua Pegunungan.

Hasil pertemuan menghasilkan kesepakatan kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan program pemberian makanan bergizi gratis sebagai upaya strategis penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

e. Capaian Kinerja Pokja Papua Cerdas

Pada Bulan Januari 2025, Pokja Papua Cerdas berpartisipasi dalam pertemuan penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Provinsi Papua Pegunungan bersama Tim Penyusun, Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Gubernur Terpilih Provinsi Papua Pegunungan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan regulasi daerah yang disusun selaras dengan kebijakan nasional serta mendukung pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Pegunungan.

f. Capaian Kinerja Pokja Papua Produktif

Pokja Papua Produktif melaksanakan kegiatan kunjungan sosial dan pemberian makanan bergizi gratis di beberapa panti asuhan di Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 22–23 Januari 2025, dalam rangka memperingati HUT Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) ke-6.

Kegiatan ini bertujuan mendukung penanganan stunting serta memperkuat kepedulian sosial dan peran ekonomi kreatif dalam pembangunan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan BP3OKP, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan, Sekretariat Daerah Provinsi, serta pengelola panti asuhan.

g. Kesimpulan Bulan Januari 2025

Secara umum, pelaksanaan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan pada Bulan Januari 2025 menunjukkan penguatan fondasi kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, penanganan isu strategis pembangunan manusia, serta pengawalan proses politik daerah yang transparan dan akuntabel.

2.2 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan Februari 2025

a. Gambaran Umum Capaian Bulan Februari

Pada bulan Februari 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan koordinasi kelembagaan, pengawalan proses demokrasi daerah, sinkronisasi program pembangunan lintas sektor, serta penguatan peran Pokja sesuai dengan misi Papua Damai, Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada bulan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP dalam melakukan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Pegunungan.

b. Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Sepanjang bulan Februari 2025, Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan serangkaian kegiatan koordinatif dan evaluatif yang berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan, penganggaran, serta pengawalan proses seleksi DPRP jalur Otonomi Khusus.

Kegiatan diawali dengan rapat internal melalui zoom meeting bersama enam anggota BP3OKP yang membahas kebutuhan kelembagaan dan pengalokasian anggaran bagi masing-masing Pokja. Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi serta memastikan efektivitas pelaksanaan program BP3OKP di tingkat provinsi.

Selain itu, BP3OKP turut aktif dalam rangkaian kegiatan Panitia Seleksi DPRP Papua Pegunungan mekanisme pengangkatan OAP, mulai dari rapat koordinasi teknis, seleksi berkas, penetapan jadwal tahapan seleksi, hingga pelaksanaan tes tertulis, tes penyusunan makalah, dan tes wawancara. Seluruh tahapan seleksi berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BP3OKP juga berperan dalam mengawal dinamika sosial di wilayah Papua Pegunungan dengan menghadiri serta menerima aspirasi siswa/siswi yang menyampaikan penolakan

terhadap program makan bergizi gratis. Aspirasi tersebut diterima secara terbuka oleh Pemerintah Provinsi bersama BP3OKP untuk selanjutnya dibahas dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Pada akhir bulan, BP3OKP menghadiri kegiatan penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan terpilih periode 2025–2030 oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan, sebagai bagian dari dukungan terhadap proses demokrasi dan transisi kepemimpinan daerah. Selain itu, BP3OKP turut melakukan koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Jayawijaya terkait kesiapan pelantikan serentak nasional.

c. Capaian Kinerja Pokja Papua Polhukam

Pokja Papua Polhukam pada bulan Februari 2025 melaksanakan kegiatan yang berfokus pada penguatan peran kelembagaan BP3OKP serta pengawalan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah zoom meeting bimbingan teknis penguatan peran dan fungsi Pokja BP3OKP yang membahas kebijakan tata kelola dana Otsus Papua serta peran strategis BP3OKP dalam percepatan pembangunan.

Selain itu, Pokja Papua Polhukam turut berperan aktif dalam mengawal jalannya aksi demonstrasi damai siswa/siswi yang menolak program makan bergizi gratis. Kegiatan pengawalan dilakukan secara koordinatif bersama aparat keamanan dan pemerintah daerah sehingga aksi demonstrasi dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif tanpa menimbulkan gangguan keamanan.

d. Capaian Kinerja Pokja Papua Produktif

Pada bulan Februari 2025, Pokja Papua Produktif melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi sumber daya manusia di Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi partisipasi dalam Rapat Kerja Nasional KONI dan cabang olahraga Taekwondo guna mendorong kolaborasi dalam persiapan kejuaraan nasional dan internasional.

Selain itu, Pokja Papua Produktif juga mengikuti Rakernas pembentukan program pembangunan bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Mutiaa Cendikia Nusantara, sebagai bentuk dukungan terhadap sinergi program pembangunan lintas sektor.

Pokja Papua Produktif turut berperan dalam kegiatan keagamaan dan sosial ekonomi, seperti Tabligh Akbar dan sosialisasi peningkatan ekonomi keumatan bagi umat Muslim di Kabupaten Jayawijaya, serta diskusi bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan lembaga-lembaga zakat tingkat nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penguatan ekonomi umat, pengembangan UMKM, serta optimalisasi peran zakat, infaq, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Capaian Kinerja Pokja Papua Cerdas

Pokja Papua Cerdas pada bulan Februari 2025 melaksanakan kegiatan strategis dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan utama meliputi pertemuan dengan Gubernur Papua Pegunungan terpilih dan Bupati terpilih Kabupaten Jayawijaya guna membahas dan menyinkronkan program kerja Pokja Papua Cerdas.

Selain itu, Pokja Papua Cerdas melakukan koordinasi dengan trainer dan staf Prof. Yohanes Surya terkait program Gasing, sebagai langkah awal peningkatan kualitas guru dan pembelajaran di tingkat sekolah dasar, khususnya di Kabupaten Mamberamo Tengah, Nduga, dan Tolikara. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di wilayah Papua Pegunungan.

f. Capaian Kinerja Pokja Papua Sehat

Pada bulan Februari 2025, Pokja Papua Sehat melaksanakan kegiatan sinkronisasi dan pendataan terkait isu kesehatan, khususnya penanganan stunting dan peningkatan indikator pembangunan manusia. Kegiatan meliputi pengambilan data kasus stunting tahun 2024 di delapan kabupaten, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan, serta konsultasi dan diskusi dengan Bupati terpilih Kabupaten Jayawijaya terkait tugas dan fungsi BP3OKP.

Selain itu, Pokja Papua Sehat juga melakukan koordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya untuk memperoleh data prevalensi stunting, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta Angka Harapan Hidup (AHH). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat basis data perencanaan program kesehatan dan pembangunan manusia di Provinsi Papua Pegunungan.

g. Kesimpulan Capaian Bulan Februari 2025

Secara umum, pelaksanaan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan pada bulan Februari 2025 berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas serta fungsi kelembagaan. Fokus kegiatan pada bulan ini menunjukkan peran aktif BP3OKP dalam penguatan koordinasi kelembagaan, pengawalan proses demokrasi daerah, penanganan isu sosial strategis, serta sinkronisasi program pembangunan lintas sektor melalui masing-masing Pokja. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Pegunungan secara berkelanjutan.

2.3 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan Maret 2025

a. Gambaran Umum Capaian Bulan Maret

Pada bulan Maret 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan harmonisasi sosial-keagamaan, pengawalan kebijakan Otonomi Khusus, penguatan ketahanan sosial masyarakat, serta peningkatan peran ekonomi, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Kegiatan pada bulan ini juga banyak beririsan dengan momentum Bulan Suci Ramadhan, sehingga pelaksanaan program diarahkan untuk memperkuat toleransi, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat lintas agama di Provinsi Papua Pegunungan.

b. Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Pada bulan Maret 2025, Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan harmonisasi sosial, koordinasi pemerintahan, serta pengawalan program strategis nasional dan daerah.

Kegiatan diawali dengan kehadiran Anggota BP3OKP dalam pembukaan Papua Pegunungan Ramadhan Festival 2025 dan Launching Wamena Digital Space yang dilaksanakan di Halaman Mall Wamena. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan Wamena Digital Space sebagai pusat inovasi digital serta mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif. Festival Ramadhan yang berlangsung selama 15 hari ini berhasil menarik antusiasme masyarakat lintas agama dan menjadi ruang kolaborasi seni,

budaya, serta ekonomi lokal melalui keterlibatan lebih dari 30 musisi etnik Papua Pegunungan dan pelaku UMKM.

Selain itu, BP3OKP turut mengawal proses demokrasi daerah melalui kegiatan Penyerahan Hasil Penetapan Calon Anggota DPRD Jalur Otsus dari Panitia Seleksi kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Sekretaris Daerah. Kegiatan ini memastikan proses seleksi berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka mendukung program prioritas nasional, BP3OKP juga melaksanakan Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis dan Pembinaan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Kabupaten Jayawijaya. Dalam kegiatan ini, BP3OKP menegaskan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi petani lokal serta mama-mama Papua melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selanjutnya, BP3OKP turut berpartisipasi dalam Talk Show Ramadhan dan Buka Puasa Bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis kearifan lokal, toleransi, dan persaudaraan antarumat beragama sebagai fondasi pembangunan Papua Pegunungan.

BP3OKP juga melakukan koordinasi lintas kelembagaan melalui pertemuan bersama Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, Bupati Kabupaten Jayawijaya, serta Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi, menyamakan persepsi terkait tugas dan fungsi BP3OKP, serta mempersiapkan agenda sosialisasi BP3OKP dan Pokja di tingkat daerah.

Selain itu, BP3OKP bersama Pokja terkait melaksanakan Sosialisasi Bahaya Miras, Lem Aibon, dan Narkoba bagi anak-anak dan remaja di Rumah Singgah Yayasan GAP Wamena. Kegiatan ini menegaskan komitmen BP3OKP dalam menjaga masa depan generasi muda Papua Pegunungan melalui pendekatan edukatif dan pembinaan karakter.

c. Capaian Kinerja Pokja Papua Polhukam

Pokja Papua Polhukam pada bulan Maret 2025 berfokus pada upaya pencegahan dan pembinaan sosial dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah sosialisasi bahaya miras, lem aibon, dan narkoba bagi anak-anak dan remaja di Rumah Singgah Yayasan GAP Wamena.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif serta mendorong mereka untuk tetap melanjutkan pendidikan dan menjauhi perilaku menyimpang. Melalui pendekatan edukatif dan dialogis, Pokja Papua Polhukam menegaskan pentingnya peran pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial dalam membentuk generasi Papua Pegunungan yang sehat, disiplin, dan berkualitas.

d. Capaian Kinerja Pokja Papua Produktif

Pada bulan Maret 2025, Pokja Papua Produktif melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang mendukung penguatan ekonomi kreatif, olahraga, dan pengembangan talenta muda di Provinsi Papua Pegunungan.

Kegiatan diawali dengan rapat persiapan Papua Pegunungan Ramadhan Festival dan Peluncuran Digital Space bersama Pemerintah Provinsi dan berbagai mitra strategis, termasuk GEKRAFS, MUI, paguyuban masyarakat, perguruan tinggi, dan Dewan Kesenian Daerah. Kolaborasi ini bertujuan memastikan suksesnya penyelenggaraan festival yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif, seni, dan budaya.

Pokja Papua Produktif juga berperan aktif dalam pelaksanaan Festival Ramadhan dan Peluncuran Digital Space yang berlangsung selama 2–15 Maret 2025. Kegiatan ini berhasil mendorong perputaran ekonomi lokal, membuka ruang ekspresi bagi talenta

muda, memperkuat toleransi antarumat beragama, serta menyediakan layanan WiFi gratis sebagai bentuk transformasi digital ruang publik.

Selain itu, Pokja Papua Produktif mengikuti Zoom Meeting KONI Pusat terkait sosialisasi dan pelaksanaan vaksinasi Hepatitis A bagi atlet usia di bawah 16 tahun. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesehatan atlet muda berprestasi serta memastikan atlet Papua Pegunungan memperoleh hak dan perlakuan yang setara secara nasional.

Pokja Papua Produktif juga turut mengawal pelaksanaan Pertandingan Liga 4 Indonesia ASPROV PSSI Papua Pegunungan, yang menjadi momentum kebangkitan sepak bola di Papua Pegunungan setelah vakum selama lebih dari satu dekade. Kegiatan ini membuka ruang pembinaan atlet muda berbakat dan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan olahraga prestasi.

e. Capaian Kinerja Pokja Papua Cerdas

Pada bulan Maret 2025, Pokja Papua Cerdas tidak melaksanakan kegiatan operasional. Namun demikian, Pokja tetap melakukan pemantauan dan persiapan internal untuk pelaksanaan program pendidikan pada bulan-bulan berikutnya dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua Pegunungan.

f. Capaian Kinerja Pokja Papua Sehat

Pokja Papua Sehat pada bulan Maret 2025 melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, penanganan stunting, serta penguatan pendidikan dan gizi anak.

Kegiatan meliputi kehadiran dalam peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja yang dirangkaikan dengan sosialisasi pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga anak tumbuh dewasa. Pokja Papua Sehat menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia dimulai dari peran keluarga dalam memastikan asupan gizi yang seimbang. Selain itu, Pokja Papua Sehat menghadiri penandatanganan MoU Pusat Pengembangan Anak (PPA) di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKI), yang menjadi langkah awal pembinaan anak-anak melalui pendekatan pendidikan, kesehatan, dan karakter.

Pokja Papua Sehat juga melakukan kunjungan susulan ke Yayasan Generasi Anak Panah dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan untuk melakukan evaluasi kondisi kesehatan masyarakat, termasuk isu stunting, angka kematian ibu dan balita, pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, dan Posyandu, serta pengelolaan sistem jaminan kesehatan nasional.

Di akhir bulan, Pokja Papua Sehat mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis Outcome Based Education (OBE) guna mendorong pengembangan pendidikan tinggi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan kebutuhan pembangunan daerah.

g. Kesimpulan Capaian Bulan Maret 2025

Secara keseluruhan, capaian kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan pada bulan Maret 2025 menunjukkan peran aktif kelembagaan dalam menjaga harmonisasi sosial, mendukung program strategis nasional, memperkuat ekonomi kreatif, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta mengawal pembinaan generasi muda. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif dan selaras dengan tugas dan fungsi BP3OKP dalam rangka percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Pegunungan.

2.4 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan April 2025

a. Gambaran Umum Capaian Bulan April

Pada bulan April 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada penguatan harmonisasi sosial-keagamaan, penyelesaian persoalan aset

daerah, peningkatan koordinasi kelembagaan, penguatan ekonomi kreatif, pembinaan olahraga prestasi, serta pengembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Seluruh kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Pegunungan secara berkelanjutan dan inklusif.

b. Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Pada bulan April 2025, Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang berkaitan dengan harmonisasi kehidupan sosial-keagamaan, koordinasi pemerintahan, serta penguatan tata kelola kelembagaan.

Kegiatan diawali dengan kehadiran Anggota BP3OKP dalam Ibadah Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua ke-71 yang dilaksanakan di Sapalek, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya harmonisasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam membangun kehidupan masyarakat Papua Pegunungan yang damai dan berlandaskan nilai-nilai spiritual. Dalam ibadah tersebut, disampaikan berbagai pesan moral yang menekankan pentingnya pemberantasan miras, narkoba, dan perilaku menyimpang, serta ajakan untuk membangun Papua Pegunungan melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Kehadiran BP3OKP menegaskan komitmen pemerintah sebagai mitra gereja dan masyarakat dalam menciptakan suasana aman, damai, dan kondusif.

Selanjutnya, Anggota BP3OKP melaksanakan pertemuan bersama masyarakat Distrik Napua terkait klarifikasi dan penyelesaian persoalan lokasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya. Pertemuan ini bertujuan untuk membuka ruang dialog antara pemerintah, kepala suku, masyarakat hak ulayat, dan pihak-pihak yang melakukan aktivitas di atas lahan tersebut. Dari hasil pertemuan, teridentifikasi adanya perbedaan pandangan terkait status sertifikat tanah, sehingga disepakati perlunya tindak lanjut melalui pelaporan kepada Bupati Kabupaten Jayawijaya guna mendapatkan penyelesaian yang adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan juga berpartisipasi dalam Seminar Sehari Pelayanan Anak dan Remaja Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua yang dilaksanakan di Pyramid, Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini bertujuan memberikan penyegaran rohani dan pembinaan karakter kepada anak-anak dan remaja dari 31 jemaat Klasis Balim Tengah. Melalui kegiatan ini, BP3OKP mendorong pembentukan generasi muda Papua Pegunungan yang berkarakter, beriman, dan memiliki orientasi hidup yang positif.

Selain itu, BP3OKP melaksanakan Rapat Rutin Koordinasi Teknis Sekretariat DOB KPPN Wamena bersama BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan. Rapat ini bertujuan memperkuat koordinasi internal serta meningkatkan sinergi dalam pengelolaan administrasi dan pemanfaatan anggaran agar dapat mendukung pelaksanaan program kerja BP3OKP dan Pokja sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disusun.

c. Capaian Kinerja Pokja Papua Polhukam

Pada bulan April 2025, Pokja Papua Polhukam tidak melaksanakan kegiatan operasional. Namun demikian, Pokja tetap melakukan pemantauan situasi dan kesiapan internal sebagai bagian dari fungsi pengawalan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan.

d. Capaian Kinerja Pokja Papua Produktif

Pada bulan April 2025, Pokja Papua Produktif melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada penguatan ekonomi kreatif, optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembinaan olahraga prestasi.

Kegiatan diawali dengan audiensi bersama pelaku usaha ekonomi kreatif kopi Wamena yang telah mengikuti pameran kopi internasional di Australia. Audiensi ini menghasilkan kesepakatan bahwa kopi Wamena memiliki daya saing di pasar internasional, sekaligus mengidentifikasi tantangan ketersediaan bahan baku kopi untuk memenuhi potensi ekspor. Pokja Papua Produktif mendorong perlunya intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kopi di seluruh Provinsi Papua Pegunungan melalui koordinasi lintas perangkat daerah.

Selanjutnya, Pokja Papua Produktif melaksanakan harmonisasi dan inspeksi ke sekolah-sekolah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kendala pelaksanaan program, khususnya terkait koordinasi antar penyelenggara dapur MBG, sekolah, dan pemerintah daerah. Dari hasil kegiatan ini, disimpulkan perlunya peningkatan sinkronisasi dan kesiapan di seluruh lini agar program dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Pokja Papua Produktif juga menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan Program MBG Papua Pegunungan yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif Orang Asli Papua di bidang pertanian. Kegiatan ini bertujuan memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi peserta didik, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui penyediaan bahan pangan dari hasil kebun masyarakat.

Selain itu, Pokja Papua Produktif turut melaksanakan rapat koordinasi rencana Kejuaraan Nasional Taekwondo Papua Open 2025. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menjaring dan membina atlet muda Papua Pegunungan serta mensinkronkan peran pemerintah daerah, KONI, dan induk organisasi olahraga dalam persiapan kejuaraan nasional dan internasional.

e. Capaian Kinerja Pokja Papua Cerdas

Pada bulan April 2025, Pokja Papua Cerdas melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua.

Kegiatan utama meliputi rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Yayasan Cakra untuk membahas Program Sekolah Alam, Makan Bergizi, dan Pendidikan Life Skill yang terintegrasi dengan budaya lokal. Program ini telah berjalan dengan baik di beberapa lokasi di Kabupaten Jayawijaya dan mendapat respons positif dari masyarakat, sehingga direkomendasikan untuk direplikasi di wilayah lain di Provinsi Papua Pegunungan.

Pokja Papua Cerdas juga melakukan kunjungan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan belajar di Sekolah Alam Bakti Toleransi, sebagai bentuk dukungan moral dan motivasi bagi anak-anak agar terus bersemangat menempuh pendidikan demi masa depan Papua Pegunungan.

Selain itu, Pokja Papua Cerdas melaksanakan koordinasi dengan masyarakat pemilik wilayah Program Sekolah Alam di Putagaima Hetigima. Koordinasi ini bertujuan memastikan keamanan dan kesiapan lokasi agar kegiatan pendidikan dapat berjalan berkelanjutan tanpa menimbulkan konflik di kemudian hari.

f. Capaian Kinerja Pokja Papua Sehat

Pada bulan April 2025, Pokja Papua Sehat melaksanakan kegiatan yang berfokus pada penguatan data kependudukan Orang Asli Papua serta penanganan dampak bencana banjir di Kabupaten Jayawijaya.

Kegiatan diawali dengan rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya untuk membahas kebutuhan data penduduk OAP sebagai dasar perencanaan program kesehatan dan sosial. Dari hasil rapat ini, disepakati perlunya dukungan anggaran tambahan agar pelayanan perekaman data kependudukan dapat menjangkau distrik-distrik secara optimal.

Selain itu, Pokja Papua Sehat turut berpartisipasi dalam rapat Bupati Kabupaten Jayawijaya bersama perwakilan 17 denominasi gereja dalam rangka penanganan

bencana banjir. Kegiatan ini menegaskan peran kolaboratif antara pemerintah daerah, gereja, dan Pokja Papua Sehat dalam membantu korban bencana serta memperkuat solidaritas sosial masyarakat.

g. Kesimpulan Capaian Bulan April 2025

Secara keseluruhan, capaian kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan pada bulan April 2025 menunjukkan penguatan peran kelembagaan dalam menjaga harmonisasi sosial-keagamaan, menyelesaikan persoalan strategis daerah, meningkatkan koordinasi pemerintahan, memberdayakan ekonomi kreatif, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif dan berkontribusi langsung terhadap percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Pegunungan.

2.5 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan Mei 2025

a. Gambaran Umum Capaian Bulan April

Pada bulan Mei 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, serta evaluasi percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta kelompok kerja (Pokja) sesuai dengan bidang masing-masing.

b. Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Selama bulan Mei 2025, Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan sejumlah kegiatan yang berfokus pada penguatan koordinasi pemerintahan, evaluasi daerah otonom baru, konsolidasi kelembagaan, serta respon terhadap dinamika keamanan dan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri dan Ketua Tim Komisi II DPR RI beserta rombongan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 di kawasan Gunung Susu Taman Biologi LIPI dan Gereja Baptis Wesaroma, Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau langsung lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan sekaligus melakukan evaluasi terhadap perkembangan Daerah Otonom Baru. Melalui dialog dan pemaparan yang dilakukan, diperoleh gambaran mengenai capaian awal pemerintahan provinsi serta berbagai tantangan strategis yang perlu mendapat perhatian bersama, khususnya terkait inflasi daerah dan percepatan pembangunan.

Selanjutnya, pada tanggal 6 Mei 2025, Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 yang dilaksanakan di Hotel Pilamo, Wamena. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 agar selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Pegunungan (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Pegunungan (RAPPP). Dalam kegiatan ini ditekankan pentingnya sinkronisasi program prioritas antar perangkat daerah.

Pada tanggal 27 Mei 2025, dilaksanakan rapat internal Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan bersama Pokja guna membahas rencana pembangunan Koperasi Merah Putih di Provinsi Papua Pegunungan. Rapat ini menyoroti masih minimnya jumlah koperasi di wilayah Papua Pegunungan dan perlunya upaya konkret untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi. Hasil rapat menyepakati perlunya koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian terkait.

Selain itu, Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan juga mengikuti rapat rutin koordinasi teknis Sekretariat DOB KPPN Wamena pada tanggal 7–9 Mei 2025. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi kelembagaan dan memastikan pemanfaatan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan program kerja BP3OKP dan Pokja.

Menjelang akhir bulan, pada tanggal 30 Mei 2025, Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan menggelar pertemuan bersama tokoh masyarakat Kabupaten Nduga dalam rangka menanggapi insiden penembakan di RSUD Wamena. Pertemuan ini menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara adil, humanis, serta menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial di Wamena sebagai pusat aktivitas Provinsi Papua Pegunungan.

c. **Capaian Kinerja Pokja Papua Polhukam**

Pada bulan Mei 2025, Pokja Papua Polhukam melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terkait situasi keamanan pasca insiden penembakan. Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2025 di Kantor Bupati Jayawijaya bertujuan untuk menyampaikan hasil pertemuan antara BP3OKP dan masyarakat Kabupaten Nduga. Hasil pertemuan ini diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan disepakati perlunya pengawalan bersama agar situasi keamanan tetap kondusif serta masyarakat tidak mudah terprovokasi.

d. **Capaian Kinerja Pokja Papua Produktif**

Selama bulan Mei 2025, Pokja Papua Produktif melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada penguatan ekonomi, olahraga prestasi, serta pengembangan koperasi. Kegiatan pendampingan Kejuaraan Nasional Taekwondo Papua Open 2025 yang berlangsung pada tanggal 1–3 Mei 2025 di Jayapura bertujuan untuk menjaring dan mempersiapkan atlet berprestasi menghadapi ajang nasional dan internasional.

Pokja Papua Produktif juga melaksanakan sosialisasi usaha koperasi Gapensi Sulah Noken Wamena pada tanggal 6 Mei 2025 sebagai langkah awal menuju pembentukan Koperasi Merah Putih. Kegiatan ini mendorong penguatan usaha kelompok tani, peternakan, perikanan, dan usaha kecil masyarakat.

Selain itu, keikutsertaan dalam Rapat Kerja Nasional DMI dan penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah kementerian di Jakarta pada tanggal 17–19 Mei 2025 menjadi langkah strategis dalam mendorong sinergi pusat dan daerah guna meningkatkan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua Pegunungan.

e. **Capaian Kinerja Pokja Papua Cerdas**

Pada bulan Mei 2025, Pokja Papua Cerdas melaksanakan kegiatan rekonsiliasi data penerima Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) dalam dan luar negeri yang dilaksanakan pada tanggal 6–7 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran beasiswa tepat sasaran bagi Orang Asli Papua.

Selain itu, dilakukan pertemuan dengan tim Corban University terkait beasiswa mahasiswa Papua di Oregon, Amerika Serikat, serta koordinasi program percepatan pembangunan pendidikan di Sekolah Papua Harapan Wamena. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah di wilayah Papua Pegunungan.

f. **Capaian Kinerja Pokja Papua Sehat**

Pokja Papua Sehat pada bulan Mei 2025 melaksanakan audiensi dengan BPJS Kesehatan Cabang Wamena pada tanggal 2 Mei 2025 untuk memperkuat sinergi dalam peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Papua Pegunungan. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya terkait data kesehatan Orang Asli Papua serta tindak lanjut penanganan bencana banjir di Kabupaten Jayawijaya.

g. Kesimpulan Capaian Bulan Mei 2025

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan pada bulan Mei 2025 menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawalan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua secara terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan.

2.6 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan Juni 2025

a. Gambaran Umum Capaian Bulan Juni 2025

Pada bulan Juni 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, pengawalan implementasi kebijakan otonomi khusus, penguatan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas pendidikan Orang Asli Papua, serta penguatan layanan kesehatan masyarakat. Seluruh kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP dalam menjalankan peran sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi lintas sektor guna memastikan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan di Provinsi Papua Pegunungan.

b. Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Pada bulan Juni 2025, Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan memfokuskan kegiatan pada upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat pasca peristiwa penembakan di RSUD Wamena, penguatan peran BP3OKP dalam pengawalan kebijakan nasional terkait Otonomi Khusus Papua, serta penguatan koordinasi lintas lembaga pemerintah pusat dan daerah.

Upaya menjaga stabilitas keamanan dilakukan melalui pertemuan bersama tokoh masyarakat, kepala kampung, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta unsur intelektual di Distrik Napua. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas himbauan Bupati Kabupaten Jayawijaya dan menghasilkan komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sembilan kampung Distrik Napua. Kesepakatan tersebut meliputi penguatan pengawasan sosial berbasis kampung, termasuk pendataan penduduk baru melalui pengecekan identitas kependudukan guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Selain itu, Badan Pengarah turut mengambil peran sebagai penasehat dalam Rapat Kerja Ke-III Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Klasik Baliem Tengah Tahun 2025. Keterlibatan ini mendukung evaluasi pelayanan gereja tahun sebelumnya, penyusunan program pelayanan tahun berikutnya, serta pembentukan panitia Konferensi Gereja Kemah Injil Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan peran lembaga keagamaan dalam pembangunan sosial masyarakat.

Dalam lingkup nasional, Badan Pengarah bersama anggota BP3OKP se-Tanah Papua melaksanakan pertemuan dengan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Sekretariat Wakil Presiden RI. Pertemuan ini digunakan untuk menyampaikan situasi keamanan di enam provinsi Papua Raya, kondisi pengungsi Kabupaten Nduga di Papua Pegunungan, serta membahas perkembangan usulan anggota Pokja BP3OKP di daerah otonomi baru. Seluruh masukan diterima dengan baik dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan pemerintah pusat.

Badan Pengarah juga mengikuti pertemuan strategis bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang membahas penguatan tata kelola dana Otonomi Khusus, penguatan tugas dan fungsi BP3OKP, serta perlunya forum koordinasi lintas pemangku

kepentingan untuk memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan agenda pembangunan nasional di Tanah Papua berjalan optimal.

Di akhir bulan, Badan Pengarah melaksanakan pertemuan bersama pendaftar CPNS Provinsi Papua Pegunungan untuk menampung aspirasi terkait hasil seleksi CASN. Dalam forum ini ditegaskan komitmen BP3OKP untuk mengawal pemenuhan hak Orang Asli Papua sesuai kuota Otonomi Khusus melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

c. Capaian Kinerja Pokja Papua Polhukam

Pada bulan Juni 2025, Pokja Papua Polhukam tidak melaksanakan kegiatan khusus. Namun demikian, Pokja tetap berkoordinasi secara internal dan siap mendukung Badan Pengarah dalam penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat apabila dibutuhkan sesuai perkembangan situasi daerah.

d. Capaian Kinerja Pokja Papua Produktif

Pada bulan Juni 2025, Pokja Papua Produktif melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada penguatan ekonomi kreatif, pembinaan generasi muda, pengembangan koperasi, serta penguatan tata kelola olahraga dan kepemudaan di Provinsi Papua Pegunungan.

Kegiatan Pokja Papua Produktif diawali dengan audiensi bersama Dinas Dispora Parekras Provinsi Papua Pegunungan guna membangun sinergi pengembangan ekonomi kreatif di delapan kabupaten. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pendataan potensi ekonomi kreatif di tingkat kabupaten serta mendorong pembentukan kegiatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

Selain itu, Pokja Papua Produktif berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka perencanaan program penghijauan dan penanaman hutan produktif sebagai bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2025. Program ini diharapkan mampu mengintegrasikan aspek lingkungan dan ekonomi produktif masyarakat.

Pokja Papua Produktif juga melaksanakan pertemuan bersama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Jayawijaya untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengembangan usaha berbasis barang dan jasa, termasuk rintisan koperasi kampus. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan wirausaha muda di Papua Pegunungan.

Dalam bidang olahraga, Pokja Papua Produktif melakukan koordinasi dan audiensi bersama KONI Provinsi Papua Pegunungan dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan guna menyelesaikan permasalahan administrasi dan laporan pertanggungjawaban cabang olahraga, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana olahraga, termasuk dalam rangka pemeriksaan BPK.

Pada akhir bulan, Pokja Papua Produktif melakukan koordinasi lintas OPD dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Lanny Jaya untuk mendorong pembentukan pelaku usaha muda ekonomi kreatif serta memastikan penyaluran dana Otonomi Khusus berjalan tepat sasaran.

e. Capaian Kinerja Pokja Papua Cerdas

Pada bulan Juni 2025, Pokja Papua Cerdas memfokuskan kegiatan pada penguatan kerja sama internasional di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia Orang Asli Papua.

Kegiatan utama Pokja Papua Cerdas adalah pertemuan antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Kedutaan Australia di Jakarta. Dalam pertemuan ini, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan mempresentasikan program pendidikan daerah yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pertemuan ini berjalan baik dan menghasilkan kesepakatan untuk menjadwalkan

pembahasan lanjutan guna merumuskan bentuk kerja sama yang lebih teknis dan berkelanjutan.

f. Capaian Kinerja Pokja Papua Sehat

Pada bulan Juni 2025, Pokja Papua Sehat melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada penguatan layanan kesehatan, koordinasi lintas sektor, serta dukungan terhadap stabilitas sosial dan spiritual masyarakat.

Pokja Papua Sehat berpartisipasi dalam sosialisasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Dalam kegiatan ini disoroti perlunya pembentukan tim kerja MBG di tingkat provinsi dan kabupaten, pendataan sasaran yang akurat, serta peningkatan produksi bahan pangan lokal untuk mendukung keberlanjutan program.

Selain itu, Pokja Papua Sehat melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Pegunungan terkait sistem pembiayaan mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi kedokteran. Pertemuan ini mengidentifikasi kebutuhan pendataan mahasiswa yang valid dan penguatan pengawasan pemerintah terhadap mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di dalam dan luar negeri.

Pokja Papua Sehat juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya terkait ketersediaan fasilitas puskesmas, kekurangan tenaga kesehatan, serta penanganan HIV/AIDS. Hasil koordinasi ini menjadi dasar perencanaan penguatan layanan kesehatan primer dan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan di wilayah Jayawijaya.

Di bidang sosial dan keagamaan, Pokja Papua Sehat turut berpartisipasi dalam sosialisasi dan rekonsiliasi gereja-gereja di Kabupaten Jayawijaya sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana damai dan kondusif bagi pembangunan daerah.

g. Kesimpulan Capaian Bulan Juni 2025

Secara keseluruhan, capaian kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan pada bulan Juni 2025 menunjukkan penguatan peran strategis BP3OKP dan Pokja dalam menjaga stabilitas keamanan, mengawal implementasi kebijakan Otonomi Khusus, mendorong pengembangan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif, meningkatkan kualitas pendidikan Orang Asli Papua, serta memperkuat pelayanan kesehatan dan kohesi sosial masyarakat. Seluruh kegiatan tersebut berkontribusi langsung terhadap percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Papua Pegunungan.

2.8 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan Agustus 2025

a. Gambaran Umum Capaian Bulan Agustus 2025

Pada bulan Agustus 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka mendukung stabilitas pemerintahan daerah, penguatan tata kelola Otonomi Khusus Papua, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif, pelestarian budaya lokal, peningkatan kualitas pendidikan Orang Asli Papua, serta penguatan layanan kesehatan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua berjalan secara efektif, terarah, transparan, dan berkelanjutan di Provinsi Papua Pegunungan.

b. Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Pada bulan Agustus 2025, Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan memfokuskan kegiatan pada penguatan koordinasi kelembagaan, pengawalan kebijakan

nasional dan daerah, penguatan tata kelola Otonomi Khusus Papua, serta dukungan terhadap agenda pembangunan strategis pemerintah pusat dan daerah.

Kegiatan diawali dengan audiensi bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua dan Kepala KPPN Wamena bersama Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Pertemuan ini menjadi sarana memperkenalkan pejabat baru, menyampaikan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan negara, serta memperkuat sinergi antara BP3OKP, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Dalam pertemuan ini, BP3OKP menegaskan perannya sebagai lembaga sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pembangunan di delapan kabupaten.

Badan Pengarah juga melaksanakan kunjungan kerja ke Puskesmas Ilekma Distrik Napua untuk meninjau langsung kondisi pelayanan kesehatan yang terdampak konflik sosial dan keterbatasan sarana prasarana. Kunjungan ini menjadi bentuk kepedulian dan dukungan moral kepada tenaga kesehatan sekaligus komitmen BP3OKP untuk mengawal penyelesaian permasalahan layanan kesehatan di wilayah rawan.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur perumahan, Badan Pengarah berpartisipasi dalam rapat koordinasi persiapan pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri. Kegiatan ini membahas kesiapan teknis, tantangan geografis, serta komitmen pemerintah pusat dan daerah agar program pembangunan rumah layak huni berjalan optimal.

Badan Pengarah turut mengikuti rapat koordinasi pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola Otonomi Khusus Papua bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam forum ini ditekankan pentingnya reformasi birokrasi, transparansi pengelolaan anggaran, serta peningkatan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Selain itu, Badan Pengarah menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Papua Pegunungan sebagai wujud dukungan terhadap penguatan nasionalisme, persatuan, dan sinergi pembangunan daerah. Badan Pengarah juga mendampingi kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka meninjau pembangunan KIPP dan program perumahan rakyat.

Pada akhir bulan, Badan Pengarah melaksanakan rapat evaluasi kinerja Pokja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan guna mengevaluasi capaian kinerja, penyerapan anggaran, serta menyusun rencana kerja Pokja bulan berikutnya agar lebih terarah dan terukur.

c. Capaian Kinerja Pokja Papua Polhukam

Pada bulan Agustus 2025, Pokja Papua Polhukam melaksanakan kegiatan yang berfokus pada penguatan harmonisasi sosial, pelestarian budaya lokal, serta dukungan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan utama Pokja Papua Polhukam adalah keikutsertaan dalam Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) Tahun 2025 di Distrik Wosilimo, Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini menjadi sarana pelestarian budaya, penguatan identitas masyarakat adat, serta promosi budaya Papua Pegunungan kepada wisatawan lokal dan mancanegara.

Melalui kegiatan ini, Pokja Papua Polhukam turut mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan event budaya berskala nasional dan internasional, sekaligus memperkuat harmonisasi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya.

d. Capaian Kinerja Pokja Papua Produktif

Pada bulan Agustus 2025, Pokja Papua Produktif melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada penguatan ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, serta pembinaan olahraga dan kepemudaan di Provinsi Papua Pegunungan.

Kegiatan diawali dengan koordinasi persiapan Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) Tahun 2025 bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi dan Kabupaten Jayawijaya. Pokja berperan aktif dalam memastikan keterlibatan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM agar festival memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Pokja Papua Produktif juga terlibat dalam rapat koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat provinsi guna mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal, UMKM, dan kelompok tani dalam mendukung keberlanjutan program strategis nasional tersebut.

Selain itu, Pokja Papua Produktif berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem 2025, pembukaan destinasi wisata alam dan Tempat Belajar Huruf Soekarno di Maima, serta pameran pembangunan Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka HUT ke-80 RI. Kegiatan ini memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengembangkan ekonomi lokal berbasis budaya dan kearifan lokal.

Dalam bidang olahraga, Pokja Papua Produktif turut memfasilitasi pembentukan panitia PON Beladiri Tahun 2025 Kontingen Provinsi Papua Pegunungan sebagai upaya meningkatkan prestasi atlet sekaligus mendorong geliat industri olahraga daerah.

e. Capaian Kinerja Pokja Papua Cerdas

Pada bulan Agustus 2025, Pokja Papua Cerdas memfokuskan kegiatan pada penguatan pendidikan berkualitas bagi Orang Asli Papua melalui dukungan terhadap lembaga pendidikan unggulan.

Kegiatan utama Pokja Papua Cerdas adalah keikutsertaan dalam kegiatan Open House Sekolah Papua Harapan Wamena. Kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan sistem pendidikan, visi, dan metode pembelajaran sekolah yang berorientasi pada pembentukan karakter, peningkatan kualitas akademik, serta daya saing global anak-anak Papua Pegunungan.

Melalui kegiatan ini, Pokja Papua Cerdas mendorong terbangunnya dukungan pemerintah daerah, BP3OKP, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan pendidikan unggulan di wilayah Papua Pegunungan.

f. Capaian Kinerja Pokja Papua Sehat

Pada bulan Agustus 2025, Pokja Papua Sehat melaksanakan kegiatan yang berfokus pada penguatan layanan kesehatan, dukungan sosial kemasyarakatan, serta pembinaan spiritual masyarakat.

Pokja Papua Sehat terlibat dalam audiensi lintas sektor, kunjungan pelayanan kesehatan di Distrik Napua, serta berbagai kegiatan koordinatif yang mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Selain itu, Pokja Papua Sehat turut mendukung kegiatan pembinaan keagamaan dan pemuda melalui partisipasi dalam Ibadah Akbar Pemuda Koordinator Jayawijaya 13 Klasis sebagai bagian dari penguatan mental, spiritual, dan karakter generasi muda Papua Pegunungan.

g. Kesimpulan Capaian Bulan Agustus 2025

Secara keseluruhan, capaian kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan pada bulan Agustus 2025 menunjukkan penguatan peran strategis BP3OKP dan seluruh Pokja dalam mengawal implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat, mengembangkan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, meningkatkan kualitas pendidikan Orang Asli Papua, serta memperkuat layanan kesehatan dan kohesi sosial masyarakat.

Seluruh kegiatan tersebut berkontribusi secara langsung terhadap percepatan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Provinsi Papua Pegunungan.

2.9 CAPAIAN KINERJA BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN BULAN SEPTEMBER 2025

a. Gambaran Umum Capaian Bulan September 2025

Pada Bulan September 2025, BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka menjalankan tugas Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, evaluasi kinerja kelembagaan, penguatan perencanaan pembangunan jangka menengah, serta pengawalan program prioritas nasional dan daerah di wilayah Papua Pegunungan.

Capaian bulan ini ditandai dengan keterlibatan langsung BP3OKP dalam kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, koordinasi lintas kementerian/lembaga, penguatan perencanaan RPJMD, serta pendampingan berbagai program strategis di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi produktif, keamanan sosial, dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP). Seluruh kegiatan tersebut menunjukkan peran aktif BP3OKP sebagai lembaga pengarah dan pengawal kebijakan Otsus di Papua Pegunungan.

b. Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Selama Bulan September 2025, Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan peran strategis dalam penguatan koordinasi pusat dan daerah. Kegiatan utama meliputi pendampingan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Jayapura, partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025–2029, evaluasi kinerja sekretariat dan kelompok kerja, serta koordinasi dengan Kanwil Papua dan Setwapres.

Melalui kegiatan tersebut, BP3OKP berhasil memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, mendorong transparansi penggunaan Dana Otonomi Khusus, serta menegaskan pentingnya fokus pembangunan pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi OAP. BP3OKP juga berperan aktif dalam pengusulan penambahan anggota pokja guna meningkatkan efektivitas kinerja kelembagaan, serta mengawal kebijakan strategis seperti pembangunan pabrik pakan ternak dan program perumahan rakyat di Papua Pegunungan.

c. Capaian Kinerja Pokja Papua Polhukam

Pokja Papua Polhukam pada Bulan September 2025 berfokus pada upaya pencegahan dan penguatan ketahanan sosial di kalangan generasi muda. Kegiatan sosialisasi di lingkungan pendidikan menengah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelajar terhadap bahaya rasisme, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas.

Melalui koordinasi dengan aparat kepolisian dan pihak sekolah, Pokja Papua Polhukam berhasil mengidentifikasi berbagai tantangan sosial yang dihadapi pelajar serta membangun komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Pokja juga berkomitmen menyalurkan aspirasi dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari tugas SHEK.

d. Capaian Kinerja Pokja Papua Produktif

Pada Bulan September 2025, Pokja Papua Produktif melaksanakan berbagai kegiatan yang berorientasi pada penguatan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat OAP. Kegiatan meliputi koordinasi persiapan SDM Koperasi Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), fasilitasi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, serta pendampingan program strategis seperti pembangunan perumahan rakyat dan rencana pembangunan pabrik pakan ternak.

Hasil kegiatan menunjukkan masih terbatasnya kapasitas SDM lokal serta perlunya dukungan pelatihan dan fasilitas seperti Balai Latihan Kerja (BLK). Pokja Papua Produktif juga mendorong keterlibatan pelaku usaha dan kontraktor OAP dalam berbagai program

pembangunan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Seluruh kegiatan ini mempertegas peran Pokja dalam mengawal program nasional agar berdampak langsung bagi masyarakat Papua Pegunungan.

e. Capaian Kinerja Pokja Papua Cerdas

Pokja Papua Cerdas pada Bulan September 2025 memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas pendidikan dasar yang kontekstual dan berkelanjutan. Kegiatan pelatihan guru Sekolah Dasar mengenai penggunaan Buku Paket Kontekstual Papua (BPKP) berhasil meningkatkan kapasitas guru dalam pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan budaya dan lingkungan lokal.

Selain itu, Pokja Papua Cerdas berperan dalam penyusunan awal Master Plan Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan bersama akademisi. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan jangka menengah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah, khususnya dalam menjawab tantangan literasi dasar dan pemerataan akses pendidikan di wilayah 3T.

f. Capaian Kinerja Pokja Papua Sehat

Pada Bulan September 2025, Pokja Papua Sehat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan di RSUD Wamena serta berpartisipasi aktif dalam Musrenbang Provinsi Papua Pegunungan. Fokus kegiatan diarahkan pada evaluasi implementasi JKN, BPJS, dan KIS, serta identifikasi kendala pelayanan kesehatan bagi masyarakat OAP.

Hasil kegiatan menunjukkan perlunya pembenahan pendataan kependudukan, penguatan pembiayaan lintas kabupaten, serta peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan regional. Pokja Papua Sehat menegaskan komitmennya untuk mengawal perbaikan sistem layanan kesehatan melalui koordinasi lintas sektor dan advokasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah.

g. Kesimpulan

Secara keseluruhan, capaian kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan pada Bulan September 2025 menunjukkan peran aktif dan strategis dalam mengawal percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Melalui pendekatan SHEK, BP3OKP bersama seluruh pokja berhasil memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas perencanaan, serta mendorong implementasi program prioritas yang berpihak pada Orang Asli Papua.

Capaian ini menjadi dasar penting untuk penguatan kinerja pada bulan-bulan berikutnya serta kontribusi nyata dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2025 secara konsisten, rapi, dan terarah.

2.10 CAPAIAN KINERJA BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN BULAN OKTOBER 2025

a. Gambaran Umum Capaian Bulan Oktober 2025

Pada Bulan Oktober 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Pelaksanaan kegiatan pada bulan ini difokuskan pada penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP).

Kegiatan BP3OKP dan Pokja pada bulan Oktober mencakup isu strategis lintas sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, ekonomi produktif, keamanan dan ketertiban, serta penguatan kelembagaan Otsus. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan dan program

pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan dan kondisi faktual di wilayah Papua Pegunungan.

b. Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Pada Bulan Oktober 2025, Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan sejumlah kegiatan koordinatif tingkat nasional dan daerah. Kegiatan tersebut meliputi pertemuan bersama Komisi X DPR RI, audiensi dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Transmigrasi RI, serta koordinasi dengan BAPPENAS dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan.

Melalui pertemuan bersama Komisi X DPR RI, BP3OKP menyampaikan data dan isu strategis di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan inovasi di Papua Pegunungan. Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperhatikan tantangan utama daerah, seperti keterbatasan tenaga pendidik, sarana prasarana pendidikan, serta perlunya kebijakan afirmatif bagi wilayah 3T.

Selain itu, BP3OKP juga berperan aktif dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri RI terkait pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Pertemuan tersebut memperkuat pemahaman bersama mengenai pentingnya sinergi antara Komite Eksekutif dan BP3OKP dalam mengawal percepatan pembangunan Otsus Papua secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

Dalam bidang ekonomi produktif, Badan Pengarah melakukan rangkaian audiensi dan koordinasi terkait rencana pembangunan Pabrik Pakan Ternak di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya, baik dengan BAPPENAS maupun OPD terkait. Program ini dinilai strategis karena berpotensi menekan inflasi, mendukung penanganan stunting, serta meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat di delapan kabupaten Papua Pegunungan.

Kegiatan koordinasi juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan Program Quick Win sebagai prioritas nasional. Arahan Wakil Menteri Dalam Negeri RI menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas nasional secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.

c. Capaian Kinerja Pokja Papua Polhukam

Pada Bulan Oktober 2025, Pokja Papua Polhukam melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Polres Nduga dalam rangka membahas kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinkronisasi dan harmonisasi antara aparat keamanan dan pemangku kepentingan daerah dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Hasil koordinasi menunjukkan adanya kesepahaman bersama mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk Polres, Koramil, dan Satpol PP, dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Nduga. Pokja Papua Polhukam juga menerima berbagai masukan strategis dari Kapolres Nduga yang akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperkuat rasa aman dan kepercayaan masyarakat.

d. Capaian Kinerja Pokja Papua Produktif

Pokja Papua Produktif pada Bulan Oktober 2025 memfokuskan kegiatannya pada penguatan sektor ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan yang dilaksanakan antara lain kunjungan kolaboratif bersama Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas Pertanian, serta kelompok tani dalam rangka pengembangan irigasi dan pencetakan lahan sawah.

Selain itu, Pokja Papua Produktif juga melakukan survei lapangan dan koordinasi terkait usulan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan di wilayah Kota Wamena. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan dasar sekaligus mendorong kinerja BUMD, khususnya PDAM, sebagai sumber PAD.

Pokja Papua Produktif turut melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sektor perdagangan, energi, dan pariwisata.

Hasil kegiatan menunjukkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti POM BBM dan fasilitas wisata seni dan budaya, sebagai penggerak ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Capaian Kinerja Pokja Papua Cerdas

Pada Bulan Oktober 2025, Pokja Papua Cerdas berperan aktif dalam kegiatan rapat kerja provinsi terkait implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua. Kegiatan ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan dalam memastikan kebijakan pendidikan benar-benar berpihak kepada Orang Asli Papua.

Selain itu, Pokja Papua Cerdas mengikuti Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Kebinekaan yang membahas perlindungan bahasa dan sastra daerah. Forum ini menghasilkan kesepakatan bersama mengenai pentingnya revitalisasi bahasa daerah melalui sinergi antara Balai Bahasa, BP3OKP, dan pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan identitas dan kebudayaan Papua.

f. Capaian Kinerja Pokja Papua Sehat

Pokja Papua Sehat pada Bulan Oktober 2025 melaksanakan audiensi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka membangun sinergi penanganan permasalahan kesehatan. Isu strategis yang dibahas meliputi kemiskinan ekstrem, stunting, kekurangan gizi, rendahnya usia harapan hidup, keterbatasan tenaga kesehatan, serta pengelolaan dana Otsus bidang kesehatan.

Pokja Papua Sehat juga terlibat aktif dalam pembahasan finalisasi proposal pembangunan rumah produksi pakan ternak, yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap perbaikan status gizi dan pengendalian inflasi. Selain itu, koordinasi terkait perumusan rancangan Perdasus pendataan status Orang Asli Papua Pegunungan menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan afirmatif berbasis Otsus.

g. Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan pada Bulan Oktober 2025 menunjukkan peran aktif lembaga dalam mengawal percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi. Sinergi yang terbangun antara BP3OKP, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi fondasi penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berpihak kepada Orang Asli Papua.

Capaian kinerja pada bulan ini menjadi dasar yang kuat untuk perumusan rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut pada bulan-bulan berikutnya, serta berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan Papua Pegunungan secara berkelanjutan.

2.11 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan November 2025

a. Gambaran Umum Capaian Kinerja Bulan November 2025

Pada bulan November 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan tata kelola Otonomi Khusus, pendataan Orang Asli Papua (OAP) sebagai basis kebijakan, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Pegunungan.

Pelaksanaan kegiatan pada bulan ini mencerminkan peran BP3OKP sebagai lembaga yang menjalankan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK)

dalam memastikan kebijakan dan program Otonomi Khusus Papua berjalan terarah, berbasis data, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan Orang Asli Papua.

b. Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Pada bulan November 2025, Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan memfokuskan kegiatan pada penguatan landasan kebijakan Otonomi Khusus Papua melalui pendataan Orang Asli Papua (OAP), penguatan kelembagaan Kelompok Kerja BP3OKP, serta penyelarasan rencana kerja BP3OKP dan Komite Eksekutif untuk tahun 2026.

Salah satu kegiatan strategis yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua (OAP) di Lima Wilayah Adat Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai urgensi pendataan OAP yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan kebijakan dan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus. Melalui kegiatan ini, terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), akademisi, serta instansi teknis untuk mendukung pendataan OAP yang valid dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga ditandai dengan peluncuran simbolis E-KTP sebagai bentuk penguatan tertib administrasi kependudukan.

Selain itu, Badan Pengarah turut berpartisipasi dalam pertemuan pembahasan rekrutmen Kelompok Kerja (Pokja) BP3OKP se-Tanah Papua. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan mengenai mekanisme rekrutmen Pokja pada empat program prioritas, serta ditetapkannya regulasi resmi berupa Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekrutmen Kelompok Kerja BP3OKP.

Dalam rangka penguatan perencanaan program, Badan Pengarah juga mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja Badan Pengarah Papua dan Komite Eksekutif Tahun 2026 di Jakarta. Rapat ini menghasilkan kesepakatan bersama terkait arah kebijakan, prioritas program, serta penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama sebagai dasar sinkronisasi program pusat dan daerah.

Pada awal bulan November 2025, Badan Pengarah turut mengikuti Rapat Pleno BP3OKP bersama Wakil Presiden Republik Indonesia. Rapat ini memberikan arahan strategis percepatan pembangunan Papua dengan penekanan pada akselerasi pembangunan, inovasi kebijakan berbasis data, serta penguatan sinergi antara BP3OKP, Komite Eksekutif, dan pemerintah daerah pada empat pilar utama pembangunan Papua.

c. Capaian Kinerja Pokja Papua Polhukam

Pada bulan November 2025, Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan tidak melaksanakan kegiatan khusus. Namun demikian, Pokja tetap menjalankan fungsi harmonisasi dan siap mendukung Badan Pengarah dalam penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan dinamika situasi daerah.

d. Capaian Kinerja Pokja Papua Produktif

Pada bulan November 2025, Pokja Papua Produktif melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada penguatan pembangunan ekonomi, pengendalian inflasi daerah, ketahanan pangan, serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

Pokja Papua Produktif berperan aktif dalam Rapat Kerja mengenai langkah strategis pembangunan infrastruktur dasar dan logistik guna mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Pegunungan. Kegiatan ini mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, BUMN/BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Selain itu, Pokja Papua Produktif turut terlibat dalam Rapat Koordinasi dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antar-OPD dan pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah.

Dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru 2025, Pokja Papua Produktif melaksanakan kegiatan pemantauan dan monitoring lapangan terkait distribusi logistik, inflasi, dan ketahanan pangan. Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi dengan instansi teknis, perbankan, dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga.

Pokja Papua Produktif juga berkontribusi dalam kegiatan lanjutan Kick Off Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Papua Pegunungan, yang bertujuan mendukung penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang berwawasan lingkungan.

e. Capaian Kinerja Pokja Papua Cerdas

Pada bulan November 2025, Pokja Papua Cerdas memfokuskan kegiatan pada penguatan pendidikan berbasis budaya lokal melalui pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Kurikulum Noken Berbasis Komunitas Pendidikan.

FGD ini menghasilkan pemahaman bersama mengenai pentingnya pelestarian noken sebagai warisan budaya Papua yang harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan. Kegiatan ini juga menghasilkan deklarasi komitmen pengembangan Kurikulum Noken, identifikasi mata pelajaran yang relevan, serta langkah awal konservasi bahan baku noken sebagai bagian dari pembelajaran kontekstual dan pelestarian budaya lokal.

f. Capaian Kinerja Pokja Papua Sehat

Pada bulan November 2025, Pokja Papua Sehat melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan layanan kesehatan masyarakat, penguatan pendataan berbasis data statistik, serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan isu kesehatan strategis.

Pokja Papua Sehat melaksanakan kegiatan sosialisasi kesehatan lingkungan keluarga, pelayanan posyandu, pengobatan massal, serta pemberian makanan bergizi di Kampung Algonik, Distrik Pyramid. Kegiatan ini berkontribusi langsung pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan keluarga, status gizi bayi dan balita, serta penguatan peran pemerintah kampung dalam mendukung layanan kesehatan dasar.

Selain itu, Pokja Papua Sehat melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya guna memperkuat pemahaman mengenai standar dan prosedur pendataan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Koordinasi ini menjadi dasar penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis data.

Pokja Papua Sehat juga melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya terkait percepatan implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), penanganan kasus HIV/AIDS, serta percepatan penyusunan regulasi pendataan Orang Asli Papua (OAP). Selain itu, Pokja turut terlibat dalam sosialisasi pendataan OAP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebagai bagian dari upaya percepatan penyusunan dasar hukum pendataan OAP.

g. Kesimpulan Capaian Kinerja Bulan November 2025

Secara keseluruhan, capaian kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan pada bulan November 2025 menunjukkan penguatan peran strategis BP3OKP dan Pokja dalam pengawalan kebijakan Otonomi Khusus Papua, penguatan pendataan Orang Asli Papua sebagai basis kebijakan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan terhadap pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Seluruh kegiatan tersebut berkontribusi dalam mendukung percepatan pembangunan yang inklusif, berbasis data, dan berkelanjutan di Provinsi Papua Pegunungan.

2.12 Capaian Kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bulan Desember 2025

a. Gambaran Umum Capaian Kinerja Bulan Desember 2025

Pada bulan Desember 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Otonomi Khusus Papua, penguatan pelestarian budaya dan bahasa daerah, pengawalan kebijakan percepatan pembangunan Papua di tingkat nasional, serta penguatan sektor ekonomi produktif, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan bulan Desember dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP dalam menjalankan peran strategis SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) guna memastikan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Pegunungan berjalan terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

b. Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Pada bulan Desember 2025, Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan memfokuskan kegiatan pada penguatan peran strategis BP3OKP dalam pengawalan kebijakan nasional dan pelestarian nilai budaya Papua, serta peningkatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Badan Pengarah turut berpartisipasi dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Pra-Kongres Bahasa Daerah dan Noken Papua Tahun 2026 yang diselenggarakan di Jakarta. Keterlibatan ini menghasilkan berbagai masukan dan rekomendasi strategis terkait pentingnya perlindungan dan pelestarian bahasa daerah serta Noken Papua sebagai warisan budaya bangsa. Dalam forum tersebut ditekankan perlunya integrasi pelestarian bahasa daerah dan budaya Papua ke dalam kebijakan pendidikan, khususnya melalui kurikulum muatan lokal, sebagai langkah konkret menjaga keberlanjutan identitas budaya Papua di tengah arus globalisasi.

Selain itu, Badan Pengarah juga menghadiri acara Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 yang menjadi tonggak penting dalam tahapan kedua implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041. Melalui kegiatan ini, Badan Pengarah memperoleh pemahaman komprehensif mengenai arah kebijakan dan 19 program prioritas RAPPP yang berfokus pada Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pembangunan Papua.

Partisipasi Badan Pengarah dalam kegiatan ini memperkuat peran BP3OKP dalam mengawal sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua Pegunungan agar sejalan dengan kebijakan nasional Otonomi Khusus Papua.

c. Capaian Kinerja Pokja Papua Polhukam

Pada bulan Desember 2025, Pokja Papua Polhukam tidak melaksanakan kegiatan lapangan secara khusus. Namun demikian, Pokja tetap menjalankan fungsi koordinasi internal dan siap mendukung Badan Pengarah dalam penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan dinamika dan kebutuhan daerah.

d. Capaian Kinerja Pokja Papua Produktif

Pada bulan Desember 2025, Pokja Papua Produktif melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada penguatan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif, pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan pangan, serta dukungan terhadap program strategis nasional di Provinsi Papua Pegunungan.

Pokja Papua Produktif melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan provinsi sebagai bagian dari upaya memastikan program pembangunan daerah berjalan inklusif dan selaras dengan RIPPP

dan RAPPP. Kegiatan ini memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaporan pembangunan.

Selain itu, Pokja Papua Produktif berperan aktif dalam pendampingan dan koordinasi pelaku usaha UMKM dan ekonomi kreatif dalam rangka memeriahkan HUT ke-69 Kota Wamena. Kegiatan ini mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, memperkuat promosi produk lokal, serta berkontribusi pada pengendalian inflasi dan stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, Pokja Papua Produktif melakukan kunjungan lapangan dan peninjauan program pengembangan tanaman kopi, kacang hijau, dan ubi jalar pada kelompok tani di Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan wilayah.

Pokja Papua Produktif juga melakukan koordinasi terkait persiapan perluasan pembangunan dapur Program Makanan Bergizi (MBG) di delapan kabupaten, serta pertemuan lanjutan dengan pelaku usaha ekonomi kreatif Kabupaten Nduga sebagai langkah awal mendorong tumbuhnya wirausaha muda dan pengurangan kemiskinan ekstrem melalui sektor ekonomi kreatif.

e. Capaian Kinerja Pokja Papua Cerdas

Pada bulan Desember 2025, Pokja Papua Cerdas memfokuskan kegiatan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui sektor olahraga sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas generasi muda Papua Pegunungan.

Pokja Papua Cerdas berpartisipasi dalam acara pelantikan pimpinan KONI Provinsi Papua Pegunungan yang menandai dimulainya kepengurusan KONI di provinsi baru tersebut. Kegiatan ini memperkuat koordinasi antara KONI dan pemerintah daerah dalam pembinaan atlet, pemetaan cabang olahraga unggulan, serta integrasi program olahraga dengan misi pembangunan sumber daya manusia dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.

f. Capaian Kinerja Pokja Papua Sehat

Pada bulan Desember 2025, Pokja Papua Sehat melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan distrik, penguatan layanan kesehatan, serta koordinasi lintas lembaga dalam pembangunan kesehatan dan sosial masyarakat.

Pokja Papua Sehat terlibat dalam kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dan kewenangan pemerintahan distrik dan kampung yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam mendukung percepatan pembangunan dan penanganan kemiskinan ekstrem di sektor kesehatan.

Selain itu, Pokja Papua Sehat melakukan pendataan dan monitoring pengembangan sarana dan prasarana kesehatan RSUD dan Puskesmas di delapan kabupaten sebagai dasar perencanaan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan berbasis data.

Pokja Papua Sehat juga melaksanakan koordinasi dengan MRP Provinsi Papua Pegunungan terkait isu-isu strategis pembangunan Orang Asli Papua, termasuk pendataan OAP, kepastian hukum hak ulayat, serta prioritas pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kreatif.

Dalam bidang kesehatan daerah, Pokja Papua Sehat melakukan koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2026–2029, dengan fokus pada manajemen SDM kesehatan, percepatan penurunan stunting, penguatan posyandu, serta strategi pembiayaan kesehatan berbasis dana Otonomi Khusus.

Pokja Papua Sehat turut berpartisipasi dalam peringatan HUT ke-69 Kota Wamena dan melakukan kunjungan kerja ke lahan pertanian dan satuan pendidikan di Distrik

Molagalome sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat secara terpadu.

g. Kesimpulan Capaian Kinerja Bulan Desember 2025

Secara keseluruhan, capaian kinerja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan pada bulan Desember 2025 menunjukkan penguatan peran strategis BP3OKP dan seluruh Pokja dalam mengawal kebijakan Otonomi Khusus Papua, memperkuat pelestarian budaya dan bahasa daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat layanan kesehatan dan kohesi sosial masyarakat. Seluruh kegiatan tersebut menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Provinsi Papua Pegunungan.

BAB V

PENUTUP

Laporan Tahunan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP dalam mengawal percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

Sepanjang periode Januari sampai dengan Desember 2025, BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan bersama seluruh Kelompok Kerja telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang berfokus pada sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi kebijakan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif, penguatan layanan kesehatan, pelestarian budaya dan bahasa daerah, serta penguatan peran dan partisipasi Orang Asli Papua dalam pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 menunjukkan komitmen BP3OKP dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah, memastikan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga adat, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Berbagai capaian yang telah diraih menjadi dasar penting dalam memperkuat arah pembangunan Provinsi Papua Pegunungan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan Otonomi Khusus Papua masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek geografis, sosial, ekonomi, maupun kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, hasil pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi yang dihimpun sepanjang tahun 2025 menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam penyusunan perencanaan dan penguatan strategi pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP sepanjang tahun 2025. Semoga sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan Orang Asli Papua dan seluruh masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan.

Wamena, 8 Januari 2025
Anggota BP3OKP Provinsi Papua
Pegunungan



Hantor Matuan, S.IP.



LAPORAN KEGIATAN BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2025



TIM PENYUSUN

BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pengarah	:	Hantor Matuan, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Polhukam	:	Fransiscus Elosak, S.H., M.H
Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas	:	Paul Wetipo, S.Pd
Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat	:	Gaad Piranid Tabuni, SP., M.M.
Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif	:	Yoyo Iwik Sriyoto, S.Sos., M.Si
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Meisly Mariana Kombong, S.AP.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Otniel Elokpere, S.Pd.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Teo Aprianus Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA	1
TIM PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Ringkasan Kelembagaan	5
1.3.1 Definisi	5
1.3.2 Struktur Kelembagaan	6
1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan	6
1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja	7
BAB II PEMBAHASAN	8
2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan	8
2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan	12
2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si.....	13
2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd).....	19
2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M).....	21
BAB III PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi khusus dilaksanakan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Otonomi Khusus di Papua telah memasuki babak baru. Setelah berjalan 20 tahun, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan pada Pasal 68A bahwa perlu dibentuk badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Dalam menjalankan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP).

Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan SHEK dalam pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta satu orang Perwakilan OAP dari setiap Provinsi Papua DOB Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu dalam pelaksanaannya, akan dibantu pula oleh Sekretaris Eksekutif di Jakarta dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berlokasi di Papua, Kelompok Kerja, serta Kelompok Ahli. Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi.

Arah percepatan pembangunan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana induk tersebut memuat berbagai target dengan capaian dan dampak yang terukur. Agar pelaksanaan tugas BPP dapat sejalan dengan rencana induk, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja BPP. Rencana kegiatan dan program kerja ini memuat Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan ringkasan kelembagaan, Bab II yang terdiri atas target outcome, rencana kegiatan dan program kerja, serta Bab III Penutup. Rencana kegiatan dan program kerja menjadi acuan bagi Badan Pengarah Papua, khususnya bagi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas SHEK percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

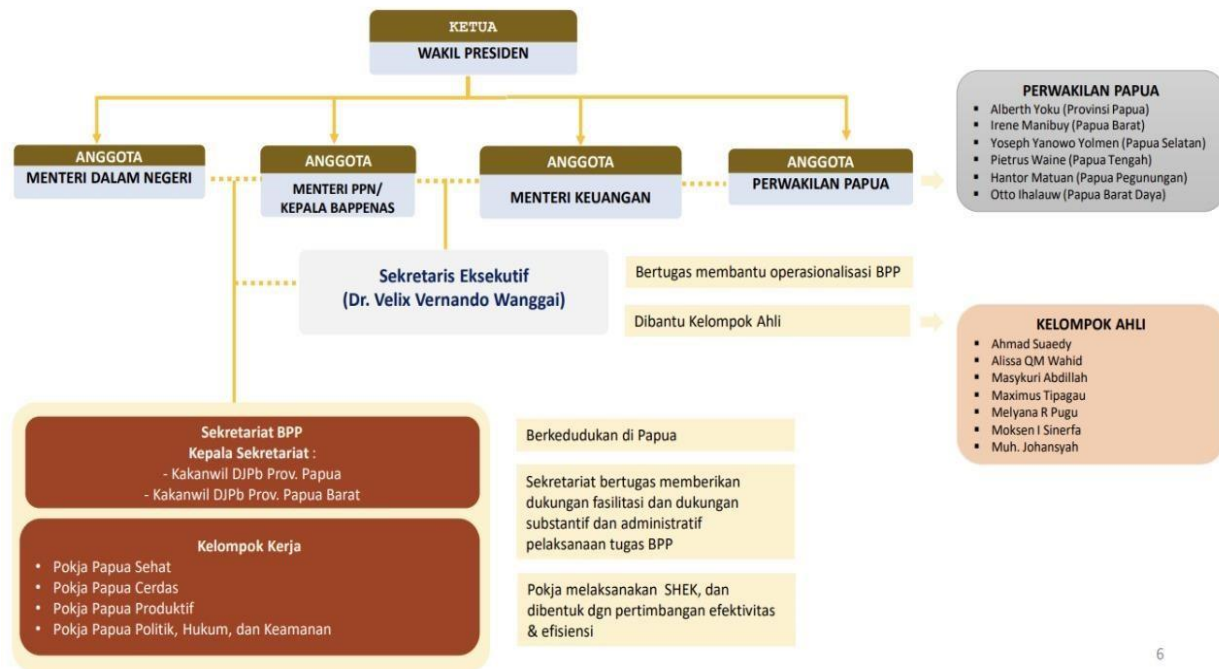
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
7. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;
8. Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Pembidangan Tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
9. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-3/SETBPP/JYP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-1/SET/JYP/2025 tentang Penetapan Tim Dukungan Administratif dan Tim Dukungan Substantif Sekretariat Badan Pengarah Papua.

1.3 Ringkasan Kelembagaan

1.3.1 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.3.2 Struktur Kelembagaan



6

1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk

Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;

- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

- a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lem.baga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Koordinasi dan kerja sarna dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. Membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota" dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- f. Menyusun laporan kelompok kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.

BAB II PEMBAHASAN

Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada Bulan Desember tahun 2025 antara lain:

2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Hantor Matuan, S.IP.

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Keikutsertaan BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Pra-Kongres Bahasa Daerah dan Noken Papua Tahun 2026.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Kamis, 04 Desember 2025, bertempat di Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP dalam sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi, dan evaluasi kebijakan Otonomi Khusus Papua. • Menghimpun masukan dan rekomendasi terkait perlindungan dan pelestarian bahasa daerah serta Noken Papua menjelang Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026. • Memperkuat koordinasi antara BP3OKP dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan pusat dan daerah. • Mendorong integrasi pelestarian bahasa daerah dan budaya Papua dalam kebijakan pendidikan nasional dan daerah.
Peserta Kegiatan	:	• Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. • Perwakilan enam Anggota BP3OKP dari enam provinsi. • Anggota Pokja BP3OKP terkait. • Perwakilan kementerian/lembaga dan undangan lainnya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Pra-Kongres Bahasa Daerah dan Noken Papua Tahun 2026 berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai masukan serta rekomendasi strategis terkait pelestarian bahasa daerah dan Noken Papua sebagai warisan budaya. Dalam diskusi tersebut disampaikan pentingnya peran negara dan daerah dalam melindungi bahasa daerah dari dampak globalisasi serta

		mendorong pelestarian Noken Papua melalui kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Hasil utama kegiatan ini adalah rekomendasi agar pelestarian bahasa daerah dan Noken Papua dapat diintegrasikan dalam kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan sebagai langkah konkret menjaga keberlanjutan warisan budaya bangsa.
Rencana Tindaklanjut	:	1. Mendorong kementerian terkait untuk menindaklanjuti hasil diskusi dalam kebijakan dan regulasi pendidikan, khususnya kurikulum muatan lokal. 2. Memperkuat peran pemerintah daerah dalam pelestarian bahasa daerah dan Noken Papua melalui program kebudayaan berbasis Otonomi Khusus. 3. Mengoptimalkan peran BP3OKP dalam mengawal dan mengevaluasi implementasi rekomendasi hasil Pra-Kongres Bahasa Daerah menuju pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026. 4. Memperkuat sinergi lintas sektor antara pusat dan daerah dalam perlindungan bahasa daerah dan budaya Papua.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan turut hadir dalam Acara Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada Selasa, 16 Desember 2025, bertempat di Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP dalam sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi, dan evaluasi percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. 2. Memperoleh pemahaman komprehensif mengenai arah kebijakan dan program prioritas RAPPP Tahun 2025–2029.

		3. Memperkuat koordinasi antara BP3OKP dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pembangunan Papua. 4. Mendorong keselarasan pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan dengan RIPP dan RAPP.
Peserta Kegiatan	:	1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Wakil Presiden. 3. Kementerian/Lembaga teknis terkait. 4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Tanah Papua. 5. Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi. 6. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda. 7. Organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan mitra pembangunan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	Acara Peluncuran RAPP Tahun 2025–2029 berlangsung dengan baik dan menjadi momentum penting dalam tahapan kedua implementasi RIPP 2022–2041. Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa RAPP 2025–2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 dan memuat 19 program prioritas yang berfokus pada pencapaian Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Peluncuran ini menegaskan komitmen pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak secara kolaboratif dalam percepatan pembangunan Papua. RAPP juga telah diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029, Trisula Pembangunan, serta program prioritas Presiden Republik Indonesia.
Rencana Tindaklanjuti	:	1. Mendorong pemerintah daerah, khususnya Provinsi Papua Pegunungan, untuk menyesuaikan perencanaan dan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan RAPP 2025–2029.

		2. Memperkuat peran BP3OKP dalam mengawal sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan 19 program prioritas RAPPP di daerah. 3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pembangunan Papua. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi RAPPP guna memastikan program berjalan efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan Orang Asli Papua.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Fransiscus Elosak, S.H.,M.H

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	NIHIL
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	
Peserta Kegiatan	:	
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	
Misi/Keterangan	:	
Hasil Kegiatan	:	
Rencana Tindaklanjut	:	
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan
Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUPG (Pelebagaan Pengarusutamaan Gender) Kewenangan Provinsi
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2025, bertempat di Hotel Nora Jl. Bhayangkara wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Mengkoordinasikan dan mensinkronkan penyelenggaraan PUG bisa dijalankan dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi papua pegunungan. • Membantu dan mempermudah dalam penyusunan laporan dalam program pembangunan sesuai RIPP dan RAPP.
Peserta Kegiatan	:	• Gubernur Provinsi PP (diwakili Staff Ahli Gubernur bp. Aaron wanimbo, Kadis Sosial, Kabid dan Staff, Kadis Pertanian Dan mentor dari Dinas Sosial provinsi P apua
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Penyelenggaraan PUG akan meningkatkan dan membantu dalam program pembangunan sesuai RIPP dan RAPP pemerintah provinsi Papua pegunungan.
Hasil Kegiatan	:	• Memberi suatu pondasi dan output bagi pemerintah provinsi PP bahwa PUG membantu dalam pelaksanaan program pembangunan disemua sektor yang akan lebih baik lagi • Kolaborasi antara pemerintah dengan para OPD agar bisa menjalankan program yang sesuai kewenangan dalam mensukseskan program pembangunan yang ada di RIPP dan RAPP.
Rencana Tindaklanjut	:	• Kegiatan Akan selalu dimonitoring dan didorong setiap enam bulan sekali. • Program kegiatan ini kedepan akan dikoordinasikan dengan Sekda dan Kadis Sosial juga OPD lainnya.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Dan Pendampingan Para Pelaku Usaha UMKM/Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Memeriahkan Hut Kota Wamena Yang Ke 69 Tahun 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 08 s.d. 10 Desember 2025, dilaksanakan di Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Untuk mengkoordinasikan dan mendorong para pelaku usaha UMKM dan EKRAF agar lebih aktif dalam tampil di suatu ivent untuk mempromosikan produk-produk unggulan masing-masing kepada masyarakat dan pemerintah daerah dengan baik. • Membantu mensukseskan perayaan HUT kota Wamena yang ke 69 tahun agar lebih meriah dan dijadikan sebagai ajang ivent perekonomian tahunan daerah bagi para pelaku usaha UMKM/EKRAF dan masyarakat. • Mengurangi Inflasi daerah agar terkendali dengan baik.
Peserta Kegiatan	:	• Bupati, Wakil Bupati kab.Jwj, para kepla OPD, BUMN/BUMD, LSM, Toga, Tokoh Masyarakat dan Para pelaku usaha UMKM/EKRAF.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	HUT kota wamena sebagai ajang ivent perekonomian tahunan bagi para pelaku usaha UMKM/EKRAF dan pesta rakyat bagi masyarakat Kab. Jayawijaya menuju kota DANI.
Hasil Kegiatan	:	• Meningkatkan munculnya para pelaku Usaha baru dan Memberi output bagi Pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian daerah dan mengendalikan Inflasi dan menjaga stabilitas ketahanan. • Mensinkronkan dan mengkoordinasikan antar Pelaku usaha, instansi K/L, Perbankan, pemerintah dan masyarakat agar sama-sama bisa memeriahkan peringatan HUT Kota wamena, meningkatkan perekonomian, mengendalikan Inflasi dan menstabiliskan harga menjelang natal dan tahun baru.
Rencana Tindakanjnt	:	• Kegiatan Akan selalu didorong, dimonitoring dan dikawal setiap 6 bulan sekali.

		Program kegiatan ini kedepan akan dikoordinasikan dan dilaksanakan lebih aktif lagi ke pemerintah kabupaten Jayawijaya
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Kegiatan Kunjungan Program Ketahanan Pangan, Pengembangan Dan Peninjauan Tanaman Kopi, Kacang Hijau Dan Ubu Jalar Pada Enam Kelompok Tani Seluas 13 Hektar Di Molagalome Kab. Jayawijaya Tahun 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2025, bertempat di Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Untuk meningkatkan intensifikasi pertanian, ekstensifikasi, memastikan, memantau dilapangan, mensinergikan dan mendorong penguatan ketahanan pangan wilayah distri dan tata kelola distribusi dalam pengendalian Inflasi di daerah pelosok terkontrol dengan baik. • Membantu control dan monitoring Inflasi dan Ketahanan Pangan daerah yang selama ini menempati posisi diatas secara nasional. • Memperkuat kelembagaan, berkolaborasi dan sinergitas sesama OPD serta pemerintah agar Inflasi dan ketahanan pangan kedepan bisa lebih terkendali dengan baik.
Peserta Kegiatan	:	• Bupati Kab. Jayawijaya, Kepala Dinas Pertanian, Kabid dan staff, Kadistrik, tokoh adat, Toga dan masyarakat.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Kegiatan Turun lapangan langsung dalam upaya penguatan ketahanan pangan dan tata kelola distribusi dalam pengendalian Inflasi di kabupaten Jayawijaya
Hasil Kegiatan	:	• Memberi output bagi kelompok Tani, Pemerintah Distrik dan masyarakat dengan bersama-sama dalam mengendalikan Inflasi daerah dan menjaga stabilitas ketahanan Pangan di Kabupaten Jayawijaya. • Kolaborasi, pemantauan dan pengawasan antar para kelompok tani, instansi K/L, Stake holder, pemerintah dan masyarakat agar sama-sama bisa mengendalikan Inflasi

		daerah dan menstabilkan ketahanan pangan daerah perkampungan.
Rencana Tindaklanjuti	:	• Kegiatan Akan selalu didorong, dimonitoring dan dikawal setiap tiga bulan sekali. • Program kegiatan ini kedepan akan dikoordinasikan dan dilaksanakan lebih aktif lagi ke pemerintah Distrik dan kabupaten.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Kegiatan Pertemuan sekaligus Audensi Dengan Petugas SPPG (Satuan Petugas Pemenuhan Gizi) Untuk Persiapan Penambahan Pembangunan Dapur MBG Di Delapan Kabupaten Diprovinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2025, bertempat di Cafe Diks Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Mensukseskan, menambah, menentukan dan memperluas rencana pembangunan dapur MBG diseluruh delapan kabupaten di Prov.PP. • Memberi peluang kepada para pelaku usaha, kelompok tani, rekanan, lembaga dan masyarakat untuk mendukung dan berkolaborasi dalam mengelola dan mensukseskan program MBG. • Menghubungkan BGN dan pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan program MBG.
Peserta Kegiatan	:	• Ketua SPPG sekaligus mewakili Dinas Kesehatan, Para staff SPPG.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Program MBG adalah salah satu pelaksanaan asta cita yang harus disukseskan oleh pemerintah agar bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya serta bisa membawa perubahan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Hasil Kegiatan	:	• Memberi output dan masukan ke pemerintah dan masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan program MBG diProv.PP

	:	• Membuat suatu Kolaborasi antara para pelaku usaha, lembaga, pemerintah dan masyarakat agar MBG bisa membantu perekonomian masyarakat.
Rencana Tindakan lanjut	:	• Secepatnya Rencana perluasan dan pembangunan dapur MBG akan selalu dimonitoring dan didorong dengan instansi terkait • Setiap tiga bulan Penyusunan Program kegiatan MBG ini kedepan akan dikoordinasikan pemerintah provinsi agar semua delapan kabupaten segera terbentuk dan bisa jalan sesuai program pemerintah.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pertemuan Lanjutan Para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif/Ekraf Kab. Nduga.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2025, bertempat di Cafe Schoop Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Membuka peluang kesempatan dan diskusi bagi para pelaku usaha muda EKRAF untuk bisa tampil usaha mandiri. • Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat dari sektor usaha EKRAF di kabupaten NDUGA. • Mengawali usaha EKRAF bagi para pelaku usaha OAP di kab. Nduga.
Peserta Kegiatan	:	• Bupati Kab. Nduga, Ketua GEKRAFS Kab. Nduga, Para pelaku usaha, Intelektual dan pemuda.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Program usaha EKRAF bagi pelaku usaha Muda harus bisa dijalankan di kabupaten Nduga agar bisa merubah kemiskinan Ekstrim dan meningkatkan perekonomian daerah tersebut.
Hasil Kegiatan	:	• Suatu pondasi awal untuk Memberi output dan masukan ke pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam mengawali dan mensukseskan pelaksanaan EKRAF bagi pelaku usaha muda.

		• Kedepan bisa Membuat suatu Kolaborasi antara para pelaku usaha EKRAF, lembaga, pemerintah dan masyarakat agar EKRAF bisa hadir dan tumbuh membantu perekonomian masyarakat.
Rencana Tindak lanjut	:	• Rencana setiap empat bulan akan dikoordinasikan dengan pemerintah kab. Nduga dan akan selalu dimonitoring dan didorong dengan instansi terkait. • Penyusunan Program kegiatan EKRAF ini kedepan akan melibatkan pelaku usaha OAP setempat dan bisa dikoordinasikan pemerintah provinsi agar semua EKRAF terbentuk dan bisa jalan sesuai program pemerintah.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan
Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Partisipasi Anggota Pokja Papua Cerdas BPP dalam Acara Pelantikan Pimpinan KONI Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Senin, 08 Desember 2025, bertempat di Kantor KONI Pusat, Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Menyelaraskan pelaksanaan program dan kebijakan dengan arah perencanaan yang telah ditetapkan. • Memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait. • Melakukan evaluasi terhadap capaian dan kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan. • Menghimpun data dan informasi sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan. • Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara efektif dan berkelanjutan.
Peserta Kegiatan	:	• Ketua Umum dan Pengurus KONI Pusat • Pimpinan dan Pengurus KONI Provinsi Papua Pegunungan • Gubernur Provinsi Papua Pegunungan selaku Ketua Umum KONI Papua Pegunungan • Anggota Pokja Papua Cerdas Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Undangan terkait lainnya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas.
Hasil Kegiatan	:	Kegiatan pelantikan pimpinan KONI Provinsi Papua Pegunungan berlangsung dengan khidmat dan tertib, berdasarkan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 169 Tahun 2025 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Pegunungan. Pelantikan ini menandai dimulainya kepengurusan KONI di Provinsi Papua Pegunungan dengan Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, SE., MBA, sebagai Ketua Umum. Dalam sambutannya, Ketua Umum KONI Pusat menegaskan pentingnya kerja keras, komitmen, dan pembinaan atlet yang berkelanjutan guna mendorong Papua Pegunungan menjadi kekuatan baru olahraga nasional. Disampaikan pula potensi besar atlet Papua Pegunungan serta perlunya pemetaan cabang olahraga unggulan di setiap kabupaten. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Anggota Pokja Papua Cerdas BPP dalam mendukung fungsi

		sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pembangunan Otonomi Khusus Papua, khususnya pada aspek pengembangan sumber daya manusia melalui olahraga.
Rencana Tindakan lanjut	:	• Mendorong sinergi antara KONI Provinsi Papua Pegunungan dengan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pembinaan atlet usia dini. • Mengintegrasikan program pembinaan olahraga dengan misi pembangunan SDM dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. • Mendorong penyusunan peta jalan (roadmap) pembinaan cabang olahraga unggulan di setiap kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. • Memperkuat koordinasi antara KONI Provinsi Papua Pegunungan dan BPP dalam rangka evaluasi dan pengawalan program pembangunan olahraga berkelanjutan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan
Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kewenangan Pemerintahan Distrik
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Rabu, 03 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Grand Baliem Hotel Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur dalam aspek penguatan Kelembagaan dan Kewenagnan di tingkat Distrik dan Kampung di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	• Pokja Papua Sehat • Dekan FISIP Uncen • Staf Dosen Fisip Uncen sebagai Moderator
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Memahami dan menjadi anggota FGD dalam Kapasitas Kelembagaan dan Kewenangan SDM aparatur Pemerintahan di tingkat Distrik dan Kampung, Tomas dan Toga dalam mengatasi Kemiskinan Ekstrem Kesehatan.
Rencana Tindakanjutt	:	- Peserta 50 orang - Penyampaian Topik Bahasan oleh Narasumber - Diskusi dan Dialog difasilitasi oleh moderator berkompeten • Kesimpulan dan saran menjadi materi sosialisasi
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Pendataan Pengembangan Potensi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) tingkat Distrik cakupan di 8 Kabupaten se Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan	:	Dilaksakan pada 24 November s/d 3 Desember 2025, bertempat di Wamena

(Waktu & Lokasi)																																																																																						
nTujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mengetahui dan memonitor data hasil pengembangan Sarpraskes RSUD dan PKM di 8 Kabupaten, dan percepatan pembangunan yang masih kurang.																																																																																				
Peserta Kegiatan	:	• Pokja Papua sehat •																																																																																				
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK																																																																																				
Misi/Keterangan	:	Mengetahui data dalam Tugas dan Fungsi SHEK Pokja Papua Sehat kepada Pemerintah Provisi dan 8 Kabupaten dan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dalam jumlah dan kualitas Sarpraskes RSUD dan PKM																																																																																				
Hasil Kegiatan	:	Mengetahui data dalam Tugas dan Fungsi SHEK Pokja Papua Sehat kepada Pemerintah Provisi dan 8 Kabupaten dan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dalam jumlah dan kualitas Sarpraskes RSUD dan PKm. Berikut kami tampilkan data : <table><tr><th>Provinsi /Kabupaten</th><th>RSUP</th><th>Jumlah Distrik</th><th colspan="4">Pusat Kesehatan Masyarakat</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>Terbangun</th><th>Belum Bangun</th><th>Rawat Inap</th><th>PKM Belum Rawat Inap</th></tr><tr><td>*Provinsi Papua Pegunungan</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. Kabupaten Jayawijaya</td><td>RSUD</td><td>40</td><td>29</td><td>11</td><td>3</td><td>26</td></tr><tr><td>2. Kabupaten Lanny Jaya</td><td>RSUD</td><td>39</td><td>23</td><td>16</td><td>3</td><td>20</td></tr><tr><td>3. Kabupaten Tolikara</td><td>RSUD</td><td>46</td><td>27</td><td>19</td><td>3</td><td>24</td></tr><tr><td>4. Kab.Mamberamo Tengah</td><td>RSUD</td><td>5</td><td>9</td><td>Plus 4</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>5. Kabupaten Yalimo</td><td>RSUD</td><td>5</td><td>7</td><td>Plus 2</td><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td>6. Kabupaten Yahukimo</td><td>RSUD</td><td>51</td><td>43</td><td>8</td><td>3</td><td>40</td></tr><tr><td>7. Kabupaten Nduga</td><td>RSUD</td><td>32</td><td>8</td><td>24</td><td>0</td><td>24</td></tr><tr><td>8. Kab. Pegunungan Bintang</td><td>RSUD</td><td>34</td><td>5</td><td>29</td><td>4</td><td>25</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>: 8</td><td>252</td><td>152</td><td>107</td><td>22</td><td>169</td></tr></table>	Provinsi /Kabupaten	RSUP	Jumlah Distrik	Pusat Kesehatan Masyarakat							Terbangun	Belum Bangun	Rawat Inap	PKM Belum Rawat Inap	*Provinsi Papua Pegunungan	-						1. Kabupaten Jayawijaya	RSUD	40	29	11	3	26	2. Kabupaten Lanny Jaya	RSUD	39	23	16	3	20	3. Kabupaten Tolikara	RSUD	46	27	19	3	24	4. Kab.Mamberamo Tengah	RSUD	5	9	Plus 4	4	5	5. Kabupaten Yalimo	RSUD	5	7	Plus 2	2	5	6. Kabupaten Yahukimo	RSUD	51	43	8	3	40	7. Kabupaten Nduga	RSUD	32	8	24	0	24	8. Kab. Pegunungan Bintang	RSUD	34	5	29	4	25	Jumlah	: 8	252	152	107	22	169
Provinsi /Kabupaten	RSUP	Jumlah Distrik	Pusat Kesehatan Masyarakat																																																																																			
			Terbangun	Belum Bangun	Rawat Inap	PKM Belum Rawat Inap																																																																																
*Provinsi Papua Pegunungan	-																																																																																					
1. Kabupaten Jayawijaya	RSUD	40	29	11	3	26																																																																																
2. Kabupaten Lanny Jaya	RSUD	39	23	16	3	20																																																																																
3. Kabupaten Tolikara	RSUD	46	27	19	3	24																																																																																
4. Kab.Mamberamo Tengah	RSUD	5	9	Plus 4	4	5																																																																																
5. Kabupaten Yalimo	RSUD	5	7	Plus 2	2	5																																																																																
6. Kabupaten Yahukimo	RSUD	51	43	8	3	40																																																																																
7. Kabupaten Nduga	RSUD	32	8	24	0	24																																																																																
8. Kab. Pegunungan Bintang	RSUD	34	5	29	4	25																																																																																
Jumlah	: 8	252	152	107	22	169																																																																																
Rencana Tindaklanjuti	:	• Akan melanjutkan Pendataan Jumlah Kebutuhan dan kekurangan SDM dan Peralatan Kesehatan di RSUD dan PKM di 8 Kabupaten • Akan melaksanakan SHEK di masing-masing RSUD dan PKM bekerja berbasis data alokasi teknologi digital standar Kemenkes RI.																																																																																				

		• Melanjutkan SHEK Percepatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi dan RSUD Wamena yang baru pada Tahun 2026.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Kerja Wakil Ketua II MRP Provinsi Papua Pegunungan dengan BP3OKP dalam rangka silaturahmi dan membangun kerja sama melalui kontribusi tugas fungsi masing-masing.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Jumat, 09 Desember 2025, bertempat di Ruang Kerja Anggota Pengarah BPP
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Membahas isu-isu penting Pembangunan OAP melalui Program Prioritas Tahun 2026.
Peserta Kegiatan	:	• Anggota BPP • Pokja Papua Sehat • Wakil Ketua II MRP Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	• Membahas Strategi Percepatan Pendataan keaslian OAP merupakan dasar dan urgensi Pembangunan OAP di Provinsi Papua Pegunungan berbasis Klen Suku, Pewilayahan Domisi OAP. • Membahas Strategi Percepatan Penanganan Keamanan masyarakat antar suku dan Kepastian hukum Kepemilikan Tanah dan Lahan OAP. • Kesepakatan Percepatan perwujudan Koordinasi MRP, DPRP, BP3OKP bersama Gubernur dengan 8 Bupati se Proinsi Papua
Rencana Tindaklanjut	:	• Rencanakan Koordinasi lebih lanjut secara berkala terjadwal

		• Pendataan identitas Orang Asli Papua menjadi Prioritas Utama segera didorong dan dikawal proses pembahasan tahun 2026 • Prioritas Pembangunan Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi Kreatif melalui OAP mandiri terus-menerus didiskusikan
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Program dan Rencana Pembangunan Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2026 – 2029 dan Rencana Kerja Prioritas Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Minggu, 07 Desember 2025, bertempat di Rumah Kediaman Pokja Papua Sehat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Membahas isu-isu penting Pembangunan OAP melalui Program Prioritas Tahun 2026.
Peserta Kegiatan	:	• Pokja Papua Sehat • Pj. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	➤Penjelasan Strategi manajemen SDMkes : • Jumlah Tenaga, Kategori dan Jumlah Profesi terdiri 50 Jenis Profesi yaitu Dokter, Gizi, Perawat, dll • Distrupsi tehnologi Kesehatan 9 Jenis Profesi di Kota dan 5 Profesi di Pos/Luar Kota • Pengawasan Mutu: STR (srt Ijin Registrsi), Surat Ijin Praktek, dan SIK (Surat Ijin Kerja) berdasarkan Pendidikan • Monitoring dan Evalusi Tenaga Kesehatan: Pensiun, Pendidikan, • Struktur Jabatan : Uraian Tugas dan Perjanjian Kerja • Distribusi 271 Tenaga Baru Lulus Pendidikan

		• Program Afirmasi Pendidikan 70 orang Prodi Perawat 30 Org • Prodi Gizi 20 orang dan Prodi Kebidanan 20 orang • Penjelasan Program dan Strategi Penanganan Kesehatan Potensial • Stunting : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting terdiri : - TPPS : Tim Percepatan Penurunan Stunting - ISPS : Intervensi peranserta Pencegahan Stunting • Target Kerja Tim 3 sasaran yaitu: - Calon Pengantin baru mengenai stunting pada saat pra nikah, nikah dan setelah nikah - Ibu Hamil - Bayi Balita dengan alat Ukur standar USG/EKG dan tenaga pengukur yang terlatih • Kehadiran dan cakupan yang datang ke posyandu 100%, dan harus ada kader/petugas • Wajib setiap desa 1 posyandu aktif, dengan biaya dari 8 % dana desa dan Bupati wajib aktifkan Kepala Kampung menjadi Ketua Posyandu, Dinskes Pembina pelayanan, Kader Rekrutmen • Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan • Strategi Pembiayaan Kesehatan bersumber dana Otsus akan dilanjutkan Koordinasi berikut
Rencana Tindaklanjut	:	1. Pembentukan Tim Penurunan Stunting Kabupaten di Pimpin Sekda 2. Akan dilanjutkan kebijakan Pembentukan 10 Pusat Pengembangan PKM terkonsentrasi Pelayanan dari 40 PKM Distrik di Kabupaten Jayawijaya – dengan tujuan berfungsi sebagai: 3. Rentang Kendali Pelayann PKM 4. Percepatan Koordinasi dan Komunikasi Pelayanan 5. Efisiensi dan efektivitas Pelayaayan menjadi bayangan RSUD Madya berstatus Type D.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Perayaan Peringatan HUT ke 69 Hari Jadi Kota Wamena
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember 2025 Di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Memperingati Tapak Tilas sejarah perkembangan Kota Wamena dalam usia 69 Tahun berdirinya dengan capaian kemajuannya, dan menatap ke depan melanjutkan Pembangunan Kota Wamena lebih baik lagi sebagai ibu Kota Kabupaten Jayawijaya yang menjadi Kedudukan Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	Para Undangan Forkopimda Kabupaten dan Provinsi Papua Pegunungan dan seluruh Lapisan Masyarakat Penduduk Wamena Kota, Distrik dan Kampung sekitarnya termasuk Pokja BP3OKP.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Harmonisasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	• Olahraga berjalan Santai bersama 1 Km lingkar Kota Wamena, • Pujian, Ibadah dan Doa • Sambutan Bupati, Sejarah dan Hasil Kemajuan Kota Wamena • Hiburan Panggung terbuka, tarian dan lagu, panggung hiburan • Pesta Jamuan Makan makanan umum dan bakar batu wam • Persentase Hasil 100 hari kerja Bupati dan Wakil Kabupaten Jayawijaya
Rencana Tindaklanjut	:	• Penduduk Kota Wamena: Hari Esok Harus Lebih Baik dari Hari ini, dalam semua aspek kehidupan masyarakat Jayawijaya
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 6		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan Kerja II Lahan Pengembangan Pertanian Koperasi Desa Merah Putih Kwigwiluk dan SD Negeri Tanah Merah Distrik Molagalome
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada Jumat, 12 Desember 2025 bertempat di Kampung Kwigwiluk Distrik Molaglome
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Peninjauan lahan usaha pertanian sebagai cabang usaha pengembangan koperasi desa merah putih Kwigwiluk tinjauan penyelenggaraan pendidikan SD Negeri Tanah Merah Distrik Molagalome dan mendapat dukungan moril serta pembinaan
Peserta Kegiatan	:	• Pengurus dan Anggota Kelompok Tani sebagai Anggota KDMP • Kadin Pertanian dan Staf Kabupaten Jayawijaya Pokja Ekonomi Kreatif dan Pokja Papua Sehat BP3OKP • Kepala Distrik dan Aparat Kampung • Kepala Sekolah dan Staf Guru SD Negeri Tanah Merah
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat dan Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	• Sammbutan dari Masyarakat dan pnjelasan maksud dann • tujuan kegiatan diawali Doa. • Penjelasan Pengembangan Usaha oleh Pengurus Kelompok • Tani dan Koperasi KDMP Kwigwiluk • Pengarahan Kadin Pertanian Kabupaten dan akan membantu peralatan kerja dan Pasca Panen • Pengarahan Pokja Papua Ekonomi Kreatif dan Papua Sehat • Tinjauan Lahan Usaha dan Pengembangan Tanaman • Tinjauan Pengembangan SD Negeri Tanah Merah dan diskusiksi • dengan Kepala Sekolah dan Sfat guru • Jamuan Makan Berasama
Rencana Tindaklanjut	:	• Pembinaan lebih lanjut untuk 6 Kelompok Tani dalam Pengembangan Usaha Kopi dan tanaman Pangan 3 kali setahun • Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, Pengembangan Puskesmas dan Posyandu, Pengembangan Penddikan SD menjadi Prioritas Utama dikoordinasikan Kepala kampung melalui Kapaala Distrik • Menjaga Garis Batas Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya • Kepala Distrik memfasilitas kepala kampung untuk Pembuatan Peraturan tentang Ketetapan untuk usaha

		pertanian di Distrik Molagalome bebas pagar dan ternak babi dikandang
Dokumentasi Kegiatan	:	

BAB III PENUTUP

Penerapan Otonomi Khusus di Papua telah memasuki tahap baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan didukung oleh pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Tugas utama BPP mencakup sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan di Papua. Selain berfokus pada pembangunan fisik dan kesejahteraan, BPP juga berkomitmen memastikan partisipasi aktif masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan menjembatani kebutuhan mereka dengan kebijakan pemerintah pusat. Di bawah rencana induk yang terukur melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2023, BPP berperan penting dalam mengarahkan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Otsus Papua.

Dengan adanya BPP yang memiliki wewenang dan struktur yang jelas, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk yang telah disusun hingga tahun 2041. Kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat Papua sangat diperlukan agar pelaksanaan Otsus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat Papua. Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ini untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, damai, dan produktif.

Kegiatan yang di lakukan oleh BP3OKP dalam hal ini anggota dan juga masing-masing pokja berhubungan dengan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi terutama dalam era kepemimpinan baru Gubernur dan Bupati diharapkan BP3OKP dapat mengambil peran penting dalam pembangunan di Papua Pegunungan.

Wamena, 8 Januari 2026
BP3OKP
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN



HANTOR MATUAN, S.IP